



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



*Kementerian PPN/
Bappenas*

2019

Semester I

Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan
**Program Percepatan Pencegahan
dan Penurunan Stunting**

**Kementerian Keuangan
dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional**

Agustus 2019

KATA PENGANTAR

Upaya percepatan penurunan *stunting*, khususnya melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) telah dituangkan dalam dokumen ringkasan *output* K/L Tahun Anggaran (TA) 2019 yang mendukung percepatan penurunan *stunting* sebagai acuan bagi Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L dalam melakukan reviu kinerja pembangunan dan anggaran. Laporan semester I pemantauan kinerja pembangunan dan anggaran upaya percepatan penurunan *stunting* disusun untuk menganalisis perkembangan capaian *output* dan kinerja anggaran K/L sampai dengan bulan Juli tahun 2019. Analisis dalam laporan ini meliputi kinerja penyerapan anggaran, pencapaian *output*, pengintegrasian *output* ke dalam sistem perencanaan (KRISNA) dan sistem penganggaran (RKA K/L), serta indikasi konvergensi pelaksanaan program. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas program.

Secara umum implementasi program percepatan penurunan *stunting* sudah cukup baik dengan tingkat capaian *output* sampai semester I sebagian besar *on track*, demikian juga dengan serapan anggarannya. Di samping itu, komitmen K/L untuk menjaga alokasi *output-output* yang mendukung penurunan *stunting* sudah cukup baik. Melihat perkembangan tersebut, kinerja pembangunan dan anggaran program percepatan penurunan *stunting* pada akhir tahun 2019 diperkirakan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, antara lain peningkatan kepatuhan K/L dalam melakukan penandaan (*tagging*) tematik “Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*” untuk *output-output* yang telah diidentifikasi dan disepakati mendukung upaya penurunan *stunting* pada Rencana Kerja K/L (KRISNA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L). Selain itu, dalam jangka menengah juga diperlukan langkah penyusunan standar format pemantauan dan evaluasi, penguatan evaluasi internal K/L (*self-assessment*) terutama untuk mengidentifikasi lokasi aktual pelaksanaan kegiatan serta sasaran kegiatan (rumah tangga 1.000 HPK), serta penyediaan *dashboard* yang memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara *real time* dan lebih baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga laporan semester I pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi K/L dalam melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja program pada semester selanjutnya.

Jakarta, Agustus 2019

Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas


Subandi Sardjoko

Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan


Askolani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Laporan Semester I	
I. Pendahuluan	1
II. Perkembangan Dokumen Ringkasan Output K/L TA 2019 Yang Mendukung Penurunan Stunting	2
III. Realisasi Semester I Tahun 2019	8
IV. Analisa dan Pembahasan	10
V. Rekomendasi	28
Lampiran	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah telah berkomitmen dalam percepatan pencegahan *stunting* di Indonesia melalui koordinasi lintas sektoral, dan untuk belanja K/L mulai APBN 2019 dilakukan langkah penguatan melalui penandaan (*tagging*) atas *output* yang berkontribusi terhadap penurunan *stunting*. Hal ini ditindaklanjuti dengan proses pemantauan dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Laporan pemantauan dan evaluasi dalam semester I ini meliputi analisis atas kinerja penyerapan anggaran, pencapaian *output*, pengintegrasian *output* ke dalam sistem perencanaan (KRISNA) dan sistem penganggaran (RKA K/L), serta indikasi konvergensi pelaksanaan program percepatan pencegahan *stunting*.

Hasil pemantauan evaluasi ini menunjukkan implementasi program percepatan pencegahan *stunting* pada semester I sudah menunjukkan kinerja baik, dengan tingkat capaian *output* sampai semester I sebagian besar *on track*. Indikasi terjadinya koordinasi lintas sektor dalam tahap implementasi sudah terlihat, baik di tingkat pusat (antar K/L) maupun antara K/L dengan pemda serta instansi terkait lainnya. Melihat perkembangan pelaksanaannya dalam semester I tersebut dan langkah-langkah K/L dalam mengantisipasi kendala yang ada, diharapkan kinerja pembangunan dan anggaran program percepatan penurunan *stunting* pada akhir tahun 2019 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan semester I ini, Pemerintah melalui belanja K/L telah berhasil menysasar 56.247 ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT (98% dari target semester I), sebanyak 78.918 balita kurus yang mendapatkan PMT (97% dari target semester I), Sebanyak 181.854 posyandu (60,2%) merupakan Posyandu aktif yang kegiatannya antara lain orientasi kader posyandu serta edukasi gizi (kerja sama dengan Kemendagri dan PKK), Sebanyak 146 lembaga PAUD (dari target 200 lembaga) menerima bantuan untuk pelaksanaan pendidikan PAUD, sebanyak 743.183 keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun (baduta) mendapatkan promosi pengasuhan 1.000 HPK, sebanyak 10.587 remaja putri (dari target 29.327 remaja putri) menerima edukasi kesehatan reproduksi dan gizi, sebanyak 12,5 juta KPM telah menerima BPNT dengan 6,3 juta KPM pada lokasi prioritas *stunting*, serta sebanyak 80% ibu hamil penerima PKH memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan.

Namun demikian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kinerja program, diantaranya adalah meningkatkan kepatuhan penandaan (*tagging*) tematik, penguatan implementasi pada semester II terutama terhadap beberapa *output* yang mengalami hambatan di semester I, serta penguatan laporan pemantuan melalui penyusunan standar serta format laporan hasil evaluasi mandiri K/L yang lebih informatif.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan pencegahan *stunting* merupakan pendekatan program (*programmatic approach*) pertama yang dilakukan dengan terintegrasi dan secara menyeluruh. Pengelolaan program percepatan pencegahan *stunting* ini dilakukan mulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari komitmen pimpinan tertinggi (*leadership* dari Presiden dan Wakil Presiden) hingga ke tingkat daerah. Upaya untuk memastikan konvergensi berbagai program/kegiatan percepatan pencegahan *stunting* mengacu pada dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* (Stranas *Stunting*) yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan dan pedoman untuk operasionalnya. Upaya pencegahan *stunting* juga melibatkan berbagai pihak, tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor lain yang terkait seperti pertanian, pendidikan, air minum dan sanitasi, serta perlindungan sosial.

Dalam kaitannya dengan percepatan pencegahan *stunting* melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L), telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan agar pengelolaan program tersebut terarah dan terukur. Pada proses perencanaan, khususnya terkait dengan identifikasi *output* yang terkait dengan *stunting*, telah disusun pedoman penandaan, pemantauan, dan evaluasi percepatan pencegahan *stunting*, sebagai dasar bagi K/L dalam mengidentifikasi *output* yang berkontribusi kepada percepatan penurunan *stunting*. Selanjutnya, dilakukan forum koordinasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan K/L terkait secara berkala untuk mengkaji hasil penandaan tersebut sekaligus melakukan penajaman hasil identifikasi pada level di bawah *output* atau dengan pembobotan. Ringkasan *output* K/L yang telah disusun tersebut, digunakan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program percepatan penurunan *stunting*.

Proses pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam penyempurnaan program ke depan, baik dalam penyempurnaan proses perencanaan dan penganggaran terkait dengan perbaikan proses identifikasi *output*, perbaikan proses pelaksanaan dalam kaitannya efisiensi dan peningkatan ketepatan sasaran intervensi, serta evaluasi atas konvergensi yang terjadi dalam pelaksanaan seluruh proses. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas belanja dalam penanganan permasalahan *stunting* serta kualitas belanja secara umumnya.

Proses pemantauan dan evaluasi ini membutuhkan berbagai informasi, baik informasi yang tersedia secara *real-time* dalam sistem informasi Rencana Kerja K/L (KRISNA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) seperti: (i) perubahan dari pagu alokasi *output*, (ii) kinerja penyerapan anggaran, dan (iii) capaian *output*, maupun informasi yang pengelolannya masih belum tersedia dalam sistem informasi seperti: (i) kinerja program secara keseluruhan, (ii) kinerja program pada lokasi prioritas, dan (iii) hambatan dan kendala yang terjadi pada setiap tahapan program.

Pada penyusunan laporan semester I ini, Pemerintah menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juli tahun 2019. Ruang lingkup laporan mencakup proses penandaan *output* K/L yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan *stunting*, implementasi anggaran dan pencapaian *output* pada semester I tahun 2019, serta identifikasi indikasi konvergensi baik dalam hal lokasi intervensi dan kesesuaian target sarannya. Dari temuan serta analisis yang dilakukan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi perbaikan, baik dalam rangka pelaksanaan program pada semester II tahun 2019 maupun perbaikan proses perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

B. Tujuan

Penyusunan laporan semester I pemantauan kinerja pembangunan dan anggaran upaya percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk:

1. Melihat perkembangan dokumen anggaran (alokasi) dari *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting*,
2. Melihat perkembangan pelaksanaan anggaran serta pencapaian target *output* tersebut pada semester I tahun 2019,
3. Mengidentifikasi kinerja anggaran dan *output* serta indikasi konvergensi pada beberapa *output* terpilih,
4. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi program, dan
5. Menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas program konvergensi percepatan pencegahan *stunting* melalui belanja K/L, baik dalam proses perencanaan dan penganggaran, implementasi program, serta peningkatan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.

II. PERKEMBANGAN DOKUMEN RINGKASAN OUTPUT K/L TA 2019 YANG Mendukung Pencegahan STUNTING

A. Perkembangan Dokumen Ringkasan

Sesuai dengan dokumen ringkasan hasil *output* K/L TA 2019 yang mendukung penurunan *stunting* yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu pada bulan Januari 2019, terdapat 96 *output* pada 18 K/L yang memiliki alokasi anggaran yang diklasifikasikan sebagai *output* yang memiliki dampak kepada percepatan penurunan *stunting*.

Selanjutnya, dalam forum koordinasi dan pertemuan pendalaman *output* yang dilaksanakan setelah penyusunan ringkasan *output* K/L tersebut (bulan April dan Juni 2019), **terdapat beberapa penyesuaian identifikasi *output* pada 3 (tiga) K/L** sebagai berikut:

1. Kementerian Agama
 - a. ***Output* 2104 003 Keluarga Sakinah yang Terbina** disepakati untuk tidak lagi dimasukkan ke dalam *perhitungan output* K/L yang mendukung penurunan *stunting* karena kegiatan lebih difokuskan pada ekonomi keluarga dan tidak spesifik pada isu kesehatan dan gizi,

- b. **Output 2104 008 Bimbingan perkawinan pra nikah** relevan dimasukkan ke dalam *output* mendukung *stunting* dimana dari 2 dari 16 jam materi terkait kespro dan pencegahan *stunting*,
 - c. **Output 2145 014 Bimbingan Keluarga Hiittasukhaya** yang belum tercatat pada identifikasi awal dimasukkan ke dalam *output* mendukung *stunting* dimana 2 dari 10 topik bimbingan terkait kesehatan reproduksi dan peningkatan gizi keluarga.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: **output 5636 009 Rata-rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas** pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dimasukkan ke dalam *output* mendukung *stunting* karena terdapat komponen untuk diklat berjenjang/pelatihan calon pelatih khusus materi penanganan *stunting*.
 3. Kementerian Pertanian : **output 1816 105 Pengembangan pangan lokal** disepakati untuk tidak lagi dimasukkan ke dalam *perhitungan output* K/L yang mendukung penurunan *stunting* karena kegiatan lebih kepada pemberian alat produksi pada UMKM yang tidak terkait langsung penurunan *stunting*.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka dilakukan pemutakhiran terhadap ringkasan *output* K/L TA 2019 yang mendukung penurunan *stunting* pada bulan Juli 2019 dengan hasil rekapitulasi **97 ouput yang mendukung percepatan penurunan *stunting*** dengan alokasi sebesar Rp94,35 triliun, meningkat sebesar Rp80,5 miliar pada tingkat *output*. Dari hasil analisis lanjut terhadap total anggaran tersebut, **alokasi anggaran TA 2019 yang relevan dalam mendukung penurunan *stunting* adalah sebesar Rp29 triliun** (meningkat Rp8,7 miliar dari dokumen ringkasan sebelumnya). Ringkasan tersebut disajikan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Perkembangan Ringkasan Output K/L TA 2019 Yang Mendukung Penurunan Stunting

dalam ribu rupiah

No	Kementerian/ Lembaga	Ringkasan Penandaan (Januari)		Ringkasan Penandaan (Juli)		Selisih	
		Alokasi Output	Alokasi Mendukung Stunting	Alokasi Output	Alokasi Mendukung Stunting	Alokasi Output	Alokasi Mendukung Stunting
1	Kemendagri	30.570.000	27.953.831	30.570.000	27.953.831	-	-
2	Kementan	295.111.000	295.111.000	282.861.000	282.861.000	(12.250.000)	(12.250.000)
3	Kemenperin	1.750.000	1.250.000	1.750.000	1.250.000	-	-
4	Kemendikbud	56.491.043	38.392.078	163.025.612	59.472.628	106.534.569	21.080.550
5	Kemenkes	32.901.563.845	6.473.385.506	32.901.563.845	6.473.385.506	-	-
6	Kemenag	94.075.507	10.211.239	80.291.198	10.107.446	(13.784.309)	(103.793)
7	Kemensos	55.300.700.469	17.011.263.533	55.300.700.469	17.011.263.533	-	-
8	KKP	32.212.000	32.212.000	32.212.000	32.212.000	-	-
9	Kemen PUPR	5.052.761.486	4.723.935.194	5.052.761.486	4.723.935.194	-	-
10	Kemenko PMK	2.150.000	800.000	2.150.000	800.000	-	-
11	Kemen PPPA	2.000.000	1.600.000	2.000.000	1.600.000	-	-
12	BPS	213.758.937	208.822.859	213.758.937	208.822.859	-	-
13	Kemen PPN/ Bappenas	2.250.000	1.000.000	2.250.000	1.000.000	-	-
14	Kemenkominfo	39.200.000	25.000.000	39.200.000	25.000.000	-	-
15	BPOM	126.019.973	61.798.922	126.019.973	61.798.922	-	-
16	Kemendes PDTT	7.750.000	5.236.305	7.750.000	5.236.305	-	-
17	BKKBN	93.398.809	65.237.391	93.398.809	65.237.391	-	-
18	BATAN	14.662.900	13.827.260	14.662.900	13.827.260	-	-
Total		94.266.425.969	28.997.037.118	94.346.926.229	29.005.763.874	80.500.260	8.726.756

Sumber : Ringkasan hasil tagging dan Bussiness Intelligence, DJA

B. Perkembangan Proses Penandaan di Sistem KRISNA dan RKA K/L

Dari 97 output yang mendukung percepatan penurunan stunting, hanya 41 output yang telah dilakukan tagging dalam sistem KRISNA dan RKA K/L sampai akhir Juli 2019. Dibandingkan dengan data per Januari 2019, hanya terdapat penambahan 1 output yang di-tagging, yaitu pada BKKBN untuk output **3317.021 Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.**

Masih rendahnya kepatuhan K/L terhadap proses tagging dalam sistem KRISNA dan RKA K/L pada tahun 2019 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan dokumen Pedoman Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Percepatan Pencegahan Stunting Kementerian/Lembaga pada akhir bulan Desember 2018, sehingga belum dapat diakomodir pada proses penelaahan RKA K/L dan DIPA TA 2019 yang telah selesai pada bulan November 2019.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 yang memberikan mandat kepada Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan penandaan *output* ke dalam beberapa tematik APBN, termasuk tematik *stunting* terbit pada tanggal 29 Oktober 2018.
3. Ringkasan *output* K/L yang berisi daftar *output* yang berkontribusi terhadap penurunan *stunting*, merupakan kesepakatan dalam forum *trilateral meeting* (Kementerian PPN/Bappenas, DJA Kemenkeu, dan K/L terkait), ditetapkan pada bulan Januari 2019. Proses pengintegrasian *tagging stunting* ke dalam sistem KRISNA dan RKA K/L pada tahun berjalan (mekanisme revisi) masih belum optimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 proses *tagging* tematik, termasuk *tagging* tematik *stunting*, diusulkan oleh K/L dalam penyampaian RKA K/L untuk kemudian ditelaah lebih lanjut dalam forum penelaahan.

Tabel 2. Jumlah Output K/L TA 2019 Mendukung Penurunan Stunting menurut penandaan

No	Kementerian/ Lembaga	Output yang Mendukung Stunting			
		Total	Tagging per Januari 2019	Tagging per Juli 2019	%
1	Kemendagri	7	3	3	42,9
2	Kementan	5	-	-	-
3	Kemenperin	2	-	-	-
4	Kemendikbud	4	-	-	-
5	Kemenkes	47	29	29	61,7
6	Kemenag	2	-	-	-
7	Kemensos	5	-	-	-
8	KKP	1	-	-	-
9	Kemen PUPR	8	2	2	25,0
10	Kemenko PMK	1	-	-	-
11	Kemen PPPA	1	1	1	100,0
12	BPS	2	-	-	-
13	Kemen PPN/ Bappenas	1	-	-	-
14	Kemenkominfo	1	1	1	100,0
15	BFOM	3	-	-	-
16	Kemendes PDDT	2	-	-	-
17	BKKBN	3	2	3	100,0
18	BATAN	2	2	2	100,0
Total		97	40	41	42,3

Sumber : Bussiness Intelligence, DJA

C. Perkembangan Pagu Ringkasan Hasil Penandaan

Dalam pelaksanaan anggaran, dimungkinkan dilakukan penyesuaian anggaran oleh K/L untuk fleksibilitas K/L menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhannya dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui proses realokasi maupun adanya tambahan alokasi akibat adanya belanja baru sesuai ketentuan perundang-undangan, misalnya tambahan alokasi belanja yang bersumber dari hibah pada tahun berjalan.

Sampai dengan semester I tahun 2019, besaran alokasi *output* yang mendukung percepatan pencegahan *stunting* pada level *output* sebesar Rp94,9 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp517,1 miliar dari alokasi yang sudah dihitung dalam dokumen ringkasan. Dari 19 K/L yang memiliki *output* mendukung penurunan *stunting*, sebanyak 6 K/L tidak mengalami perubahan pagu, 6 K/L mengalami kenaikan pagu, termasuk Sekretariat Negara, dan 7 K/L pagunya mengalami penurunan. Adapun rekapitulasi pagu di tingkat *output* dalam percepatan pencegahan *stunting* dapat dilihat dalam **Tabel 3**. Sebagai contoh, Kementerian PPN/Bappenas mengalami kenaikan pagu sejalan dengan adanya dukungan tambahan alokasi dari hibah luar negeri pada tahun berjalan.

**Tabel 3. Rekapitulasi Alokasi Anggaran Tingkat Output K/L TA 2019
Yang Mendukung Penurunan Stunting**

dalam ribu rupiah

No	Kementerian/ Lembaga	Perkembangan Alokasi Tingkat Output				Selisih (Pagu Harian thd Ringkasan Juli)
		Ringkasan Januari	DIPA APBN	Ringkasan Juli	Pagu Harian	
1	Setneg	-	-	-	61.248.190	61.248.190
2	Kemendagri	30.570.000	34.570.000	30.570.000	23.962.414	(6.607.586)
3	Kementan	295.111.000	282.861.000	282.861.000	283.861.000	1.000.000
4	Kemenperin	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-
5	Kemendikbud	56.491.043	163.025.612	163.025.612	133.868.362	(29.157.250)
6	Kemenkes	32.901.563.845	32.901.563.845	32.901.563.845	32.995.703.049	94.139.204
7	Kemenag	94.075.507	80.291.198	80.291.198	38.178.161	(42.113.037)
8	Kemensos	55.300.700.469	55.300.700.469	55.300.700.469	55.061.790.526	(238.909.943)
9	KKP	32.212.000	32.212.000	32.212.000	32.212.000	-
10	Kemen PUPR	5.052.761.486	5.052.761.486	5.052.761.486	5.743.966.123	691.204.637
11	Kemenko PMK	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	-
12	Kemen PPPA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
13	BPS	213.758.937	213.763.081	213.758.937	222.513.183	8.754.246
14	Kemen PPN/ Bappenas	2.250.000	2.250.000	2.250.000	15.679.732	13.429.732
15	Kemenkominfo	39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.200.000	-
16	BPOM	126.019.973	126.019.973	126.019.973	123.652.976	(2.366.997)
17	Kemendes PDTT	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	-
18	BKKBN	93.398.809	93.398.809	93.398.809	59.892.127	(33.506.682)
19	BATAN	14.662.900	14.662.900	14.662.900	14.621.606	(41.294)
Total		94.266.425.969	94.350.930.373	94.346.926.229	94.863.999.449	517.073.220

Sumber : Ringkasan hasil tagging dan Business Intelligence, DJA

Catatan : perbedaan data alokasi antara DIPA APBN dan Ringkasan Juli disebabkan perbedaan tanggal cut off data

Selain *output* yang tercantum dalam dokumen ringkasan hasil penandaan, terdapat *output* baru terkait dengan peningkatan kapasitas koordinasi, monitoring, dan kelembagaan pencegahan *stunting* di Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara yang dialokasikan melalui mekanisme revisi DIPA 2019, sebagai mana disajikan dalam **Tabel 4**.

Tabel 4. Tambahan Output Pada Sekretariat Negara Melalui Revisi DIPA APBN TA 2019

dalam ribu rupiah

Kode	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Volume - Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)		Status Tagging Tematik Stunting
				Total Anggaran Output	Alokasi Terkait Stunting	
007	Kementerian Sekretariat Negara					
007	Sekretariat Wakil Presiden					
04	007 04 06	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden				
	1196	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana				
	007	Hasil analisis pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan anak kerdil (<i>stunting</i>)	2 Dokumen	61.248.000	61.248.000	-

Lebih lanjut, perkembangan pagu dengan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan penajaman melalui pemetaan sub-output/komponen/sub-komponen yang terkait dengan intervensi penurunan *stunting* dan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran yang dialokasikan secara khusus pada output tersebut untuk pencegahan *stunting*, terlihat bahwa dalam pagu harian total alokasi output tersebut meningkat Rp765,3 miliar, dengan peningkatan tertinggi terdapat pada jenis intervensi sensitif sebesar Rp741,2 miliar. Namun demikian, bila dilihat rincian menurut K/L, maka terdapat 7 K/L yang alokasinya menurun sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5**.

Tabel 5. Rekapitulasi Alokasi Anggaran Dengan Analisis Lanjutan Output K/L TA 2019

dalam juta rupiah

No	Kementerian/ Lembaga	Ringkasan Pagu (Juli) dengan Penajaman / Pembobotan				Pagu Harian dengan Penajaman / Pembobotan			
		Total	Jenis Intervensi			Total	Jenis Intervensi		
			Spesifik	Sensitif	Dukungan		Spesifik	Sensitif	Dukungan
1	Setneg	-	-	-	-	61.248	-	-	61.248
2	Kemendagri	27.953	-	-	27.953	22.436	-	-	22.436
3	Kementan	282.861	-	268.150	14.711	283.861	-	269.150	14.711
4	Kemenperin	1.250	-	1.250	-	1.250	-	1.250	-
5	Kemendikbud	59.473	-	37.938	21.535	59.631	-	37.938	21.693
6	Kemenkes	6.473.386	3.656.222	2.440.532	376.632	6.469.238	3.662.555	2.440.529	366.155
7	Kemenag	10.107	-	10.107	-	4.834	-	4.834	-
8	Kemensos	17.011.264	-	16.971.722	39.541	16.937.679	-	16.898.138	39.541
9	KKP	32.212	-	32.212	-	32.212	-	32.212	-
10	Kemen PUPR	4.723.935	-	4.378.129	345.806	5.524.975	-	5.225.700	299.275
11	Kemenko PMK	800	-	-	800	800	-	-	800
12	Kemen PPPA	1.600	-	1.600	-	1.600	-	1.600	-
13	BPS	208.823	-	-	208.823	214.813	-	-	214.813
14	Kemen PPN/ Bappenas	1.000	-	-	1.000	14.530	-	-	14.530
15	Kemenkominfo	25.000	-	25.000	-	26.038	-	26.038	-
16	B POM	61.799	-	61.799	-	59.672	-	59.672	-
17	Kemendes PDTT	5.236	-	-	5.236	4.640	-	-	4.640
18	BKKBN	65.237	-	65.237	-	37.825	-	37.825	-
19	BATAN	13.827	-	-	13.827	13.827	-	-	13.827
	Total	29.005.764	3.656.222	24.293.677	1.055.864	29.771.111	3.662.555	25.034.887	1.073.669

Sumber : Ringkasan hasil tagging, Business Intelligence DJA, dan Dokumen Evaluasi Mandiri K/L

III. REALISASI SEMESTER I TAHUN 2019

A. Realisasi di Tingkat output

Realisasi anggaran di tingkat *output* dalam percepatan pencegahan *stunting* sampai Semester I tahun 2019 sebesar Rp62,6 triliun atau 65,9 persen terhadap pagu dan realisasi sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp67,6 triliun atau 71,2 persen terhadap pagu harian sebesar 94,86 triliun sebagaimana tersaji dalam **Tabel 6**. Tingginya realisasi tersebut disumbangkan oleh realisasi *output* terkait penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada Kementerian Kesehatan, dan program bantuan tunai bersyarat (PKH) serta bantuan sosial pangan (BPNT) pada Kementerian Sosial. Namun demikian, hanya 8 K/L yang memiliki tingkat serapan anggaran lebih dari 50 persen. Lebih lanjut, sebanyak 74 *output* tingkat realisasinya masih lebih rendah dari 50 persen.

**Tabel 6. Realiasi Anggaran di Tingkat Output K/L TA 2019
Yang Mendukung Penurunan Stunting**

dalam ribu rupiah

No	Kementerian/ Lembaga	Alokasi di tingkat output					
		Ringkasan (Pagu)	Pagu Harian	Realisasi Semester I	%	Realisasi s.d. Juli	%
1	Setneg	-	61.248.190	8.362.846	13,7	8.362.846	13,7
2	Kemendagri	30.570.000	23.962.414	3.329.779	13,9	6.558.698	27,4
3	Kementan	282.861.000	283.861.000	157.703.993	55,6	186.285.841	65,6
4	Kemenperin	1.750.000	1.750.000	311.608	17,8	437.273	25,0
5	Kemendikbud	163.025.612	133.868.362	57.837.006	43,2	65.032.549	48,6
6	Kemenkes	32.901.563.845	32.995.703.049	24.977.189.673	75,7	27.498.704.556	83,3
7	Kemenag	80.291.198	38.178.161	13.376.836	35,0	18.647.583	48,8
8	Kemensos	55.300.700.469	55.061.790.526	36.516.678.884	66,3	38.647.698.725	70,2
9	KKP	32.212.000	32.212.000	7.251.504	22,5	7.875.527	24,4
10	Kemen PUPR	5.052.761.486	5.743.966.123	530.641.850	9,2	823.484.053	14,3
11	Kemenko PMK	2.150.000	2.150.000	856.713	39,8	967.375	45,0
12	Kemen PPPA	2.000.000	2.000.000	867.604	43,4	1.188.403	59,4
13	BPS	213.758.937	222.513.183	143.624.330	64,5	147.845.460	66,4
14	Kemen PPN/ Bappenas	2.250.000	15.679.732	995.325	6,3	1.326.635	8,5
15	Kemenkominfo	39.200.000	39.200.000	29.320.606	74,8	30.526.144	77,9
16	B POM	126.019.973	123.652.976	72.416.056	58,6	78.867.361	63,8
17	Kemendes PD TT	7.750.000	7.750.000	1.525.716	19,7	1.950.154	25,2
18	BKKBN	93.398.809	59.892.127	28.860.335	48,2	39.112.484	65,3
19	BATAN	14.662.900	14.621.606	660.669	4,5	780.217	5,3
Total		94.346.926.229	94.863.999.449	62.551.811.333	65,9	67.565.651.879	71,2

Sumber : Ringkasan hasil tagging dan Bussiness Intelligence, DJA

Dilihat menurut jenis intervensi, kinerja anggaran dari intervensi spesifik masih relatif rendah dibandingkan dengan intervensi sensitif dan pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis. Realisasi anggaran dari seluruh intervensi spesifik dalam semester I hanya sebesar Rp298,9 miliar, dan realisasinya sampai dengan bulan Juli 2019 meningkat menjadi sebesar Rp499,3 miliar (11,6 persen) dari pagu sebesar Rp4,3 triliun. Lebih lanjut,

terdapat 7 *output* intervensi spesifik yang sampai dengan semester I belum ada realisasi anggarannya.

Realisasi intervensi sensitif dari seluruh *output* dalam semester I mencapai Rp61,7 triliun dan sampai dengan bulan Juli tingkat penyerapannya meningkat menjadi Rp66,5 triliun (75,1 persen) dari pagunya sebesar Rp88,4 triliun. Tingginya tingkat realisasi tersebut antara lain disumbangkan oleh tingginya realisasi program keluarga harapan (PKH) dan Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional masing masing sebesar Rp27,7 triliun dan Rp26,5 triliun. Sementara untuk intervensi yang sifatnya pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis, realisasi sampai dengan semester I tahun 2019 sebesar Rp513,5 miliar dan sampai dengan bulan Juli meningkat menjadi Rp610,5 Milyar atau 36,4 persen dari pagunya.

B. Kesesuaian Realisasi Anggaran Semester I dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan K/L, dari seluruh *output* tersebut dengan memperhitungkan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan pemetaan sub-*output*/komponen/sub-komponen yang terkait dengan intervensi penurunan *stunting* dan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk penurunan *stunting*, realisasinya pada semester I mencapai Rp20,6 triliun, atau 69,2 persen dari pagu sebesar Rp29,8 triliun. Hal ini antara lain disebabkan sebagian intervensi memang direncanakan oleh K/L untuk dilaksanakan pada semester II tahun 2019.

Jika dilihat dari kesesuaian realisasi anggaran tersebut dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), maka tingkat realisasi semester I tahun 2019 sebesar Rp20,6 triliun atau 104,5 persen terhadap rencana penarikan dana pada semester I. Terdapat 5 K/L yang tingkat realisasi anggarannya lebih besar dari RPD nya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PU Pera, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kominfo. Dua K/L yaitu BPS dan Badan POM memiliki kesesuaian serapan anggaran di atas 90 persen terhadap RPD-nya, sedangkan 12 K/L lainnya memiliki serapan anggaran di bawah RPD-nya sebagaimana disajikan dalam **Tabel 7**.

Tabel 7. Kesesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Semester I Output K/L TA 2019 Yang Mendukung Penurunan Stunting

dalam ribu rupiah

No	Kementerian/ Lembaga	Output dengan analisis lanjutan/ bobot		
		RPD Semester I	Realisasi Semester I	%
1	Setneg	30.624.095	8.362.846	27,3
2	Kemendagri	5.987.000	3.329.779	55,6
3	Kementan	218.181.000	155.153.324	71,1
4	Kemenperin	508.000	311.608	61,3
5	Kemendikbud	37.445.020	57.837.006	154,5
6	Kemenkes	3.652.382.506	2.701.115.168	74,0
7	Kemenag	75.000.000	13.376.836	17,8
8	Kemensos	15.241.871.370	17.194.631.367	112,8
9	KKP	9.100.000	7.251.504	79,7
10	Kemen PUPR	95.535.785	176.051.501	184,3
11	Kemenko PMK	400.000	856.713	214,2
12	Kemen PPPA	1.320.000	867.604	65,7
13	BPS	145.614.578	142.794.945	98,1
14	Kemen PPN/ Bappenas	4.789.333	1.010.860	21,1
15	Kemenkominfo	26.038.400	29.320.606	112,6
16	BPOM	75.629.925	72.416.056	95,8
17	Kemendes PDDT	2.090.000	1.525.716	73,0
18	BKKBN	89.672.109	28.860.335	32,2
19	BATAN	3.697.000	575.964	15,6
Total		19.715.886.121	20.595.649.735	104,5

Sumber : Hasil Evaluasi Mandiri K/L, 2019

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisis capaian kinerja pada semester I tahun 2019 akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Forum Koordinasi Multilateral

Dari sisi pelaksanaan koordinasi (forum multilateral), proses yang dijalankan cukup berhasil, dengan adanya *information exchange* yang sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan (K/L) dalam setiap tahapan proses pengelolaan program (perencanaan dan penganggaran meliputi identifikasi *output*, penajaman *output*, dan mendorong untuk proses penandaan; serta pelaksanaan anggaran terkait dengan implementasi kegiatan/ *output*).

Forum koordinasi multilateral tersebut dilaksanakan secara berkala, mulai dari proses identifikasi *output* yang berkontribusi terhadap pencegahan *stunting*, pendalaman untuk meningkatkan akurasi alokasi yang memiliki dampak terhadap pencegahan *stunting*, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan anggarannya, serta koordinasi lainnya yang diperlukan dalam penyempurnaan progra. Forum koordinasi multilateral ini telah memiliki beberapa capaian berikut:

- a. Pelaksanaan evaluasi kembali atas identifikasi *output*, baik *output existing*, *output* baru, serta *output* yang telah ditandai namun sebenarnya tidak relevan dengan program percepatan penurunan *stunting* untuk tahun 2019.
- b. Penajaman alokasi pada *output* yang diidentifikasi, baik melalui pemetaan komponen yang terkait penurunan *stunting* maupun metode pembobotan (sebagaimana tercantum dalam pedoman penandaan) merupakan pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah dalam pengelolaan anggaran tematik dan diharapkan dapat mempertajam analisa dan evaluasi program (menghindari *over estimate*).
- c. Penyempurnaan hasil identifikasi *output* melalui pemutakhiran atas dokumen ringkasan *output* K/L yang mendukung penurunan *stunting* pada bulan Juli 2019 sesuai dengan hasil forum koordinasi multilateral. Dalam pemutakhiran dokumen tersebut, disampaikan pula evaluasi atas *output-output* hasil identifikasi (misalnya, *output* baru yang ditambahkan, *output* hasil identifikasi yang setelah dievaluasi disepakati untuk dikeluarkan karena tidak memiliki dampak terhadap program *stunting*, serta pertukaran data dan informasi dari berbagai pemangku kepentingan).
- d. Pelaksanaan identifikasi *output* untuk tahun 2020 yang sudah diinisiasi pada bulan Maret 2019 untuk diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penguatan forum koordinasi multilateral tersebut, yaitu terkait dengan tindaklanjut dari forum, antara lain:

- a. Penguatan proses pemantauan dan evaluasi yang saat ini masih dalam pengembangan (mengingat tahun 2019 merupakan tahun pertama penyusunan laporannya), perlu mulai disusun standarnya, termasuk data dan informasi yang dibutuhkan dari setiap pihak.
- b. Penguatan forum koordinasi dengan pendokumentasian (serta distribusi) kesepakatan ataupun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing pemangku kepentingan untuk penyempurnaan program di masa mendatang. Proses rekonsiliasi multilateral I yang sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dan rekonsiliasi II yang direncanakan pada bulan September 2019 diharapkan dapat didistribusikan hasilnya agar daftar rincian *output* tersebut dapat diintegrasikan saat proses penelaahan RKA K/L APBN Tahun 2020 sehingga *tagging* tematik *stunting* dapat dikawal pemantauannya sejak awal tahun.

2. Pengintegrasian ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran (*database* tematik *stunting*)

Sistem perencanaan dan penganggaran telah menyediakan kemudahan dalam sistem KRISNA dan RKA K/L melalui *tagging* anggaran tematik *stunting* mulai tahun 2019. Namun demikian, hanya sebagian *output* yang tercantum dalam ringkasan *output* K/L TA 2019 yang mendukung penurunan *stunting* yang telah dilakukan penandaan tematik *stunting* dalam sistem KRISNA dan RKA K/L. Bahkan, perkembangan yang ada selama semester I tahun 2019 menunjukkan hanya terdapat penambahan *tagging*

untuk 1 *output* saja, sehingga total *output* yang telah ditagging sampai dengan Juli 2019 sebanyak 41 dari 97 *output*.

Hasil konfirmasi dengan K/L terkait belum dilakukannya *tagging* pada KRISNA dan RKA K/L (*update database* tematik *stunting*) menunjukkan bahwa sebagian K/L belum mengetahui informasi bahwa proses penandaan tematik *stunting* masih dimungkinkan untuk dilakukan dalam tahun berjalan melalui mekanisme revisi (perubahan referensi tematik di level *output*). Proses ini melibatkan beberapa pihak yaitu K/L, mitra K/L di DJA Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas, serta pengampu sistem KRISNA dan RKA K/L. Namun proses perubahan referensi ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Masih rendahnya *output* dalam dokumen ringkasan yang sudah ditandai serta masih adanya *output* di luar dokumen ringkasan yang ditandai sebagai tematik *stunting* mengindikasikan perlunya koordinasi yang lebih baik antara Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L. Proses *update tagging* tematik *stunting* ini dimungkinkan melalui proses revisi pada referensi *output*, sebagaimana terdapat dalam PMK Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Masih rendahnya kepatuhan K/L terhadap proses *tagging* dalam sistem tersebut perlu mendapat perhatian, mengingat proses *tagging* tersebut memberikan beberapa keuntungan antara lain:

- a. Tersedianya data pagu, termasuk perubahan yang dilakukan oleh K/L untuk melihat perkembangan komitmen K/L atas program tersebut,
- b. Tersedianya data realisasi anggaran secara *real time* untuk melihat kinerja anggaran dan *output* dari masing-masing K/L, dan
- c. Kemungkinan penyusunan *dashboard* program percepatan pencegahan *stunting*.

Untuk itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- Mengefektifkan forum koordinasi multilateral agar masing-masing K/L dapat mengintegrasikan proses *tagging* dalam sistem KRISNA dan RKA K/L (misalnya melalui proses revisi pada tahun 2019 atau memastikan hasil forum multilateral menjadi bahan dalam penelaahan pagu alokasi APBN Tahun 2020).
- Dalam forum koordinasi multilateral dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun berikutnya, hasil identifikasi *output* tersebut agar dapat disampaikan kepada K/L untuk kemudian dikawal proses *tagging*-nya lebih awal. Untuk penganggaran TA 2020, diharapkan hasil proses rekonsiliasi II/Forum Multilateral (bulan Agustus/ September) dapat didistribusikan kepada setiap pihak terkait sebelum proses penelaahan pagu alokasi belanja K/L tahun 2020.

3. Komitmen K/L terhadap program percepatan penurunan *stunting* dengan menjaga alokasi anggaran dan target *output*

Analisa tingkat output

Secara agregat, alokasi *output* yang mendukung *stunting* relatif terjaga dengan jumlah alokasi sebesar Rp95,2 triliun. Namun demikian, jika dicermati lebih rinci, terdapat 4 (empat) *output* yang pagu hariannya lebih rendah dari pagu APBN, yaitu:

- a. **1269.006 Cakupan Anak yang Memiliki Akta Kelahiran** (Kementerian Dalam Negeri) turun 46,5 persen dari sebesar Rp10,0 Milyar menjadi Rp5,4 Milyar.
- b. **5636.009 Rata-rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas** (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) turun 26,5 persen dari Rp106,5 Milyar menjadi Rp78,3 Milyar.
- c. **2038.501 Pemetaan Keluarga Sehat** (Kementerian Kesehatan) turun 2,9 persen dari Rp3,2 Milyar menjadi Rp3,1 Milyar.
- d. **2415.003 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM** (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) turun 25,5 persen dari Rp252,4 Milyar menjadi Rp188,0 Milyar.

Meskipun belum dilakukan penilaian apakah perubahan di tingkat *output* tersebut akan berdampak kepada pencapaian program, hal ini perlu mendapat perhatian K/L. Komitmen Upaya K/L dalam percepatan penurunan *stunting* perlu dijaga mulai dari konsistensi menjaga alokasi anggaran serta target *output*, agar konvergensi proram terjaga, termasuk fokus pada lokasi prioritas dan ketepatan target sasaran intervensinya.

Untuk itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- Perlu disampaikan tentang perlunya komitmen setiap pihak, baik dalam menjaga alokasi anggaran maupun koordinasi dan pencapaian target, agar konvergensi program dapat dijaga.
- Opsi penguatan regulasi revisi atas tematik *stunting* agar dapat dijaga besaran alokasi serta target pencapaian *output*-nya. Namun demikian, hal ini berpotensi akan mengurangi fleksibilitas K/L dalam pencapaian target-target lainnya yang juga prioritas, sejalan dengan perkembangan yang terjadi.
- Terhadap *output* yang mengalami perubahan alokasi tersebut, agar K/L dapat meneliti dampak perubahan tersebut kepada pencapaian targetnya, baik pada K/L berkenaan maupun kepada program percepatan penurunan *stunting* secara umum.

4. Kinerja realisasi anggaran dan pencapaian *output* Semester I 2019

Analisa tingkat output

Secara agregat, realisasi anggaran semester I tahun 2019 seluruh *output* yang mendukung *stunting* mencapai Rp67,6 triliun (71,6 persen dari pagu). Tingkat realisasi tersebut disumbangkan dengan tingginya realisasi pada beberapa *output* berikut:

- **5610 501 Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS** (Kementerian Kesehatan), dengan realisasi sebesar Rp26,5 triliun (99,3 persen dari pagu) sejalan dengan kebijakan percepatan penyaluran PBI sampai dengan akhir tahun.

- **1814 102 Lumbung Pangan Masyarakat** (Kementerian Pertanian), dengan realisasi sebesar Rp28,3 Milyar (89,2 persen dari pagu).
- **2016 006 Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif** (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dengan realisasi sebesar Rp15,5 Milyar (83,1 persen dari pagu).
- **2251 001 Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat** (Kementerian Sosial), dengan realisasi sebesar Rp27,7 triliun (80,7 persen dari pagu).

Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 74 dari 97 *output* tingkat realisasi anggarannya sampai dengan semester I kurang dari 50%.
- Hanya 8 K/L dari 18 K/L yang tingkat penyerapannya di atas 50 persen.
- Terdapat 5 K/L yang serapan anggarannya masih sangat rendah, di bawah 25 persen, yaitu BATAN (5,3 persen), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (16,3 persen), Kementerian Dalam Negeri (21,5 persen), Kementerian Agama (23,2 persen), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (24,4 persen).
- Pada Kementerian Kesehatan, terdapat 7 *output* intervensi spesifik yang realisasi anggarannya masih nihil, yaitu:
 - a. 2080.002 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus
 - b. 2080.006 Suplementasi Gizi Mikro
 - c. 2080.008 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Papua dan Papua Barat
 - d. 2080.009 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus Papua dan Papua Barat
 - e. 2080.010 Penguatan intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita Papua dan Papua Barat
 - f. 2060.511 Sarana dan Prasarana Penanggulangan TBC
 - g. 2060.512 Sarana dan Prasarana Penanggulangan HIV/AIDS

Jika ditinjau dari sisi intervensi, tingkat penyerapan intervensi spesifik baru sebesar Rp499,3 Milyar (11,6 persen), intervensi sensitif Rp66,5 triliun (75,1 persen), dan pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis sebesar Rp602,1 Milyar (37,2 persen).

Untuk intervensi spesifik, 6 dari 26 *output* belum memiliki capaian sampai dengan semester I tahun 2019:

- 5 *output* masih belum ada serapan anggarannya (**2080.006 Suplementasi Gizi Mikro, 2080.008 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Papua dan Papua Barat, 2080.009 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus Papua dan Papua Barat, 2080.010 Penguatan intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita Papua dan Papua Barat, dan 2060.512 Sarana dan Prasarana Penanggulangan HIV/AIDS**)

- 1 *output* (**2080.007 Pembinaan Dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat**) realisasi anggarannya sebesar Rp5,3 Miliar (26,5 persen dari pagunya).

Sedangkan capaian *output* lainnya sudah relatif baik dibandingkan dengan RPD-nya.

Untuk intervensi sensitif, dari 48 *output* yang tersebar di 11 K/L, capaian *output*nya secara umum masih *on track*. Seluruh *output* pada Kementerian Pertanian (3 *output*) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2 *output*) misalnya, tingkat capaian *output*nya pada semester I lebih tinggi dari realisasi anggarannya. Kemudian, untuk intervensi yang sifatnya pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis, dari sebanyak 33 *output* yang tersebar pada 11 K/L, capaian *output*nya relatif beragam.

Dengan demikian, untuk penguatan implementasi anggaran serta pencapaian *output* perlu dipertimbangkan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- Penguatan Forum Koordinasi untuk dapat mendorong K/L dalam peningkatan kualitas implementasi program.
- Mendorong percepatan/penguatan implementasi dari intervensi spesifik (Kementerian Kesehatan), terutama yang realisasi anggarannya masih rendah agar dampaknya terhadap program dapat optimal.
- Mendorong penguatan implementasi intervensi sensitif dan intervensi yang sifatnya pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis agar *on track* pencapaiannya sampai akhir tahun 2019.
- Proses pemantauan di K/L perlu diperkuat melalui evaluasi mandiri secara berkala (triwulanan) agar pengawalan program dapat optimal sepanjang tahun.

5. Pendalaman pada beberapa *output* terpilih

Pada bagian ini akan dibahas lebih mendalam khusus beberapa *output* yang dipandang memiliki dampak yang signifikan terhadap program konvergensi percepatan penurunan *stunting*, yang terdiri atas jenis intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada 8 K/L yaitu: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BKKBN, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Sosial. Pemilihan *output-output* ini didasarkan pertimbangan atas pentingnya kontribusi terhadap keberhasilan program percepatan penurunan *stunting*. *Output* terpilih ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Kementerian Kesehatan

a. *Output* terkait dengan pemberian makanan tambahan (PMT)

Terdapat 4 *output* terkait dengan pemberian makanan tambahan yaitu pada kegiatan 2080 Pembinaan Gizi Masyarakat, meliputi : **001 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)**, **002 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus**, **008 Penyediaan Makanan Tambahan**

bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Papua dan Papua Barat, serta 009 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus Papua dan Papua Barat.

Dari sisi kinerja anggaran dan *output* dapat diraikan sebagai berikut:

No	Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Keterangan
1	001 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Rp 7,3 M (58%) dari target sem I (Rp 12,6 Milyar)	56.247 (98%) dari target sem I sebanyak 57.500 ibu hamil KEK	Terdapat kendala teknis dalam pengadaan (aplikasi SPSE error sehingga jadwal mundur)
2	002 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus,	nihil	78.918 (97%) dari target semester 1 sebanyak 81.000 balita kurus	Capaian disumbang dari sumber daya yang bersumber <i>buffer stock</i> proses pengadaan tahun lalu
3	008 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Papua dan Papua Barat	nihil	nihil	
4	009 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus Papua dan Papua Barat	nihil	nihil	

Beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kendala proses pengadaan

- Hampir setiap tahun, pengadaan PMT selalu terlambat. Untuk tahun 2019 Pengadaan PMT baru dilakukan kontrak bulan Juli 2019.
 - Pada tahun 2019, proses pengadaan sudah diusulkan pra-DIPA, tetapi ditolak sehingga ketika diusulkan kembali sudah tidak bisa. Pada bulan Februari-Maret 2019 baru diproses kembali dengan berjenjang. Oleh karena itu, kontrak baru akan diproses pada bulan Agustus 2019, tetapi untuk *buffer stock* sudah dilakukan kontrak. Pengadaan melalui e-katalog sudah dikawal oleh Unit Layanan Pengadaan Kemkes.
2. Proses yang cukup panjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, puskesmas sampai posyandu, sehingga perlu didukung oleh anggaran lain agar dapat sampai ke sasaran. Proses implementasi dapat dibantu melalui penerbitan juknis penggunaan PMT sebagai panduan bagi puskesmas.
 3. Terdapat dukungan daerah untuk pengadaan PMT melalui DAK. Sebanyak 28 dari 34 provinsi yang mengusulkan DAK PMT, 24 provinsi sudah melakukan kontrak. Ada 3 provinsi yang gagal lelang yaitu Papua, Sulteng, dan Lampung. Provinsi DKI Jakarta masih proses penunjukan langsung. Untuk Provinsi Jatim dari alokasi Rp11 Milyar baru menyerap Rp3,5 Milyar. Sementara untuk pengadaan di Provinsi Aceh, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dialokasikan melalui PMT Pusat, sedangkan Provinsi Jawa Barat melalui APBD.
 4. Untuk tahun 2020, sebanyak 5 provinsi (DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Babel, Sulut) tidak mengusulkan DAK termasuk Provinsi Kepulauan Babel dan Sulut yang

terlambat mengusulkan. Untuk Provinsi DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim akan menggunakan APBD.

5. Proses sampai pada tingkat puskesmas di 34 provinsi untuk PMT balita kurus dan 33 provinsi untuk PMT bumil KEK.

Kendala di daerah adalah ketersediaan tempat penyimpanan PMT yang daya tahannya sampai mencapai 2 (dua) tahun sehingga pengadaannya didorong menggunakan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK).

6. Tantangan terbesar adalah bagaimana meminimalisir *opportunity loss* dalam pengadaan PMT.
7. Untuk kegiatan-kegiatan yang proses pengadaannya cukup panjang dicoba untuk diusulkan melalui pra-DIPA agar implementasi dan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan

b. *Output* 2080.003 Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita

Capaian sebesar 20 layanan (100%) sesuai dengan target semester I, dengan realisasi anggaran Rp 4,6 Milyar dari target Rp 4 Milyar pada semester I. Akan dilaksanakan persiapan proses pengiriman PMT dengan mengundang Pemda tidak hanya terkait dengan proses pengadaan sampai pada puskesmas tetapi juga terkait dengan pemanfaatan hibah Rp600 Milyar yang diberikan setiap tahun.

c. *Output* 2080.010 Penguatan intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita Papua dan Papua Barat

Capaian target volume dan realisasi anggaran masih nihil karena PMT sedang proses pendistribusian ke daerah.

d. *Output* 2080.504 Peningkatan Surveilans Gizi

- Sudah tercapai 6 layanan (100%) dari target semester I, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,5 Milyar (98,7%) dari target Rp 2,6 M pada semester I, diantaranya untuk permutakhiran sinkronisasi data surveilans pada aplikasi e-PPGBM dengan PIS-PK.
- Di daerah sedang dilakukan surveilans gizi pada tahap pencatatan dan pelaporan.
- Intervensi dilakukan di seluruh puskesmas kabupaten/kota. Belum dilakukan analisis pelaksanaannya apakah telah menysasar 160 kab/kota prioritas penanganan *stunting*.
- Target e-PPGBM tahun 2019 dapat mencapai 100%, saat ini secara nasional sudah 50% data yang masuk dengan data yang sudah terinput sekitar 11 juta dari 27 juta.
- Penghitungan menggunakan sasaran proyeksi sementara.

e. *Output* 5834.505 Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

- Capaian sebanyak 54.622 desa/kelurahan dari target 45.000 desa, dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,3 Milyar (16% dari target semester I Rp46,6 Milyar).
- Definisi target dikatakan tercapai adalah adanya pemician, natural leader, serta rencana kerja masyarakat. Target pada tahun 2020-2024 sudah mencapai desa *open defecation free/ODF* (pilar 1).

- a. Pelaksanaan pada tahun 2019 menyiapkan desa untuk melaksanakan 5 pilar STBM. Pelaksanaan sudah hampir 100%.
 - b. Pendekatan sudah dilakukan sejak tahun 2008 dan dukungan pendanaan lain dapat diperoleh dari dana desa serta pendanaan lainnya.
 - c. Pada tahun 2021, direncanakan 100% desa sudah melakukan STBM. Saat ini, sebanyak 25,96% desa ODF (20.973 desa dari 80.875 desa) telah melakukan STBM. Sementara target 2020 mencapai 40%.
 - Pada tahun 2019 terdapat dana peningkatan kualitas di 540 desa dengan kualitas jamban layak (komitmen menuju percepatan ODF). Pada tahun 2021, akan dituangkan melalui dana BOK.
 - Tantangan yang dihadapi:
 - a. Sinkronisasi lokasi masih terus dilakukan khususnya untuk lokasi Pamsimas. Desa yang belum melaksanakan STBM dilakukan pemecuan, kemudian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didukung oleh sarana dan prasarana yang diperlukan.
 - b. Perlunya pemilahan lokasi dari 54.622 desa dari target 45.000 desa, antara pendanaan dana Pamsimas dengan dana yang menggunakan BOK (1 desa Rp 7,5 juta).
 - c. Perlunya menentukan lokasi irisan STBM dengan lokasi *stunting* dan Pamsimas
 - Pamsimas mencakup 27.539 desa STBM.
 - Dari 54.622 STBM, sebanyak 47.539 desa diintervensi Kemenkes, sisanya dilakukan melalui pendanaan dari CSR, dana desa, dan dana lainnya (asumsi 1 desa 1 puskesmas).
- f. *Output* 5833 Pembinaan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Penggerakkan Masyarakat di Posyandu
- Capaian sebanyak 35 kab/kota dari target 160 kab/kota (22%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5,9 Milyar (37% dari target Rp 16 Milyar pada semester I).
 - a. Dana dekonsentrasi di 34 provinsi untuk pertemuan Pokjanal Posyandu di tingkat provinsi.
 - b. Orientasi kader posyandu di 160 kabupaten/kota (dana pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi).
 - c. Pendidikan gizi khususnya edukasi gizi di 16 kabupaten/kota di 160 desa dengan sasaran 60 ibu hamil/desa bekerjasama dengan Kemendagri dan PKK.
 - d. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk posyandu bekerjasama dengan Kemendesa PDTT.
 - e. Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan BPMD di tingkat daerah.
 - Saat ini sebanyak 60,2% (181.854) posyandu terkategori sebagai Posyandu aktif. Ke depan, perlu pengukuran pada aspek efektivitas keberhasilan posyandu.
 - Terdapat kendala pada implementasi kegiatan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan capaian kampanye hanya sebesar 2% pada semester I karena kendala sumber daya manusia (SDM) sehingga terjadi penumpukan anggaran selama 4 bulan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a. Output 5636.009 Rata-rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas

- Terdiri atas dua subkomponen, yaitu 053 A. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Pendamping Muda Penanganan *Stunting* dan 053 D. Penguatan Narasumber Guru Pendamping Muda GTK PAUD Tingkat Nasional (*stunting*).
- Capaian *output* sebesar 2.220 orang (73,49% dari target) dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,8 Milyar (dari pagu sebesar Rp7,8 Milyar). Penyelenggaraan Pelatihan Calon Pelatih (TOT) pada tahun 2019 di 100 kabupaten/kota prioritas dengan peserta masing-masing sekitar 20 orang (total 2000 orang) akan selesai dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.
- Kegiatan bertujuan untuk mencetak tenaga instruktur yang akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) di tingkat kabupaten/kota dimana pesertanya adalah pendidik di tingkat desa yang akan melakukan kegiatan stimulasi.
- Secara informal, sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar PCP ditindaklanjuti dengan kegiatan diklat di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, sudah dikoordinasikan dengan Kemendes PDPT untuk mendukung penggunaan dana desa untuk membiayai pendidik PAUD melaksanakan kelas pengasuhan.
- Kendala/tantangan:
 - a. Anggaran baru dialokasikan untuk 100 kabupaten/kota, sehingga belum dapat mengintervensi seluruh 160 kab/kota prioritas. Cakupan 60 kabupaten/kota lainnya diusulkan untuk diatasi di tahun 2020.
 - b. Perlunya kontribusi dari Dinas Pendidikan untuk berkontribusi mencakup kegiatan sisa 60 kabupaten/kota prioritas.
 - c. Perlu upaya untuk mendorong penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan di tingkat desa (sinkronisasi antara Permendagri dengan Permendes)

b. Output 006 Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif

- Terdiri atas dua komponen:
 - a. Komponen 054 pemberian dana pada lembaga untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia 0-3 tahun di posyandu, puskesmas, dan BKB. Capaian sebesar 146 lembaga dari target 200 pada semester I (83%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,2 Milyar dari target Rp3 Milyar untuk semester I (73%).
 - b. Komponen 055 pemberian dana untuk pemenuhan makanan tambahan bergizi seimbang. Capaian sebesar 854 lembaga dari target 1.000 pada semester 1 (85%), dengan realisasi anggaran Rp12,8 Milyar dari target Rp15 Milyar (85%). Diberikan melalui DIPA dan DAK non-fisik/BOP PAUD.
- Dasar pemilihan lokasi adalah lokasi yang memiliki prevalensi *stunting* tinggi dan daerah terpencil. Lokasi intervensi dilakukan pada 48 kabupaten/kota untuk komponen 054 dan 100 kabupaten/kota untuk komponen 055. Untuk lokasi lainnya diusulkan menggunakan BOP PAUD.

- Penyediaan layanan PAUD Holistik Integratif baru mulai dilaksanakan pada tahun 2020-2024. Namun, di beberapa daerah sudah mulai diinisiasi untuk didanai oleh APBD Kabupaten, contohnya di Magelang sudah ada koordinasi di lapangan terkait dengan pelaksanaan PAUD, BKB, dan Posyandu. Sesuai indikator berdasarkan RAN PAUD HI, peserta didik mendapatkan layanan komprehensif mulai dari kesehatan, gizi dan pengasuhan.
- Kendala/tantangan:
 - a. Pada tahun 2020, intervensi ini bukan menjadi tupoksi K/L sehingga bantuan hanya berupa DAK non-fisik/BOP PAUD. Perlunya pengecekan sumber pendanaan serta kejelasan pendanaan untuk tahun 2020.
 - b. Perlunya penjelasan terkait dengan pemanfaatan BOP PAUD. Kegiatan pembelajaran dan bermain 50%, penyediaan alat permainan edukatif dan penyediaan alat pengajar bagi pendidik, penyediaan PMT dan alat pendukung, penyediaan sarpras (tahun 2019), alokasi sebesar Rp4,4 Trilyun untuk 508 kab/kota dan 1 provinsi (DKI Jakarta).
 - c. Perlunya penumbuhan kebiasaan makan bersama sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Output 2414. 004 Sistem Pengelolaan Air Limbah

- Capaian *output* masih nihil dari target 166.251 KK. Hal ini diakibatkan revisi DIPA pada Mei 2019 karena terdapat perubahan organisasi di provinsi dari satker menjadi balai sehingga pendamping di lapangan terlambat untuk mobilisasi dan sosialisasi.
- Realisasi anggaran mencapai Rp112 Milyar dari target Rp95,5 Milyar untuk semester I tahun 2019.
- Target lokasi pada 2019 adalah di 600 lokasi di 60 kabupaten/kota, namun ada penambahan lokasi menjadi 608 lokasi di 61 kabupaten/kota. Sebanyak 253 lokasi sudah melakukan pencairan dana tahap I dan 39 lokasi sudah melakukan proses konstruksi. Semua lokasi melakukan konstruksi direncanakan bulan Oktober 2019 (maksimal November 2019 proses konstruksi telah selesai 100% maka dapat dihitung *outputnya*)
- Strategi percepatan pelaksanaan program dibantu dengan TFL (Tim Fasilitasi Lapangan) di tingkat provinsi, fasilitator di kabupaten dan *consultant advisory* di setiap kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan dan monitoring untuk proses konstruksi.
- Penentuan desa berdasarkan lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran penerima berdasarkan pada data jumlah ibu hamil, jumlah balita, angka *stunting* dan disabilitas di desa tersebut.
- Selain dana APBN, terdapat 3 (tiga) lokasi yang beririsan yang dibiayai oleh Sanimas IsDB (dana pinjaman).
- Capaian *output* SPAL berdasarkan *e-monitoring* sudah ada *progress* fisik sebesar 19,7%. Namun, belum bisa dikonversi menjadi capaian *output* karena baru *progress* fisik di lapangan yang belum sempurna dan belum bisa dimanfaatkan.

- b. *Output* terkait dengan Kegiatan 2415 Pembinaan dan Pengembangan SPAM terdiri atas 5 *output* yaitu 005 SPAM Terfasilitasi, 007 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan
- *Output* 005 SPAM Terfasilitasi
 - a. Terdapat penambahan target *output* dari 105 menjadi 128 kawasan pada pagu harian. Realisasi anggaran Rp6 Milyar, namun belum tersedia data target serapan.
 - b. Capaian tahun 2008-2017 sebanyak 399 desa, 2018-2019 sebanyak 504 desa (alokasi anggaran sebesar Rp63 Milyar, realisasi sudah 100% pada tahun 2018, sementara tahun 2019 baru pencairan termin 1). Masuk dalam DAK air minum 40 desa.
 - c. Lokakarya tingkat provinsi sudah dilaksanakan untuk Provinsi NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sosialisasi Prosedur Operasional Baku (POB) pencegahan *stunting* melalui Pamsimas sudah bekerjasama dengan Kemenkes untuk program pemucuan.
 - d. Di lokasi Pamsimas sudah ada *technical assistant* STBM per kabupaten/kota.
 - e. Data intervensi pada lokasi 160 kab/kota prioritas belum tersedia.
 - *Output* 007 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan
 - a. Terdapat penurunan target *output* dari 965 menjadi 859 liter/detik pagu harian.
 - b. Realisasi anggaran Rp 35 Milyar, namun belum tersedia data target capaian.
 - c. Mengingat target berupa liter/detik bukan pada tingkat kabupaten/kota perlu waktu untuk konversinya sehingga data capaian *output* belum bisa diperoleh.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

- a. *Output* 3317.021 Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- Realisasi anggaran Rp1,9 Milyar atau 68,4%, namun tidak ada target serapan.
 - Lokasi kegiatan di 160 kabupaten/kota prioritas.
 - Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan petunjuk teknis, modul, prototipe modul dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan pelaksanaan *workshop* 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan oleh pusat.
- b. *Output* 3331.081 Keluarga yang mempunyai Baduta Terpapar 1000 HPK
- Capaian sebesar 743.183 dari total target 2.831.614 keluarga (26%), dengan realisasi anggaran Rp7,6 Milyar (25% dari target Rp30,6 Milyar).
 - Lokasi intervensi di 160 kabupaten/kota prioritas.
 - Kegiatan dilakukan di 34 perwakilan BKKBN provinsi dengan didukung APBD, mencakup: penggandaan materi dan media KIE sejumlah target keluarga, peningkatan kapasitas program prioritas nasional (peningkatan kapasitas PLKB, sosialisasi keluarga baduta 1000 HPK di 160 kabupaten/kota), dan pemantauan *progress* kegiatan melalui rapat pengendalian lapangan dan *video teleconference*.

- Pelaksanaan kegiatan diselaraskan dengan DAK fisik (BKB kit *stunting*) dengan anggaran yang menyatu di Dinas Kesehatan melalui BOKB .
- c. *Output* 3331.085 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu
- Capaian sebesar 10.587 dari target 29.327 kelompok pada akhir tahun 2019 (36%). Capaian per agustus sebesar 55.97% (16.415 lokus).
 - Realisasi anggaran Rp19,3 Miliar dari target Rp 59,1 target serapan (33%).
 - Strategi percepatan melalui pelaporan sistem *smart* pro-PN, dan *whatsapp*. Selain itu, juga dilakukan *workshop* untuk kader BKR untuk melakukan edukasi terkait dengan gizi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Penyusunan modul rekan sebaya tetap mengacu pada modul yang ada di Kemenkes.
 - Kendala/tantangan:
 - a. Terdapat perwakilan BKKBN Provinsi yang belum terealisasi kegiatannya antara lain Provinsi DIY, Kalimantan Tengah, dan NTT.
 - b. Masih minimnya dukungan anggaran untuk penggandaan modul dan media edukasi di tingkat kabupaten/kota (OPD KB).
 - c. Perlu adanya koordinasi antara kegiatan PAUD di Kemendikbud dengan BKKBN agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pendanaan.

Kementerian Pertanian

a. *Output* 1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat

- Capaian *output* sudah 425 unit dari target 443 unit (96%) pada akhir tahun 2019, dengan realisasi Rp 26,97 Miliar dari target serapan semester I sebesar Rp 26,58 Miliar (101%).
- Lumbung pangan masyarakat penetapannya tidak dipersyaratkan di daerah *stunting*. Syarat utama adalah ada fisik lumbung yang telah dibangun di tahun 2016 atau tahun sebelumnya dengan pendanaan dari DAK bidang pertanian. Intervensi dilakukan pada 138 kabupaten/kota dan belum terdapat informasi cakupan di lokasi prioritas.
- Kegiatan bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan dan diharapkan kelompok dapat memperkuat kelembagaan yang sudah ada, *revolving* cadangan pangan, cadangan pangan selalu segar, dan modal terus ditingkatkan. Selain itu, diharapkan antisipasi cadangan pangan di daerah dapat dilakukan terkait perubahan harga, dan kerawanan pangan.
- Cadangan yang dialokasikan saat ini melalui APBN dan DAK ditujukan untuk fisik, perputaran, dan isian lumbung. Untuk fisik berasal dari DAK sedangkan isian lumbung dari dana dekonsentrasi.
- Pemerintah melalui dana dekonsentrasi membantu pengisian pembelian dan perputaran gabah untuk memperkuat ekonomi kelompok sekaligus menyediakan ketersediaan pangan bagi kelompok. Apabila terjadi kerawanan pangan maka bisa diakses ke lumbung.

b. *Output* 1815.106 Kawasan Mandiri Pangan

- Nomenklatur output diubah menjadi Korporasi Usaha Tani.
- Capaian *output* sudah 100% yaitu 13 kawasan pada tahun 2019, dengan realisasi Rp4 Milyar (89% dari target semester I sebesar Rp 4,5 M)
- Capaian di 13 kawasan (100%) meliputi 12 kabupaten/kota prioritas *stunting* (Jambi (Tanjung Jabung Barat), Bengkulu Utara, Lampung Selatan, Pandeglang, Garut, Wonosobo, Kulon Progo, Enrekang, Gianyar, Lombok Utara, Lombok Timur, TTU) dan 1 kabupaten non prioritas *stunting* (Samosir).
- Hal ini sejalan dengan kriteria penetapan lokasi yaitu lokasi dengan prevalensi balita *stunting* dan rumah tangga miskin tinggi. Namun demikian, belum tersedia data persentase target 1000 HPK dalam target sasaran tersebut.
- Kegiatannya dikorporasikan dari budidaya sampai pengolahan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Koordinasi dilakukan melalui provinsi lalu ke kabupaten/kota dan daerah.

c. *Output* 1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan

- Capaian *output* pada semester 1 sebesar 3.005 dari target 4.600 kelompok pada tahun 2019 (65%), dengan realisasi anggaran semester I sebesar Rp117,4 Milyar dari target semester I sebesar Rp160,3 Milyar (73%).
- Kegiatan dilakukan di 160 kabupaten/kota prioritas penanganan *stunting* dan 340 kab/kota lainnya dan sudah menjangkau 1.600 desa prioritas. Dari 4.600 kelompok sasaran, sebanyak 1.050 berada di lokasi *stunting*. Terdapat 737 dari 1.050 kelompok (70%) yang telah menyampaikan laporan pencairan dana. Penentuan lokasi dipetakan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA.
- Kriteria kelompok sasaran:
 - a. Kelompok wanita tani
 - b. Lokasi prioritas
 - c. Terdaftar di Simluktan (sistem penyuluhan pertanian)
- Kegiatan KRPL terdiri atas 3 (tiga) komponen: (1) rumah bibit (kelompok menghasilkan minimal 10.000 bibit), (2) demplot, dan (3) pekarangan anggota (75 *polybag*/25 m²). Keberlanjutan program ditopang dengan adanya kebun bibit dan demplot yang bisa diambil untuk pekarangan. Komoditas yang dikembangkan antara lain sayuran, buah, dan ternak unggas untuk penyediaan protein hewani.
- Beberapa daerah sudah berkontribusi untuk melakukan replikasi kegiatan bersumber dari APBD. Pendamping KRPL dibiayai dari pusat, sementara pendamping untuk lokasi replikasi berasal dari APBD.
- KRPL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga berupa penghematan pengeluaran, dan meningkatkan akses protein nabati dan hewani. Namun, saat ini belum dapat dihitung sasaran 1.000 HPK yang mendapatkan manfaat dari kegiatan KRPL.
- Kendala/tantangan:
 - a. Kendala di Provinsi Papua, ada 41 KRPL di wilayah *stunting* diusulkan untuk direalokasi karena terkendala konflik dan infrastruktur.
 - b. Masalah ketersediaan air (infrastruktur pengairan) merupakan kendala terbesar. Koordinasi dengan K/L terkait terus dilakukan untuk penyediaan air KRPL.

Kementerian Dalam Negeri

Output 1252.011 Advokasi Penerapan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dan Output 1252.015 Peningkatan Kinerja Kab/Kota dalam Implementasi Konvergensi Program Penanganan Penurunan Stunting

- Realisasi anggaran *output* 011 advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan *stunting* sebesar Rp319 juta dari target serapan semester I sebesar Rp1 Milyar (32%). Realisasi anggaran *output* peningkatan kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan penurunan *stunting* (INEY) sebesar Rp12 juta dari target serapan semester I sebesar Rp2,3 Milyar (1%).
- Intervensi dilaksanakan di 34 provinsi mencakup target 160 kab/kota prioritas penanganan *stunting*.
- Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan:
 - a. Rapat koordinasi lintas KL dan daerah, dengan *output* adalah petunjuk teknis yang terbit di bulan Juni. Penilaian kinerja dilakukan pada tanggal 31 Agustus dan dipublikasikan datanya melalui *web monitoring*. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di daerah sudah dilakukan dari bulan Januari sampai saat ini, namun belum diidentifikasi berapa provinsi yang sudah tersedia datanya. Selain itu, kegiatan juga termasuk pelatihan aksi konvergensi dan pendampingan. Kemendagri sudah menetapkan Surat Edaran kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota pada bulan Juni 2019 untuk penilaian kinerja.
 - b. Peningkatan kinerja kabupaten/kota (INEY), kegiatan terdiri atas: (1) pengadaan jasa konsultan bantuan teknis untuk penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam konvergensi intervensi nutrisi prioritas (proses pengadaan), (2) *workshop* membangun komitmen daerah dan kelembangan untuk penanganan *stunting* yang sudah dilaksanakan di 2 (dua) regional (Yogyakarta dan Medan) mengundang 160 kabupaten/kota dan provinsi yang sudah dilaksanakan pada semester I, (3) *workshop* penganggaran berbasis data capaian akan dilaksanakan pada semester II, dan (4) *workshop* pengukuran kinerja kabupaten/kota oleh provinsi. Monitoring dan evaluasi dilakukan di tingkat provinsi karena dana tidak mencapai kabupaten/kota.
 - c. Penguatan melalui *workshop* komitmen terdapat kendala ketidakcukupan anggaran untuk pelatihan aksi 5-8 di semua provinsi. Selain itu, pendampingan juga belum dilakukan untuk Provinsi Maluku, Papua Barat, Jawa Tengah, dan Sultra.

Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Output 5483.008 Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam peningkatan akses pelayanan sosial dasar

- Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain sosialisasi konvergensi pencegahan *stunting* di 6 kabupaten yang termasuk dalam lokasi penanganan *stunting*. Capaian relatif rendah karena *timeline* program memang direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober, yakni penguatan kader serta fasilitasi penguatan KPMD. Tahapan fasilitasi adalah: (1) penentuan lokasi, (2) pembuatan Surat Keputusan, dan (3) penguatan.

- Realisasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar dari target serapan semester I sebesar Rp 1,2 miliar (100%). Saat ini dilakukan fasilitasi penguatan KPMD di 159 kab prioritas. Sudah dilakukan pelatihan sebanyak 37% dari 33 ribu kader pembangunan daerah. Diharapkan KPM yang sudah dilatih dapat menggali permasalahan di tingkat desa dan membantu menganalisis akar masalah.
- Strategi memperluas cakupan pendampingan KPMD antara lain:
 - a. Penyusunan Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia dan mengirimkan ke daerah
 - b. Militansi Kader Desa, masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengupayakan pemenuhan pelayanan publik (pelayanan sosial dasar), khususnya dalam upaya pencegahan *stunting*.
 - c. Peningkatan kapasitas secara berjenjang bagi Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan/atau Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Pemerintahan Desa ditujukan dalam rangka memperkuat Fasilitasi.
 - d. Advokasi perencanaan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan sosial dasar di Desa, khususnya pencegahan *stunting* melalui pendekatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas belanja APBDesa.
- Lokasi intervensi mencakup di 159 kab/kota prioritas. Pada bulan Februari, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) mewajibkan di setiap desa harus membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM). KPM diharapkan menjadi motor program pencegahan *stunting* di desa untuk membawa para pelaku dan pegiat desa mendorong kegiatan *stunting* masuk ke musyawarah desa sampai dengan RKPDes dan APBDes. Pada tahun 2020, jika desa tidak melakukan pelaporan *score card* perkembangan cakupan layanan terkait penurunan *stunting* di tingkat desa maka dana desa tidak dapat cair.
- Dana APBN tidak dapat mencakup semua kegiatan, oleh karena itu ditetapkan Permendes mengenai prioritas penggunaan dana desa agar dapat membiayai kegiatan-kegiatan dapat mendukung program *stunting*.
- Selain itu, sudah dilakukan koordinasi dengan SPKD daerah untuk membuat Pergub terkait penggunaan dana desa untuk alokasi *stunting*. Dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan pelayanan sosial dasar, yang tercantum dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 1 dan 2 dimana mengatur penggunaan dana desa untuk *stunting* namun tidak detail persentase alokasinya. Selain itu, sosialisasi berjenjang akan dilakukan terkait program *stunting* dan simulasi monitoring dan evaluasi perencanaan teknis.

Kementerian Sosial

a. Output 2251.001 Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat

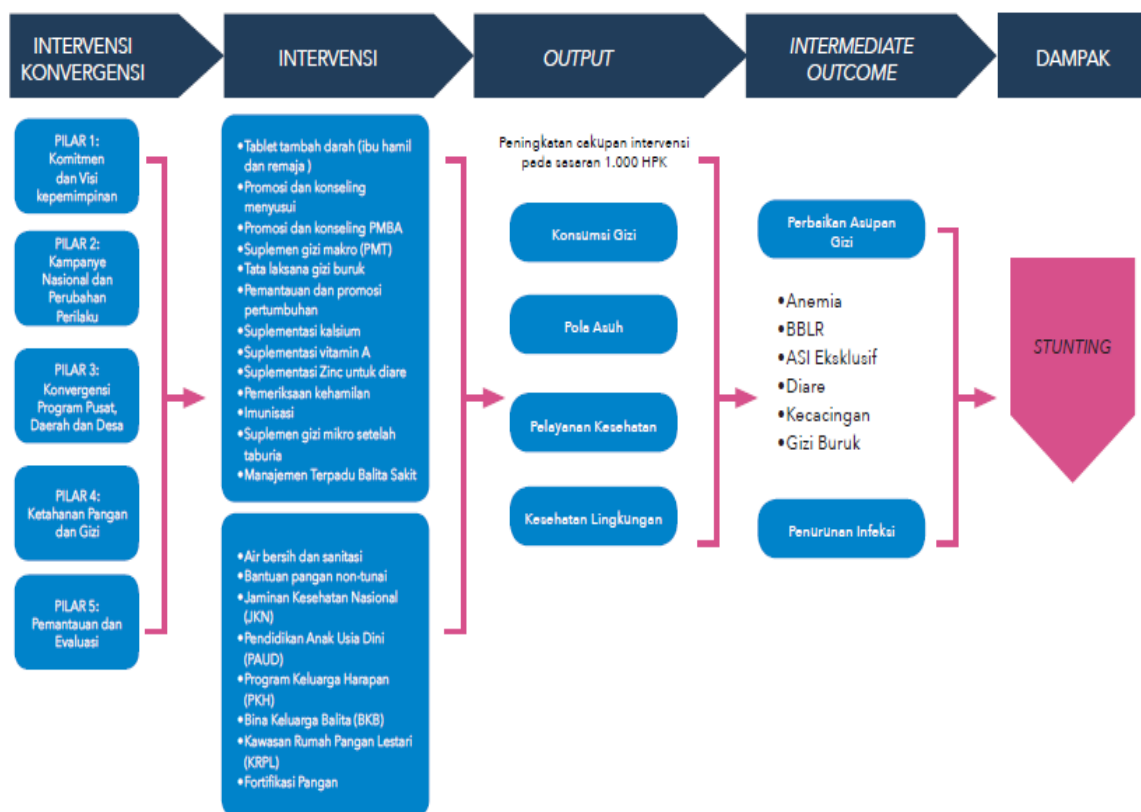
- Realisasi anggaran semester I sebesar Rp 27,7 Milyar (80,7 persen). Capaian sebanyak 511 kabupaten/kota sudah termasuk 160 kabupaten/kota fokus penanganan *stunting*. Capaian sasaran 1.000 HPK sebanyak 3.159.181 anak usia dini dan 135.887 ibu hamil. Mulai semester II tahun 2019, pengumpulan data akan menggunakan sistem baru.

- Data perkembangan akses ke layanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita serta akses PAUD masih dalam tahap validasi data. Sementara data menunjukkan bahwa 80% ibu hamil penerima PKH memeriksakan diri ke layanan kesehatan di 186 kab/kota. Namun, data yang tercatat tersebut masih menggunakan sistem yang lama dan sedang peralihan ke sistem baru.
 - Terdapat rencana memperluas target dengan total KPM sebanyak 9.8 juta, dengan tetap menyisir seluruh kabupaten/kota di Indonesia selain Tambrau, Puncak Jaya, dan Nduga.
- b. *Output* terkait Kegiatan Bantuan Sosial Pangan terdiri atas 3 *output* yaitu 5873.003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan, 5874.002 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan, dan 5875.003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan
- Secara total, penerima BPNT sudah menyasar 312 kabupaten/kota dengan total KPM sebanyak 12,5 juta. Namun, khusus untuk wilayah penurunan *stunting*, penerima BPNT yakni 81 dari 160 kab/kota dengan jumlah KPM sebanyak 6,3 juta dari 7,8 juta KPM, dengan rincian:
 - Wilayah 1 mencapai 35 kabupaten/kota dari 42 kab/kota dengan KPM sebanyak 2,6 juta (96%) dari 2,7 juta KPM.
 - Wilayah 2 mencapai 37 kab/kota dari 59 kab/kota dengan jumlah KPM 2,3 juta (84%) dari 2,8 juta (sasaran sampai desember).
 - Wilayah 3 mencapai 19 kab/kota dari 59 kab/kota dengan jumlah KPM mencapai 1,5 juta (68%) dari 2,2 juta.
 - Secara total hingga bulan Juli sudah mencapai 93 kab/kota lokasi prioritas, dan mulai bulan September akan diperluas hingga 160 kota/kabupaten.
 - Komoditas untuk tahun 2019 adalah beras dan telur, dan, sementara untuk tahun 2020 direncanakan akan ditambah komoditasnya, antara lain jagung, ayam, ikan, dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI). Selain itu, besaran manfaat BPNT per KPM akan ditambah dari Rp 100.000 menjadi Rp 150.000 per *top up*.
 - Setiap desa ada 1 e-warung yang mensuplai kebutuhan. Ada kesepakatan dengan Bulog untuk suplai komoditas. Kemensos bersama Direktorat Sistem Penganggaran Kemenkeu sedang mendesain sistem aplikasi penetapan yang akan terhubung ke OM-SPAN.
 - Sistem di Kemensos SIKSNG sebagai data dasar dan diolah oleh BPNT *link* untuk memastikan data yang di *recall* yang dapat diserahkan ke Bank.
 - Kendala/tantangan:
 - a. Masih ada 1% KPM yang membelanjakan bantuan di luar komoditas
 - b. Belum ada data untuk sasaran ibu hamil, karena saat ini masih dalam proses penarikan data.
 - c. Kesulitan dalam proses perluasan ke wilayah terpencil yang jumlahnya besar.
 - d. Pendamping kurang maksimal dan jumlahnya terbatas.
 - e. Koordinasi dan edukasi warung dalam pelaksanaan e-warung.
 - f. Diperlukan komitmen dari semua pihak seperti komitmen Kemenkominfo untuk pembukaan jaringan untuk bank khususnya di wilayah Papua.

6. Kinerja realisasi Semester I 2019 dihubungkan dengan logical framework

Sesuai dengan kerangka hasil percepatan penurunan *stunting* (gambar 1), maka intervensi-intervensi yang telah dilakukan dalam semester I tersebut akan berdampak kepada meningkatnya konsumsi gizi, perbaikan pola asuh, meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatnya kesehatan lingkungan yang pada akhirnya akan memperbaiki asupan gizi terutama pada 1000 HPK dan kemudian akan menurunkan prevalensi *stunting*.

Gambar 1 Kerangka hasil percepatan penurunan *stunting*



Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting), 2018

Adapun sampai dengan semester I, telah dilakukan berbagai intervensi oleh K/L terkait, dengan penjelasan berikut:

- Sebanyak 56.247 ibu hamil KEK mendapatkan PMT (98% dari target semester I).
- Sebanyak 78.918 balita kurus mendapatkan PMT (97% dari target semester I).
- Sebanyak 181.854 posyandu (60,2%) merupakan Posyandu aktif yang kegiatannya antara lain orientasi kader posyandu serta edukasi gizi (kerja sama dengan Kemendagri dan PKK).
- Sebanyak 146 lembaga PAUD (dari target 200 lembaga) menerima bantuan untuk pelaksanaan pendidikan PAUD.
- Sebanyak 854 lembaga PAUD (dari target 1.000 lembaga) menerima bantuan untuk pemenuhan makanan tambahan bergizi seimbang.

- f. Sebanyak 743.183 keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun (baduta) mendapatkan promosi pengasuhan 1.000 HPK.
- g. Sebanyak 10.587 remaja putri (dari target 29.327 remaja putri) menerima edukasi kesehatan reproduksi dan gizi.
- h. Sebanyak 12,5 juta KPM telah menerima BPNT dengan 6,3 juta KPM pada lokasi prioritas *stunting*.
- i. Sebanyak 80% ibu hamil penerima PKH memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan.

Kemudian, dari sisi lokasi intervensinya, terlihat bahwa sebagian besar *output* tersebut juga menyasar kepada lokasi kabupaten/kota prioritas penurunan *stunting*. Lebih lanjut, terlihat bahwa dalam implementasinya koordinasi yang dilakukan sudah terlihat, baik antar K/L maupun antara K/L dengan pemda, serta dengan pihak terkait lainnya.

Dengan berbagai capaian semester I di atas, serta indikasi konvergensi yang ada melalui penguatan sasaran lokasi, target sasaran 1000 HPK (ibu hamil dan balita) serta sasaran prioritas lainnya (antara lain remaja putri), serta koordinasi lintas sektor yang dilakukan, diharapkan akan mendorong perbaikan konsumsi gizi dan pola asuh, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak pada percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia, khususnya pada lokasi kabupaten/kota prioritas.

V. REKOMENDASI

Memperhatikan pembahasan di atas, maka Pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan beberapa perbaikan program percepatan penurunan *stunting* dengan penjelasan berikut:

1. Semester II Tahun 2019 (jangka pendek)
 - a. Penguatan forum koordinasi melalui penguatan dokumentasi dan pendistribusian kesepakatan dan tindak lanjut dari forum koordinasi tersebut bagi setiap pemangku kepentingan.
 - Forum koordinasi antar K/L juga perlu diperkuat untuk meningkatkan sinkronisasi antarkegiatan dan juga lokasi kegiatan dengan tujuan yang sama seperti PAUD, BKB, dan Posyandu STBM dan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.
 - b. Penguatan proses pegintegrasian *output-output* dalam ringkasan penandaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran (KRISNA dan RKA K/L), melalui mekanisme penelaahan pagu alokasi APBN TA 2020.
 - c. Penguatan implementasi pada semester II terutama pada *output* yang kinerjanya masih dibawah dengan rencana semester I, seperti pemberian makanan tambahan yang realisasi anggarannya masih rendah.
2. Jangka menengah dan panjang (mulai tahun 2020)
 - a. Penyusunan standar format data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan monitoring.
 - b. Penyusunan standar mekanisme pemantauan dan evaluasi.

- c. Penguatan evaluasi internal K/L (*self-assessment*) terutama untuk mengidentifikasi lokasi aktual dari kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran kegiatan (terutama sasaran prioritas 1.000 HPK).
- d. Melakukan identifikasi agar *output-output* terkait *stunting* tersebut dapat dijaga kesinambungannya serta dukungan pendanaannya.
- e. Alternatif penyusunan *dashboard* dalam rangka penguatan pemantauan dan evaluasi.

Lampiran

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

SEKRETARIAT NEGARA

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	0	61.248	61.248				30.624	8.363	27%			
	007.06 Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	0	61.248	61.248				30.624	8.363	27%			
	1196 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden	-	61.248	61.248				30.624	8.363	27%			
	007 Hasil Analisis Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil	0	61.248	61.248	1	1	-	30.624	8.363	27%	2	1	50%
	01.051 Melaksanakan penguatan kapasitas koordinasi, monitoring dan penyelesaian		27.031					13.516	7.200	53%			
	01.052 Melaksanakan Penguatan Kapasitas Lembaga Pelaksana		31.790					15.895	1.163	7%			
	01.053 Dukungan Manajemen Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)		2.426					1.213	0	0%			
	TOTAL	0	61.248	#DIV/0!				30.624	8.363	27%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	007.06 Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada								
	1196 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden								
	007 Hasil Analisis Pelaksanaan Kebijakan	1		1		Ya	Ya	Ya	Ya
	01.051 Melaksanakan penguatan kapasitas								
	01.052 Melaksanakan Penguatan Kapasitas								
	01.053 Dukungan Manajemen Percepatan								

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Untuk proses perencanaan dan penganggaran sudah mulai pada tahun 2018 dengan penetapan AWPB dan usulan Revisi DIPA tambahan dana Hibah pada DIPA Setwapres yang memerlukan waktu dan selesai pada bulan April 2019. tahapan proses perencanaan dan penganggaran sebagai berikut: 1. penyusunan dan penetapan AWPB, 2. usulan tambahan pagu pada revisi DIPA,	Revisi tambahan dana hibah pada DIPA tahun berjalan yang memerlukan waktu	untuk tahun-tahun selanjutnya Alokasi dana Hibah sudah dimasukkan dan dialokasikan dalam DIPA Tahun berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Dengan terbitnya DIPA pada bulan April 2019, sehingga terdapat keterlambatan selama 4 bulan dalam pelaksanaan dan serapan anggaran hibah yang mendukung percepatan pencegahan stunting. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada semester-1 T.A 2019 sebagai berikut: 1. proses pengadaan dan seleksi tenaga ahli, 2. sosialisasi verifikasi DLI BPKP, 3. Persiapan Rapat Kerja Nasional	Pengalokasian dalam DIPA sehingga berpengaruh dalam proses pengadaan/seleksi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan	proses alokasi dalam DIPA dan Proses pengadaan dapat dilaksanakan secara berbarengan
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)			
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	sesuai dengan tugas Setwapres sebagai koordinator Percepatan pencegahan anak kerdil (stunting), maka lokasi kegiatan terdapat di Jakarta (pusat), dengan melibatkan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang dipusat. Hasil kinerja koordinasi dengan K/L dipusat cukup baik. Hal tersebut dengan capaian untuk pencapaian DLI dan pencairan dana loan PforR sebesar USD.32,4 juta atau 87% dari total target tahun 2019 sebesar USD 37,2 Juta dengan capaian 7 DLI dari 9 DLI yang dipersyaratkan.	koordinasi dengan kementerian/lembaga yang belum optimal	perlu adanya Pendampingan terhadap K/L yang lebih intensif dalam mencapai DLI dan pelaksanaan stranas percepatan pencegahan stunting secara nasional
E	Informasi Lainnya yang Relevan	Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan terhadap K/L untuk konvergensi percepatan pencegahan stunting		perlu adanya koordinasi dan rapat steering comitte secara periodik untuk pengambilan keputusan

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	30.570	23.962	(6.608)				6.404	3.819	60%			
	010 06 06 Program Bina Pembangunan Daerah	20.570	19.943	(627)				3.729	2.357	63%			
	1252 Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan	20.570	19.943	(627)				3.312	1.868	56%			
	001 Integrasi indikator Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah lingkup UPD III	1.000	1.000	-	542	542	-		1.122				
	003 Penerapan SPM bidang kesehatan, sosial, dan transtibumlinmas	750	123	(627)	542	542	-		167				
	004 Evaluasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah	500	500	-	34	34	-	-	-				
	010 Monev terpadu Penerapan dan Pencapaian SPM di daerah lingkup UPD III	250	250	-	542	542	-		249				
	011 Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i>	1.000	1.000	-	160	160	-	1.000	319	32%			
	015 Peningkatan kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan penurunan <i>stunting</i> (INEY)	17.070	17.070	-	160	160	-	2.312	12	1%			
	010 08 10 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan	10.000	4.019	-5.981	514	514	0	2.675	1.462	55%	514	514	100%
	1269 Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	10.000	4.019	-5.981	514	514	0	2.675	1.462	55%	514	514	100%
	006 Cakupan Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	10.000	4.019	(5.981)	514	514	-	2.675	1.462	55%	514	514	100%
	TOTAL	30.570	23.962	(6.608)				6.404	3.819	60%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	010 06 06 Program Bina Pembangunan Daerah								
	1252 Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan								
	001 Integrasi indikator Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah lingkup UPD III								
	003 Penerapan SPM bidang kesehatan, sosial, dan transtibumlinmas								
	004 Evaluasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah								
	010 Monev terpadu Penerapan dan Pencapaian SPM di daerah lingkup UPD III								
	011 Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i>	34		34			ya	ya	
	015 Peningkatan kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan penurunan <i>stunting</i> (INEY)	160		160			ya	ya	ya
	010 08 10 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan								
	1269 Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil								
	006 Cakupan Anak yang Memiliki Akta Kelahiran								

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran			
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Proses pengadaan bantuan teknis (Tenaga Ahli)	Proses pengadaan bantuan teknis (Tenaga Ahli) menggunakan metode guideline world bank sehingga proses pelaksanaannya menyesuaikan jadwal yang lebih lama dibanding dengan pengadaan dengan metode Perpres	
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)			
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	Pelaksanaan 8 aksi Konvergensi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting	Pendanaan pada Monev terbatas, Pemberian pelatihan kepada lokus intervensi terkendala pada penganggaran dan pembebanan penambahan pekerjaan pada Bappeda selaku koordinator Pelaksanaan aksi konvergensi di daerah tidak mendapatkan dukungan dari pusat	Pemberian dana dekon kepada Pemda yang langsung diberikan kepada Bappeda selaku koordinator pelaksanaan aksi konvergensi, dan penambahan alokasi anggaran pada Kemendagri khususnya pada kegiatan monev dan pemberian pelatihan aksi kepada daerah lokus intervensi sehingga binwas bisa dilaksanakan secara maksimal
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PERTANIAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	268.150	269.150	1.000				218.181	155.153	71%			
	018 11 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	268.150	269.150	1.000				218.181	155.153	71%			
	1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas	31.738	31.738	-				26.580	26.973	101%			
	102 Lumbung Pangan Masyarakat	31.738	31.738	-	443	443	-	26.580	26.973	101%	443	425	96%
	1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan	6.890	6.890	-				4.550	4.051	89%			
	106 Kawasan Mandiri Pangan	6.890	6.890	-	13	13	-	4.550	4.051	89%	13	13	100%
	1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan	229.522	230.522	1.000				187.051	124.130	66%			
	101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	203.781	203.781	-	4600	4600	-	160.310	117.455	73%	4.600	3.005	65%
	106 Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar	25.741	26.741	1.000	35	35	-	26.741	6.674	25%			
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis												
	018 11 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
	1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan												
	115 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah												
	TOTAL	268.150	269.150	100%				218.181	155.153	71%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	018 11 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas								
	102 Lumbung Pangan Masyarakat		138	138	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
	1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan								
	106 Kawasan Mandiri Pangan		13	13	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
	1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan								
	101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	160	340	500	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	106 Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar	160		160	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	018 11 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan								
	115 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah								

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Kegiatan KRPL dilakukan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat diutamakan wilayah stunting dan perbatasan, agar masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, mempermudah akses terhadap pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga	Pimpinan Daerah keberatan atas penunjukan daerahnya sebagai lokasi prioritas penanganan stunting Masyarakat belum terbiasa menerima program Pemerintah Managemen dan motivasi anggota kelompok : Pembinaan dan pendampingan terbatas selama mendapat banper	Penguatan komitmen pimpinan daerah dalam pencegahan stunting Informasi up to date untuk data penerima sasaran di setiap wilayah : ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi, batita Pemanfaatan dana desa untuk mendukung ataupun mereplikasi kegiatan KRPL
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Anggaran dilaksanakan untuk pembuatan kebun bibit, demplot, dan pengembangan pekarangan	Pencairan anggaran menunggu usulan dari kabupaten	Perlunya integrasi tentang pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dalam kurikulum pendidikan dasar, kegiatan informal berbasis gender. Perlunya integrasi dengan kegiatan posyandu à pemanfaatan hasil pekarangan, peningkatan pengetahuan gizi untuk pencegahan stunting
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	Adanya anggaran APBD untuk mendukung kegiatan KRPL	Belum seluruh pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan di wilayah stunting terutama kegiatan KRPL	Pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran kegiatan di wilayah stunting untuk KRPL
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	Dilakukan di 160 kabupaten stunting dan perbatasan, daerah rawan pangan dan daerah miskin	Lokasi stunting berada di remote area, beberapa daerah konflik, kondisi geografis dan topografis yg tidak sama; Penerima manfaat tidak seluruhnya kelompok target sasaran program pencegahan stunting; Kurangnya pengetahuan tentang budidaya sayuran; Kurangnya ketersediaan air; serta Minimnya informasi terkait stunting yang diterima penerima manfaat	Perlu adanya pendampingan yang intensif di daerah stunting
E	Informasi Lainnya yang Relevan	Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2010 dan dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah khususnya di desa stunting, hingga tahun ini KRPL sudah menjangkau 1600 desa stunting		

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	1.750	1.750	-				508	312	61%			
	090207 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri	1.750	1.750	-				508	312	61%			
	1835 Penumbuhan dan Pengembangan Industri	1.750	1.750	-				508	312	61%			
	030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi pangan olahan sehat	750	750	-	2	2	-	310	69	22%	1	1	100%
	038 Komoditi yang diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1.000	1.000	-	2	2	-	198	243	123%	1	0	0%
TOTAL		1.750	1.750	-				508	312	61%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	090207 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri								
	1835 Penumbuhan dan Pengembangan Industri								
	030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi pangan olahan sehat	2	-	2	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya
	038 Komoditi yang diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	12	-	12	tidak	ya	tidak	tidak	tidak

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan,	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Dalam rangka penurunan stunting Direktorat IMHLP mengajukan kegiatan berupa 2 kegiatan : Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan		
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	<p>Kegiatan Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi pangan berbasis bahan baku lokal telah dilaksanakan bekerja sama dengan Pemda Kab. Blora dengan sasaran peserta berupa ibu-ibu hami dengan jumlah peserta 100 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juli 2019 dan dilaksanakan berupa Sosialisasi serta pelatihan kepada Kegiatan Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Pangan Olahan Ikan sampai saat ini telah dilaksanakan koordinasi dengan pemda terkait yaitu Pemda Kab. Indramayu dan Organisasi Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI). adapun bentuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Sosialisasi kepada 150 masyarakat dan pelatihan 50 orang masyarakat dalam rangka peningkatan konsumsi olahan ikan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019</p> <p>Kegiatan Pengawasan SNI Tepung Terigu dilaksanakan untuk memastikan bahwa Tepung Terigu yang beredar memenuhi SNI yang telah diwajibkan sehingga dapat menurunkan angka Stunting. Pengawasan SNI tersebut dilakukan di pabrik-pabrik penghasil tepung terigu yang tersebar di 12 kab/kota di Indonesia. sampai saat ini telah dilaksanakan pengawasan di 5 perusahaan dan akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun.</p>		
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)			
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas			
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	52.292	51.415	(878)				37.445	31.439	84%			
	023 05 09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	52.292	51.415	-878				37.445	31.439	2			1
	2016 Penyediaan Layanan Paud	18.651	18.504	(147)				18.000	12.453	69%			
	006 Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif	18.651	18.504	(147)	1.200	1.200	-	18.000	12.453	69%	1200	1000	83%
	5631 Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	33.642	32.911	-731				19.445	18.986	1			1
	002 Lembaga Menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk Intervensi Permasalahan Sosial Tertentu	33.642	32.911	(731)	33.859	33.859	-	19.445	18.986	98%	14.908	14.908	100%
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	110.733	82.454	(28.280)				-	26.398	-			
	023 01 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.199	4.199	-				-	601				
	4079 Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	4.199	4.199	-				-	601				
	001 Model Pengembangan dan Pembelajaran	4.199	4.199	-	39	28	(11)	-	601				
	023 16 13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	106.535	78.255	(28.280)				-	25.797				
	5636 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud	106.535	78.255	(28.280)				-	25.797				
	009 Rata-rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	106.535	78.255	(28.280)	4.637	3.021	(1.616)	-	25.797				
	TOTAL	163.026	133.868	82%				37.445	57.837	154%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	023 05 09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat								
	2016 Penyediaan Layanan Paud								
	006 Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif	100	48	148	Tidak		Ya	Tidak	
	5631 Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga								
	002 Lembaga Menyelenggarakan Pendidikan	160		160	Ya		ya	Tidak	
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	023 01 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan								
	4079 Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara								
	001 Model Pengembangan dan Pembelajaran	-	4	4	Tidak	Ya	Ya	tidak	Ya
	023 16 13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan								
	5636 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud								
	009 Rata-rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	100	0	100	Tidak		ya	ya	

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran			
	Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	Workshop perencanaan program dan anggaran yang dilakukan oleh SEAMEO RECFON untuk memantapkan perencanaan dan tindaklanjut kegiatan pada tanggal 3-4 Januari 2019	Lokasi fokus terlalu banyak namun SDM tidak optimal	Lokasi fokus diprioritaskan pada 1 atau 2 lokus saja
	Penyediaan Layanan Paud	Dalam pencantuman keg. pemberian bant. Lay. Usia 0-3 thn dan pemberian bant. PMT, satker mengalami kesulitan beragumentasi tentang urgensi 2 keg dimaksud harus diadakan di Dit. PPAUD	Kemenkeu, dan KemenPAN RB, menyatakan keg inisiasi 0-3 tahun dan PMT bukan core bussiness, Dit. PPAUD	Tahun 2020 keg yg berkaitan akan di hilangkan, dan dialihkan dana nya melalui DAK Non Fisik BOP PAUD
B	Proses Pelaksanaan Anggaran			
	Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	Workshop pengembangan model, meliputi pengembangan modul edukasi gizi untuk guru dan pendidik PAUD dengan mitra SEAMEO RECFON pada bulan Mei. Untuk kegiatan Gizi untuk Prestasi telah dilakukan action research untuk mengetahui efektifitas program pada bulan Maret-April 2019 di Malang. Selain itu, di Cirebon juga dilakukan stakeholder meeting dengan mitra lokal dan GIZ untuk menyiapkan sekolah model pada bulan April 2019. Tindak lanjut	Modul Anaku Sehat dan Cerdas belum selesai sesuai jadwal, karena ada tambahan konsep framework setelah melakukan workshop dengan SEAMEO CECCEP dan SEAMEO TROPMED. Rencana untuk melakukan online training Anaku Sehat Cerdas kepada pendidik PAUD, namun	Pengembangan modul program Anaku Sehat dan Cerdas yang lebih komprehensif sesuai framework yang baru yang telah disepakati.
	Penyediaan Layanan Paud ; Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas	Penerimaan proposal, verifikasi dan validasi, pembuatan SK penerima, pembuatan SPP dan SPM, penyaluran bantuan.	Data kab. terdampak stunting belum akurat	Beberapa daerah yang menyatakan kebutuhannya, juga diberikan bantuan, sesuai kriteria juknis
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)			
	Penyediaan Layanan Paud; Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas;	Melakukan dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan rapat implementasi dengan Bappenas, Kemdagri, Kemendes, Menko PMK, Kemenkes dan internal di lingkungan kemdikbud.	Terdapat perbedaan mengenai penggunaan dana desa versi kemendes dan kemdagri	Pembuatan 1 regulasi yang memungkinkan penggunaan dana desa untuk seluruh asset dan SDM yang ada di desa ybs.
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas			
	Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	SEAMEO RECFON memiliki kegiatan di 4 lokus, yaitu Sambas, Malang, Cirebon dan Bogor. Perkembangan tahapan kegiatan disetiap lokus Pada semester ini dilakukan action research untuk pengembangan model Gizi untuk Prestasi di Malang. Untuk program Anaku sehat dan cerdas dalam tahap pengembangan model, modul dan framework yang baru.		
	Penyediaan Layanan Paud ; Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas	Lokasi lokasi prioritas, merespon dan berkoordinasi secara baik.	Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Kab. terdampak stunting sulit di koordinasikan.	Pengalihan alokasi ke kab. lain yang mudah di koordinasi di Prov. Papua dan Papua Barat
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri
Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Spesifik	4.301.129	4.306.571	5.442				879.743	298.917	34%			
024 03 06	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	944.175	944.175	-				145.210	74.577	51%			
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	819.542	819.542	-				45.400	46.124	102%			
001	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu	280.568	280.568	-	521.990	521.990	-	12.600	7.324	58%	57.500	56.247	98%
002	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus	325.527	325.527	-	1.486.400	1.486.400	-	5.600	0	0%	81.000	78.918	97%
003	Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita	23.982	23.982	-	549	549	-	4.000	4.613	115%	20	20	100%
005	Pembinaan dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat	12.748	12.748	-	34	34	-	6.800	5.602	82%	30	28	93%
006	Suplementasi Gizi Mikro	5.000	5.000	-	90.000	90.000	-	8.000	0	0%	-	-	-
007	Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	19.908	19.908	-	514	514	-	600	2.919	486%	-	-	-
008	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Papua dan Papua Barat	3.519	3.519	-	3.430	3.430	-	5.200	0	0%	-	-	-
009	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus Papua dan Papua Barat	29.743	29.743	-	48.600	48.600	-	-	0	-	-	-	-
010	Penguatan intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita Papua dan Papua Barat	2.226	2.226	-	1	1	-	-	0	-	-	-	-
504	Peningkatan Surveilans Gizi	116.321	116.321	-	549	549	-	2.600	25.667	987%	6	6	100%
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	124.633	124.633	-				99.810	28.453	29%			
001	Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55.166	55.166	-	549	559	10	44.231	10.082	23%	549	143	26%
002	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama	11.343	11.343	-	235	245	10	4.476	2.511	56%	235	208	89%
004	Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	18.547	18.547	-	549	549	-	14.426	5.479	38%	549	273	50%
005	Pembinaan Pencegahan <i>stunting</i>	23.247	23.247	-	195	197	2	22.335	3.827	17%	195	75	38%
018	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal	16.330	16.330	-	549	555	6	14.342	6.554	46%	549	192	35%
024 05 08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	698.871	704.312	5.442				317.143	50.898	16%			
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	55.528	62.582	7.053				40.509	13.597	34%			
006	Layanan Imunisasi	48.305	45.944	(2.362)	519	519	-	29.137	11.524	40%	35	8	23%
010	Layanan Imunisasi di Papua dan Papua Barat	7.223	16.638	9.415	44	44	-	11.372	2.073	18%	1	1	100%
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular	150.740	146.149	(4.591)				149.019	37.128	25%			
005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	47.303	47.021	(282)	24.379	24.373	(6)	47.303	13.460	28%	24.373	19.830	81%
008	Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacangan	87.551	83.243	(4.309)	444	450	6	85.831	19.170	22%	444	122	27%
011	Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	15.885	15.885	-	13	13	-	15.885	4.498	28%	13	4	31%
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	492.602	495.582	2.979				127.615	173	0,1%			
506	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISP	1.151	1.151	-	17	17	-	365	173	47%	17	9	53%
511	Sarana dan Prasarana Penanggulangan TBC	226.358	227.370	1.012	5.669.000	5.673.375	4.375	127.250	-	0%	2.892.668	2.419.368	84%
512	Sarana dan Prasarana Penanggulangan HIV/AIDS	265.093	267.061	1.968	14.464.680	14.561.244	96.564	-	-	-	-	-	-
024 07 09	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2.658.084	2.658.084	-				417.389	173.442	0			
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan	2.658.084	2.658.084	-				417.389	173.442	42%			
508	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak	548.838	548.838	-	13	13	-	99.467	10.674	11%	-	2	
509	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyakit Tropis Terabaikan	89.800	89.800	-	2	2	-	39.618	3.392	9%	-	1	
510	Paket Penyediaan Vaksin	2.019.446	2.019.446	-	5	5	-	278.304	159.376	57%	-	3	
B	Intervensi Sensitif	28.041.591	28.119.285	77.694				26.930.507	24.499.014	91%			
024 01 11	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	26.716.800	26.716.800	0				26.716.800	24.297.039	91%			
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan	26.716.800	26.716.800	0				26.716.800	24.297.039	91%			
501	Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS	26.716.800	26.716.800	-	96,8	96,8	-	26.716.800	24.297.039	91%	96,8	96,5	99,7%
	Proporsi peserta PBI yang terdiri atas ibu hamil dan balita masing-masing 2% dan 10% (bobot 12%). Selanjutnya, diperkirakan 70% layanan kesehatan ibu dan anak yang diberikan melalui JKN mendukung pencegahan <i>stunting</i> .												
024 03 06	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	314.489	314.489	-				209.007	29.465	14%			
5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	156.887	156.887	-				156.887	18.912	12%			
002	Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media	105.731	105.731	-	97	97	-	105.731	10.764	10%	97	14,4	14,9%
	SubKomp. Secara umum sub-komponen dari output kampanye hidup sehat, 17% terkait <i>stunting</i> , kecuali untuk sub-komponen: • 051 C Kampanye 3 Prioritas (TBC, Imunisasi dan <i>Stunting</i>) (bobot: 33%) • 051 F Pengadaan Media Posyandu Kit (bobot: 80%)												
004	Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan	48.780	48.780	-	35	35	-	48.780	8.094	17%	36	12,0	33,3%

Hasil Evaluasi Mandiri
Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
	SubKomp. Secara umum sub-komponen dari output kampanye hidup sehat, 17% terkait stunting, kecuali untuk sub-komponen: • 051 C Kampanye 3 Prioritas (TBC, Imunisasi dan Stunting) (bobot: 33%) • 051 F Pengadaan Media Posyandu Kit (bobot: 80%) SubKomp. Secara umum sub-komponen dari output strategi promkes, 17% terkait stunting, kecuali untuk sub-komponen yang terkait: • Advokasi dalam menurunkan kematian ibu, bayi, pencegahan Stunting dan PTM/PM (bobot: 25%) • Advokasi Untuk Mendorong Kebijakan Pencegahan Stunting di Kab/kota (bobot: 100%) • Penggalangan Dunia Usaha untuk pemanfaatan CSR dan Sumberdaya Ormas untuk menurunkan kematian ibu, pencegahan stunting dan PTM/PM di Kab/Kota Lokus 2019 (bobot: 33%) • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promkes di Lokus Germas dan Stunting (bobot: 80%) • Pembinaan UKBM, Posyandu, Keluarga Sehat (bobot: 80%)												
	006 Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media di Papua dan Papua Barat	2.375	2.375	-	4	4	-	2.375	54	2%	4	0,7	17,1%
5834	Penyehatan Lingkungan	157.603	157.603	-				52.121	10.553	20%			
	501 Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat SubKomp. 052 A Orientasi KLB Keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan & Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan dan Penanganan KLB keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan dan Pengawasan KLB Keracunan Pangan 052 A Orientasi SDM dalam Pengawasan TPM	5.750	5.750	-	20.948	20.948	-	3.195	2.302	72%	20.948	35.877	171,3%
	504 Pengawasan terhadap Sarana Air Minum Komp. 052 - Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan Sarana Air Minum	4.657	4.657	-	117.001	117.001	-	2.329	909	39%	117.001	95.038	81,2%
	505 Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) SubKomp. 053 A Implementasi 5 Pilar STBM 053 A Implementasi 5 Pilar STBM untuk Kabupaten/Kota dan Puskesmas 053 A Implementasi Lima Pilar STBM 053 A Implementasi Lima Pilar STBM di Kab. Manokwari 053 A Konsolidasi Lima Pilar STBM 053 A Penguatan Implementasi 5 Pilar STBM 053 A Penguatan Koordinasi Lintas Sektor (PKK,MUI,Pramuka,TNI,Lintas Program) dalam Implementasi 5 pilar STBM bagi 34 Prov 053 A Penguatan Koordinasi Lintas Sektor (PKK,MUI,Pramuka,TNI,Lintas Program) dalam Implementasi 5 Pilar STBM bagi 8 Kab/Kota 053 A Penguatan Koordinasi LS (PKK, MUI, Pramuka, TNI) Dan LP Dalam Implementasi 5 Pilar STBM 053 A Pertemuan Implementasi 5 Pilar STBM 053 B IMPLEMENTASI 5 PILAR STBM 053 B Implementasi 5 Pilar STBM 053 B Implementasi Lima Pilar STBM 053 B Konsolidasi Lima Pilar STBM daerah lokus stunting (Kabupaten Tanah Bumbu) 053 C Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Pada DAS Citarum	147.196	147.196	-	45.000	45.000	-	46.598	7.342	16%	45.000	54.622	121,4%
024 04 07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	1.010.301	1.087.996	77.694				4.700	172.511	113%			
	2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	15.887	15.055	-832				4.700	5.300	113%			
	506 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar SubKomp. 053 O Pembinaan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	15.887	15.055	(832)	12	27	15	4.700	5.300	113%	4	0	0,0%
	2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	994.415	1.072.941	78.526				0	167.211				
	508 Alat Kesehatan	994.415	1.072.941	78.526	10.500	10.500	-		167.211		0	0	

Hasil Evaluasi Mandiri
Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT			Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I			
				Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%	
			Detil. Pada komponen 051 Pengadaan Alat Kesehatan, terdapat alat untuk layanan ANC dan PNC, layanan pemeriksaan ibu hamil, layanan persalinan, dan program edukasi anak usia dini (tumbuh kembang)													
C	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis			558.844	569.847	11.003				314.721	159.873	51%				
024 01 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas			76.395	76.434	39				60.882	20.751	34%				
	2038	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		76.395	76.434	39				60.882	20.751	34%				
	501	Pemetaan Keluarga Sehat		3.185	3.092	(93)	514	514	-	3.092	2.266	73%	514	488	94,9%	
	963	Layanan Data dan Informasi		73.210	73.342	132	1	35	34	57.790	18.485	32%				
024 03 06	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat			124.201	124.201	-				124.201	27.936	22%				
	5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan		124.201	124.201	-				124.201	27.936	22%				
	001	Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		106.214	106.214	-	170	170	-	106.214	21.239	20%	170	13	7,6%	
	005	Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Papua dan Papua Barat		1.987	1.987	-	4	4	-	1.987	711	36%	4	1	25,0%	
	007	Pembinaan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Penggerakkan Masyarakat di Posyandu		16.000	16.000	-	160	160	-	16.000	5.985	37%	160	35	21,9%	
024 04 07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan			7.782	7.782	0				3.000	1.305	43%				
	2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer		7.782	7.782	0				3.000	1.305	43%				
	509	Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga		7.782	7.782	-	3.973	7.946	3.973	3.000	1.305	43%	1.900	1.704	89,7%	
024 11 04	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			58.129	58.129	0				17.439	44.118	253%				
	2070	Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan		58.129	58.129	0				17.439	44.118	253%				
	504	Riset Penanggulangan Masalah Gizi		58.129	58.129	-	2	2	-	17.439	44.118	253%				
024 12 10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber			292.337	303.301	10.964				109.200	65.763	60%				
	2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan		192.338	203.302	10.964				73.804	44.196	60%				
	501	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan		64.535	75.499	10.964	6.826	8.915	2.089		24.003					
	505	Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan		127.803	127.803	-	16.301	15.981	(320)	73.804	20.193	27%	10.090	4.390	43,5%	
	2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan		99.999	99.999	-				35.396	21.567	61%				
	501	Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based (Nusantara Sehat) Minimal 5 Orang		67.218	67.218	-	890	890	-	23.560	13.735	58%	310	260	83,9%	
	502	Penugasan Tenaga Kesehatan Secara Individu		28.941	28.941	-	3560	3560	-	10.537	7.823	74%	1800	1048	58,2%	
	505	Penugasan tenaga Kesehatan secara Team Based (Nusantara Sehat) minimal 5 orang di Wilayah Papua dan Papua Barat		3.839	3.839	-	100	100	-	1.299	9	1%	6	22	366,7%	
TOTAL				32.901.564	32.995.703	94.139				28.124.971	24.957.805	89%				

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Spesifik								
024 03 06	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat								
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat								
001	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	133	354	487	ya			ya	
002	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus	133	354	487	ya			ya	
003	Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita	514	0	514	ya			ya	
005	Pembinaan dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat	514	0	514	ya			ya	
006	Suplementasi Gizi Mikro	160	354	514	ya			ya	
007	Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	160	354	514	ya			ya	
008	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Papua dan Papua Barat	27	0	27	ya			ya	
009	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus Papua dan Papua Barat	27	0	27	ya			ya	
010	Penguatan intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita Papua dan Papua Barat	27	15	42	ya			ya	
504	Peningkatan Surveilans Gizi	160	354	514	ya			ya	
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga								
001	Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan SubKomp. 052 B Pembinaan dan Monev Kesehatan Keluarga ke Kab/Kota 052 B Pembinaan Program Kesehatan Keluarga 052 B Pendampingan Kesehatan Keluarga 053 A Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di Puskesmas 9 Kab/Kota 053 A Monev Dalam Peningkatan Program Kesga 053 A Monev Terpadu Program Kesehatan Keluarga 053 A Monev/Bimtek/Fasilitasi Program Kesehatan Keluarga ke Kabupaten/Kota 053 A Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Keluarga 053 A Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Keluarga dari Provinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas 053 A Pembinaan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 053 A Pembinaan Teknis, Supervisi & Pendampingan Pelayanan Kesehatan Keluarga (Petugas Provinsi) 053 A Pendampingan Kesehatan Keluarga 053 A Pendampingan Kesehatan Keluarga Di Puskesmas Kabupaten/Kota 053 A Pendampingan Kesehatan Keluarga Tingkat Provinsi 053 A Pendampingan Program Kesehatan Keluarga di Tingkat Provinsi (Kab Lokus adalah Kab Halmahera Utara) 053 A Superfisi Fasilitatif Program Kesga Ke Kab/Kota 053 A Supervisi Dalam Rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga Ke Kabupaten/Kota Dan Puskesmas 053 A Supervisi Fasilitatif Dalam Rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga 053 B Konsultasi Program Kesehatan Keluarga 053 B Koordinasi LP/ LS Kesehatan Keluarga di Provinsi Gorontalo 053 B Monev Dalam Rangka Peningkatan Program Kesga di Provinsi Maluku Utara 053 B Monev/Bimtek/Fasilitasi Program Kesehatan Keluarga 053 B Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan keluarga 053 B Pembekalan petugas kesehatan dalam rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga 053 B Pembinaan Teknis Pelayanan KB dan Kespro 053 B Pendampingan Program Kesehatan Keluarga 053 C Pendampingan dalam rangka pembinaan Puskesmas terlatih penanganan kegawatdaruratan maternal	514	0	514	YA		YA	YA	
002	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama SubKomp. 051 A Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 051 A Orientasi MTBS 051 A Orientasi MTBS bagi Petugas Kab/Kota (Kab/Kota,PKM,RS) 051 A Orientasi MTBS Dan SDIDTK 051 A Orientasi MTBS di Provinsi 051 A Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit 051 A Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Tk. Provinsi 051 A Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sehat (MTBS) di Provinsi 051 A Pelatihan MTBM/S dan SDIDTK 051 A Pelatihan MTBS 051 A Pelatihan MTBS Bagi Petugas Puskesmas di Provinsi 051 A Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah Terintegrasi 051 A Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita Terintegrasi 051 A Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan MTBS di Kabupaten Halmahera Barat 051 B Rapat Lintas Program Lintas Sektor Terkait Pelayanan MTBS 051 B Sosialisasi Pemantauan intervensi tumbuh kembang	235	279	514	YA		YA	YA	
004	Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah Komp. 051 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja (Dikeluarkan tanpa subkomponen dan koordinasi ke pusat) 052 Orientasi Tim Pembina UKS/M Tingkat Provinsi (Lintas Sektor Terkait Peraturan Bersama 4 Menteri Tentang UKS) (Dikeluarkan tanpa subkomponen) 053 Pembinaan Teknis UKS dan PKPR (Dikeluarkan tanpa subkomponen dan konsultasi ke pusat) 056 Dukungan Pengadaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	514	0	514	Tidak		YA	YA	
005	Pembinaan Pencegahan <i>stunting</i> Komp. 051 Orientasi Tata Kelola Klinis Pelayanan Kesehatan Keluarga (Dikeluarkan tanpa subkomponen) 052 Sosialisasi dan advokasi Program dan NSPK Kesehatan Keluarga (Dikeluarkan tanpa subkomponen) 053 Pengadaan Paket Kelas Ibu 054 Paket Pedoman dan SDIDTK Kit 055 Pedoman Rujukan Tumbuh Kembang Balita	195	319	514	YA		YA	YA	
018	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal Komp. 051 Orientasi Manajemen Kesehatan Keluarga 052 Koordinasi Kesehatan Keluarga (Dikeluarkan orientasi pelayanan kesehatan bagi korban KTP/A dan TTPO dan tanpa subkomponen) 053 Sosialisasi Kesehatan Keluarga (Dikeluarkan tanpa subkomponen) 054 Dukungan Kesehatan Keluarga Bagi Masyarakat 055 Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan ibu	514	0	514	YA		YA	YA	
024 05 08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit								
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan								
006	Layanan Imunisasi SubOutput. 006 001 Layanan Imunisasi Dasar Lengkap 006 004 Layanan Imunisasi Rutin di Kab/Kota								
010	Layanan Imunisasi di Papua dan Papua Barat								
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik								
005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria SubOutput. 005 001 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria Pusat 055 Bimtek tatalaksana dan diagnosis malaria 005 002 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria Di Kabupaten/Kota 005 003 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD 005 007 Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Malaria 005 U01 IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) 005 U04 IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit 005 U05 Survei Darah Massal Malaria (angka parasite rate) di daerah sulit	0	514	514			Ya	Ya	
008	Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan	160		160	Ya		Ya	Ya	Ya

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
	Subkomp. 053 A Koordinasi Integrasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kecacingan dalam rangka Intervensi Stunting 051 A Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan di Daerah Stunting 051 A Pertemuan Sosialisasi, Koordinasi POPM Filariasis Kecacingan di Kabupaten Stunting 051 A Sosialisasi dan Advokasi POPM Cacingan Pada Daerah Intervensi STUNTING di Kab. KEPULAUAN SULA 051 A Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan pada Daerah Stunting (Lampung Tengah) 051 A Sosialisasi dan advokasi POPM filariasis dan kecacingan pada Daerah intervensi stunting 051 A Sosialisasi dan Advokasi POPM Cacingan Pada Daerah Intervensi Stunting 051 A SOSIALISASI DAN ADVOKASI POPM FILARIASIS, KECACINGAN DAN STUNTING DI MALUKU TENGAH 051 A Sosialisasi dan advokasi POPM kecacingan pada daerah intervensi stunting 051 A Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan pada daerah intervensi stunting (Kabupaten Buleleng) 051 A Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi POPM Kecacingan Dalam Rangka Intervensi Stunting di Kab. Banggai 051 B Pertemuan Sosialisasi Koordinasi di Kabupaten Stunting 051 B Sosialisasi dan Advokasi POPM Cacingan Pada Daerah STUNTING di Kab. HALMAHERA SELATAN 051 B Sosialisasi dan Advokasi Kecacingan Pada Daerah Intervensi Stunting 051 B Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Dalam Rangka Intervensi Stunting di Kab. Parigi Moutong 051 B SOSIALISASI DAN ADVOKASI POPM KECACINGAN PADA DAERAH INTERVENSI STUNTING 051 B Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Pada Daerah Intervensi Stunting di Kab. Nunukan 051 B Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan pada Daerah Stunting (Tanggamas) 051 C Koordinasi Pelaksanaan Survei/POPM Stunting 051 C Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan pada Daerah Stunting (Kabupaten Lampung Selatan) 051 D Pertemuan Sosialisasi Lintas Program POPM Kecacingan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting 051 D Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan pada Daerah Stunting (Kabupaten Lampung Timur) 051 E Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Analis Laboratorium Puskesmas dalam Rangka Intervensi Stunting 051 I Pertemuan Evaluasi POPM Kecacingan Tingkat Kabupaten pada Daerah Stunting 053 A Pendataan Sasaran Pelaksanaan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting								
	011 Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	0	13	13			Ya	Ya	
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung								
	506 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISIP								
	Subkomp. 054 B Manajemen Zinc pada Balita Diare di Lokus Stunting								
	511 Sarana dan Prasarana Penanggulangan TBC								
	512 Sarana dan Prasarana Penanggulangan HIV/AIDS								
024 07 09	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan								
	2065 Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan								
	508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak Detail. Terdapat 3 paket terkait stunting: obat gizi (Rp 224,8 Milyar), obat kesehatan ibu (Rp 5,03 Milyar), dan obat kesehatan anak (Rp 26,79 Milyar).	160	354	514					
	509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyakit Tropis Terabaikan Detail. Terdapat 2 paket terkait stunting: Filariasis (Rp 54,83 Milyar) dan obat diare (Rp 15,69 Milyar).								
	510 Paket Penyediaan Vaksin Detail. Terdapat 1 paket terkait stunting: imunisasi dasar lengkap pada anak (Rp 1,82 Triliun).								
B	Intervensi Sensitif								
024 01 11	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional								
	5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS								
	501 Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS Proporsi peserta PBI yang terdiri atas ibu hamil dan balita masing-masing 2% dan 10% (bobot 12%). Selanjutnya, diperkirakan 70% layanan kesehatan ibu dan anak yang diberikan melalui JKN mendukung pencegahan stunting.								
024 03 06	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat								
	5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
	002 Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media SubKomp. Secara umum sub-komponen dari output kampanye hidup sehat, 17% terkait stunting, kecuali untuk sub-komponen: • 051 C Kampanye 3 Prioritas (TBC, Imunisasi dan Stunting) (bobot: 33%) • 051 F Pengadaan Media Posyandu Kit (bobot: 80%)						Ya		
	004 Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan SubKomp. Secara umum sub-komponen dari output kampanye hidup sehat, 17% terkait stunting, kecuali untuk sub-komponen: • 051 C Kampanye 3 Prioritas (TBC, Imunisasi dan Stunting) (bobot: 33%) • 051 F Pengadaan Media Posyandu Kit (bobot: 80%) SubKomp. Secara umum sub-komponen dari output strategi promkes, 17% terkait stunting, kecuali untuk sub-komponen yang terkait: • Advokasi dalam menurunkan kematian ibu, bayi, pencegahan Stunting dan PTM/PM (bobot: 25%) • Advokasi Untuk Mendorong Kebijakan Pencegahan Stunting di Kab/kota (bobot: 100%) • Penggalangan Dunia Usaha untuk pemanfaatan CSR dan Sumberdaya Ormas untuk menurunkan kematian ibu, pencegahan stunting dan PTM/PM di Kab/Kota Lokus 2019 (bobot: 33%) • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promkes di Lokus Germas dan Stunting (bobot: 80%) • Pembinaan UKBM, Posyandu, Keluarga Sehat (bobot: 80%)						Ya		
	006 Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media di Papua dan Papua Barat	4		4			Ya		
5834	Penyehatan Lingkungan								
	501 Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat SubKomp. 052 A Orientasi KLB Keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan & Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan dan Penanganan KLB keracunan Pangan 052 A Orientasi Pencegahan dan Pengawasan KLB Keracunan Pangan 052 A Orientasi SDM dalam Pengawasan TPM	160	354	514	tidak	ya	ya	ya	ya
	504 Pengawasan terhadap Sarana Air Minum Komp. 052 - Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan Sarana Air Minum	160	354	514	tidak	ya	ya	ya	ya
505	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	160	354	514	ya	ya	ya	ya	ya

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

III Analisa

No.	Tema Kegiatan/ Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
		Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A Proses Perencanaan dan Penganggaran			
I. Ditjen Pelayanan Kesehatan			
	a. Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Kegiatan workshop PISPK tidak secara langsung terkait dengan stunting, melainkan sebagai wadah koordinasi dengan pemegang program dan lintas sektor dalam hal identifikasi apakah bayi terlahir stunting atau tidak.	Meningkatkan pembinaan Puskesmas secara berjenjang khususnya dalam rangka intervensi lanjut dan peningkatan IKS
	b. Monev Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Monitoring dan Evaluasi belum semua dilakukan secara intergrasi	Optimalisasi pembinaan dan monev Perkesmas secara berjenjang yang terintegrasi dengan PISPK
	c. Merencanakan jenis kegiatan penguatan pelayanan ibu dan anak, lokus, perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan dan besaran jumlah anggaran	adanya revisi pagu anggaran	
	d. Perencanaan Anggaran Pengadaan Alat Kesehatan untuk layanan ANC dan PNC, layanan pemeriksaan ibu hamil, layanan persalinan, program edukasi anak usia dini (tumbuh kembang)	Keterbatasan Anggaran sehingga tidak semua kebutuhan Alkes yang dibutuhkan terpenuhi	Perlu adanya tambahan anggaran
II. Ditjen Kesehatan Masyarakat			
	1. Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk pertemuan Koordinasi Percepatan Penurunan AKI, AKN dan Stunting. 23 - 26 Juni 2019 (Promkes)	Tidak semua Kab/Kota Lokus stunting ter cover	Sudah terlaksana
	2. Pengadaan Peralatan untuk Lokus Stunting (promkes)	Masih terblokir DJA	Sedang mengusulkan cair bintang
	3. Pelaksanaan Pendidikan Gizi dalam rangka Germas mendukung Stunting. Sedang berjalan (promkes)	Proses cair bintang yang tertunda lama	Sudah tinggal pelaksanaan
	4. Perencanaan dan Anggaran dilakukan internal terlebih dahulu sejak tahun 2018 dan selanjutnya bertahap dilakukan Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu. Selain itu pembahasan juga melibatkan Komisi IX DPR RI dengan diadakannya rapat dengar pendapat (Gizi)		
	5. Tidak ada permasalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran pada output terkait stunting yaitu Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pengawasan terhadap Sarana Air Minum, Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat (Kesling)		
III. PPSDM			
A. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan			
	2078.501. Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based (Nusantara Sehat) Minimal 5 Orang > 1. Persiapan dan Koordinasi; 2. Sosialisasi Penempatan Nakes dengan Team Based kepada Bupati dan atau Walikota; 3. Rekrutmen dan Seleksi; 4. Pelaksanaan Penempatan; 5. Pemulangan Tim NS; 6. Monitoring dan Evaluasi Lintas Program (Pelaksanaan, Seleksi dan Penempatan); 7. Pertemuan Koordinasi Team Based		
	2078.502. Penugasan Tenaga Kesehatan Secara Individu > 1. Persiapan, Koordinasi, Konsultasi dan Manajerial; 2. Rekrutmen dan Seleksi; 3. Pelaksanaan Penempatan; 4. Monitoring dan Evaluasi Lintas Program (Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan)		
	2078.505. Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based (Nusantara Sehat) Minimal 5 Orang di wilayah Papua dan Papua Barat > 1. Pelaksanaan Penempatan; 2. Persiapan Dan Koordinasi		
IV. Farmalkes			
A. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
	Pertemuan Koordinasi Rencana Kebutuhan Obat Nasional, Bulan April 2018, Pertemuan dihadiri Oleh Semua Pemegang Program Pusat yang terkait dengan Stunting, Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes	Data rencana kebutuhan obat dan vaksin belum optimal	Meningkatkan koordinasi antara pemegang program pusat, Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktorat tata kelola obat publik dan perbekkes
IV. Ditjen P2P			
A. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik			
	sinkronisasi data kebutuhan obat cacang dengan Farmalkes Kementerian Kesehatan		
	Pada Bulan Maret 2019, dilaksanakan Peningkatan Kapasitas petugas dalam rangka eliminasi filariasis dan reduksi cacangan.		
	Pertemuan koordinasi perencanaan teknis dan evaluasi pelaksanaan program cacangan dalam rangka intervensi stunting tingkat pusat dilaksanakan lintas program/lintas sektor/ dan lintas kementerian yaitu bersama dinas kab/kota stunting terpilih, dinas kesehatan provinsi, direktorat gizi kesmas Kemenkes, Farmalkes kemenkes, kementerian desa dan PDT, komite ahli pengobatan dan diperoleh rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pengobatan cacangan di daerah intervensi stunting tahun 2019 termasuk upaya untuk menyusun penganggaran kegiatan melalui DAK non fisik/anggaran pemda/dan sumber dana lain yang sesuai aturan.	Belum seluruh pemda memberikan dan menyediakan alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan pengobatan cacangan di daerah intervensi stunting	
	Sosialisasi dan advokasi daerah intervensi stunting pada tingkat provinsi/kabupaten		
	Distribusi obat cacang dari tingkat pusat ke kabuoatan hingga ke puskesmas		
	koordinasi pelaksanaan Pengobatan cacangan di daerah intervensi stunting		
	Kegiatan direncanakan berdasarkan sasaran dan intervensi pada daerah akselerasi (daerah endemis tinggi), intensifikasi (daerah yang mempunyai fokus malaria/daerah endemis sedang), eliminasi (daerah endemis rendah), dan pemeliharaan (daerah bebas malaria).		
	Pengendalian malaria dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi yaitu kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program.		
	Perencanaan anggaran dilakukan pada tahun 2019 dengan melibatkan stakeholder terkait meliputi pemerintah daerah dan K/L lainnya. Sinkronisasi penggunaan anggaran dari berbagai sumber dana (APBN, APBD, Hibah, dan lainnya) untuk kegiatan program malaria	- Sinkronisasi kegiatan berbagai sumber dana belum berjalan - Umpan balik berjenjang belum diberikan secara rutin	
B Proses Pelaksanaan Anggaran			
I. Ditjen Pelayanan Kesehatan			
	a. Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Kegiatan workshop PISPK tidak secara langsung terkait dengan stunting, melainkan sebagai wadah koordinasi dengan pemegang program dan lintas sektor dalam hal identifikasi apakah bayi terlahir stunting atau tidak.	Meningkatkan pembinaan Puskesmas secara berjenjang khususnya dalam rangka intervensi lanjut dan peningkatan IKS
	b. Monev Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Monitoring dan Evaluasi belum semua dilakukan secara intergrasi	Optimalisasi pembinaan dan monev Perkesmas secara berjenjang yang terintegrasi dengan PISPK
	c. Workshop Penguatan Pelayanan Ibu dan Anak, dilaksanakan Mei 2019 di Batam. Mengundang 17 RS di Kab/Kota pada propinsi dengan AKI tinggi. Stakeholder: POGI, IDAI, Kementerian Kesehatan (Dit. Kesehatan Keluarga)	Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini pada kelahiran SC	

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

III Analisa

No.	Tema Kegiatan/ Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
		Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
	d. Pengadaan Alat Kesehatan untuk layanan ANC dan PNC, layanan pemeriksaan ibu hamil, layanan persalinan, program edukasi anak usia dini (tumbuh kembang)	Keterbatasan Anggaran sehingga tidak semua kebutuhan Alkes yang dibutuhkan terpenuhi	Perlu adanya tambahan anggaran
II. Ditjen Kesehatan Masyarakat			
A. Kesling			
	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Intervensi Kesehatan Lingkungan (STBM Stunting dan DAS Citarum) : Kegiatan baru berjalan di Bulan Agustus 2019 (pusat)	Persiapan Intervensi Kesehatan Lingkungan dimulai dari penyusunan pedoman, rekrutmen tenaga pendamping yang diawali dengan kerjasama dengan Poltekkes kemudian dilakukan pemantauan dan pendampingan. Sehingga membutuhkan waktu persiapan dan pelaksanaan yang panjang	Persiapan Intervensi Kesehatan Lingkungan dapat dipercepat dengan melakukan persiapan di awal tahun.
	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Pemantauan dan pendampingan intervensi kesling : Kegiatan baru berjalan di Bulan Agustus 2019 (pusat)		
	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Tenaga Teknis Kualitas Kesling : kegiatan baru berjalan di Bulan Agustus 2019 (pusat)		
	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Verifikasi Lapangan STBM Award : kegiatan baru berjalan di bulan Agustus 2019 (pusat)	Proses Verifikasi STBM award memerlukan persiapan seperti penentuan persyaratan dan ketentuan	Proses persiapan dipercepat dengan melakukan persiapan di awal tahun.
	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Sanitarian Kit : Proses Pengadaan (pusat)	Terdapat pengembalian dokumen pengadaan dari ULP ke user karena terdapat perubahan terhadap spesifikasi atas permintaan user	Proses persiapan dipercepat dengan melakukan persiapan di awal tahun.
	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Kegiatan Implementasi 5 Pilar : Masih dalam proses pelaksanaan di daerah (dekonsentrasi)	Kegiatan dekonsentrasi sangat bergantung dengan ketersediaan SDM dan waktu di Dinkes Provinsi	Memastikan keterdiaan SDM dan waktu pelaksanaan pada proses perencanaan
	Pengawasan terhadap Sarana Air Minum = Kegiatan Pengawasan terhadap sarana air minum : Masih dalam proses pelaksanaan di daerah (dekonsentrasi)	Kegiatan dekonsentrasi sangat bergantung dengan ketersediaan SDM dan waktu di Dinkes Provinsi	Memastikan keterdiaan SDM dan waktu pelaksanaan pada proses perencanaan
	Pengawasan terhadap Sarana Air Minum = Kegiatan evaluasi pemanfaatan penyediaan alat kesehatan lingkungan : masih dalam proses pelaksanaan (pusat)	Kegiatan ini membutuhkan tim yang banyak sebab lokasi pengadaan Sanitarian Kit dan Kit Kesling semakin meluas	melakukan penambahan tim evaluasi dan melakukan peningkatan kapasitas kepada tim yang baru
	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat = Workshop Koordinasi TPM Memenuhi Syarat masih akan dilakukan di bulan September	Kegiatan ini merupakan workshop yang dilakukan pad setiap semester	
B. Promosi Kesehatan			
	1. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa.	Gagal lelang, karena harga satuan belum memasukkan pajak	Sedang proses perbaikan
C. Pembinaan Gizi Masyarakat			
	Dilakukannya proses Tender PMT Ibu hamil KEK dan PMT Balita Kurus Tahun 2019	Terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan pengadaan yaitu Aplikasi SPSE error sehingga jadwal mundur, terdapat peraturan perundangan pengadaan baru metode prakualifikasi	Di tahun 2020 akan diusulkan pelelangan pekerjaan pra-DIPA serta pengadaannya melalui e-katalog dan akan dikawal oleh ULP Kemenkes
	Dilakukannya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mengkaji dan membuat kebijakan terkait Penurunan Stunting		
	Dilakukannya Pelatihan dan Orientasi yang berdampak dalam penurunan Stunting (PMBA DAN PAG)		
	Dilakukannya konvergensi dengan LP/LS untuk membuat komitmen dalam penurunan Stunting		
III. PPSDM			
A. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan			
2078.501.Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based (Nusantara Sehat) Minimal 5 Orang			
	Sosialisasi Penempatan Nakes dengan Team Based kepada Bupati dan atau Walikota		
	Rekrutmen dan Seleksi	Pada Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Periode II Tahun 2019 jumlah peserta yang lulus menurun sejumlah 40 % dan 60% tidak lulus	Rencana akan dilaksanakan adendum atau pengadaan baru pelaksanaan rekrutmen untuk menambah jumlah peserta baru. Seleksi akan dilakukan seperti seleksi CPNS, dimana peserta diseleksi berdasarkan pilihan formasi
	Pelantikan, Pelepasan, dan Persiapan Pemberangkatan NS		
	Pelaksanaan Penempatan	Menurunnya Usulan Baru Kebutuhan Lokus Terpencil dan Sangat Terpencil dari Daerah	Hasil Desk Formasi Usulan NS disampaikan pada Dit.PKP dan Litbangkes untuk diverifikasi lebih lanjut sebagai calon lokus NST
2078.502.Penugasan Tenaga Kesehatan Secara Individu			
	Rekrutmen dan Seleksi	Pada Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Periode II Tahun 2019 jumlah peserta yang lulus menurun sejumlah 40 % dan 60% tidak lulus	Rencana akan dilaksanakan adendum atau pengadaan baru pelaksanaan rekrutmen untuk menambah jumlah peserta baru. Seleksi akan dilakukan seperti seleksi CPNS, dimana peserta diseleksi berdasarkan pilihan formasi
	Pelaksanaan Penempatan	1. Menurunnya Usulan Kebutuhan Lokus Terpencil dan Sangat Terpencil dari Daerah 2. Adanya lokus yang tidak diminati	1. Telah melaksanakan 5 Periode Desk Formasi Usulan kebutuhan NS dengan Dinkes Kabupaten dan Dinkes Provinsi 2. Akan dilaksanakan beberapa skenario penempatan untuk lokus yang tidak diminati
2078.505.Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based (Nusantara Sehat) Minimal 5 Orang di wilayah Papua dan Papua Barat			
	Pelaksanaan Penempatan	1. Menurunnya Usulan Baru Kebutuhan dari Papua dan Papua Barat 2. Keterbatasan Peminat Pendaftar dari Papua dan Papua Barat OAP(Orang Asli Papua)	1. Bersurat kepada Dinkes Provinsi Papua dan Papua Barat terkait pelaksanaan desk formasi 2. Bersurat kepada Dinkes Provinsi Papua terkait pemenuhan tenaga melalui Program Kijang di Papua
IV. Farmalkes			
A. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
	Melakukan proses pengadaan dan pendistribusian	1. Kemampuan kapasitas produksi Industri Farmasi dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan program 2. Kapasitas tempat penyimpanan di Instalasi Farmasi Propinsi dan Kab/Kota 3. Keterbatasan dana distribusi obat melalui DEKON Propinsi	1. Meningkatkan koordinasi lintas program terkait dengan kemampuan kapasitas produksi. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kab/Kota. 3. Re kalkulasi kebutuhan anggaran distribusi obat yang melalui DEKON Propinsi.
IV. Ditjen P2P			
A. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik			
	Pelaksanaan Pengobatan cacingan pada anak usia 1-12 tahun di bulan februari/april. Bagi kabupaten yang melaksanakan pengobatan di bulan Februari maka pemberian obat cacing terintegrasi dengan pemberian vitamin A untuk sasaran anak balita. Sedangkan pada anak usia sekolah dilaksanakan pemberian obat cacing di sekolah	1. sosialisasi penggunaan dana desa untuk kader kesehatan dalam mendukung kegiatan pengobatan cacingan di daerah intervensi stunting belum maksimal	peningkatan koordinasi penggunaan dana desa untuk kader kesehatan dalam mendukung kegiatan pengobatan cacingan di daerah intervensi stunting belum maksimal terutama di tingkat kabupaten/puskesmas/hingga desa
	Supervisi/bimbingan teknis/pemantauan pelaksanaan pengobatan cacingan di daerah intervensi stunting Bulan Februari/April		
	sweeping cakupan Pengobatan cacingan di daerah intervensi stunting		
	- Pelaksanaan melibatkan kegiatan lintas program/ lintas sektor dalam kegiatan Forum Nasional Gebrak Malaria (FNGM), Pembuatan Pedoman Quality Assurance sebagai guidelines mikroskopis untuk penegakan diagnostik malaria, TOT Pelatihan IRS di daerah endemis tinggi (BTKL Palembang, BTKL Jakarta, BTKL Banjar Baru, BTKL Yogyakarta, BTKL Surabaya, BTKL Makasar, BTKL Ambon, BTKL Batam, BTKL Manado, Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, KKP Jayapura, KKP Manokwari, KKP Ternate, KKP Ambon), Assesment Eliminasi Malaria.		

Hasil Evaluasi Mandiri
Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KESEHATAN

III Analisa

No.	Tema Kegiatan/ Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
		Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
	- Pelaksanaan Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria Papua berfokus di Kab. Keerom, Kab. Timika, Kab. Boven Digoel, Kab. Biak, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Yapen, Kab. Nabire berupa penguatan malaria center, pelatihan kader malaria '- Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria Papua Barat berupa pemberdayaan komunitas pengendalian malaria (juru malaria kampung), penguatan diagnosis dan tatalaksana (OJT)		
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)		
	II. Ditjen Kesehatan Masyarakat		
	A. Kesling		
	Uji coba pelaksanaan lima pilar STBM di lokasi SBS dan non SBS		
	IV. Ditjen P2P		
	A. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik		
	Supporting pendanaan malaria juga berasal dari hibah (GF, Unicef, WHO) berupa operasional eliminasi malaria pada daerah yang tidak terbiayai oleh APBN, technical assistance, dan hibah barang penunjang eliminasi malaria (kelambu, RDT malaria)		
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas		
	II. Ditjen Kesehatan Masyarakat		
	A. Kesling		
	Kinerja pada lokasi prioritas (160 kabupaten prioritas stunting) telah memenuhi target B06 yang dipantau KSP yaitu 8.000 desa yang melaksanakan STBM	Optimalisasi dana hibah untuk percepatan eliminasi : GF Malaria hanya s/d 2020	
E	Informasi Lainnya yang Relevan		

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN AGAMA

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	80.291	38.178	-42.113				75.000	13.377	18%			
	025 03 08 Program Bimbingan Masyarakat Islam	79.344	37.353	-41.991				75.000	12.880	17%			
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	79.344	37.353	(41.991)				75.000	12.880	17%			
	102 Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	79.344	37.353	(41.991)	250.000	599.925	349.925,00	75.000	12.880	17%	23.803	10.315	43%
	025 08 12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	947	826	(122)					497				
	2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	947	826	(122)					497				
	014 Bimbingan Keluarga Hittasukhaya	947	826	(122)	32	246	214,00		497				
	TOTAL	80.291	38.178	-42.113				75.000	13.377	18%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	025 03 08 Program Bimbingan Masyarakat Islam								
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah								
	102 Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	490		490	Tidak		Sudah	Sudah	Sudah
	025 08 12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha								
	2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha								
	014 Bimbingan Keluarga Hittasukhaya								

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
Program Bimbingan Masyarakat Islam				
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Sumber pendanaan seluruhnya bersumber dari PNPB Nikah Rujuk. Proses perencanaan dan anggaran dilaksanakan pada tahun 2018, dimana target distribusi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: rata-rata peristiwa NR pertahun, jumlah umat Islam, asumsi penerimaan PNPB.	Sumberdana pelaksanaan Bimwin seluruhnya berasal dari PNPB NR sehingga pelaksanaan diawal tahun tergantung dengan jumlah peristiwa Nikah Rujuk yang dilaksanakan di luar kantor;	
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Pencairan dan Penetapan distribusi anggaran setiap bulan ditentukan dengan hasil rekonsiliasi serta terbitnya MP(maksimum pencairan)	Penerbitan MP membutuhkan waktu lama karena proses rekonsiliasi. Pagu alokasi anggaran yang ada dibandingkan pagu MP tidak bisa diprediksi sehingga sering terjadi revisi antar satker dari yang berlebih ke satker yang kurang.	
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)			
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	Kegiatan ini dilaksanakan fleksibel di Kabupaten dan KUA Kecamatan menyesuaikan pemenuhan kuota calon pengantin.	a. Trend peristiwa nikah baru terjadi di bulan Besar atau bulan agustus tahun 2019; b. Realisasi pelaksanaan bimwin hanya tercapai pada kategori bimbingan perkawinan tatap muka/reguler, sedangkan untuk bimbingan perkawinan mandiri calon pengantin masih rendah tingkat kepeduliannya, berikutnya kategori bimwin pranikah remaja usia nikah sedang dalam	Penerbitan peraturan ketenagakerjaan untuk memberikan dispensasi kepada karyawan mengikuti Bimbingan Perkawinan
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN SOSIAL

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	55.102.995	54.864.085	-238.910				27.525.468	27.525.468	100%			
	027 05 07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55.102.995	54.864.085	(238.910)				27.525.468	27.525.468	100%			
	2251 Jaminan Sosial Keluarga	34.347.384	34.301.694	(45.690)				27.525.468	27.525.468	100%			
	001 Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	34.347.384	34.301.694	(45.690)	10.000.000	10.000.034	34	27.525.468	27.525.468	100%	185.893	185.893	100%
								446.143	446.143	100%	3.194.047	3.232.199	101%
								7.665.712	7.757.277	101%			
	5873 Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	7.437.593	7.259.959	(177.633)									
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	7.437.593	7.259.959	(177.633)	5.586.749	5.513.774	(72.975)	2.375.074	3.225.038	136%			
	5874 Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	6.988.832	6.918.728										
	002 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	6.988.832	6.918.728		5.257.002	5.238.360		2.566.937	3.207.588				
	5875 Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	6.329.186	6.383.703	54.517									
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	6.329.186	6.383.703	54.517	4.756.249	4.847.866	91.617	2.089.153	2.476.581	119%			
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	197.706	197.706	-				98.853	82.004	83%			
	027 11 04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan	197.706	197.706	-				98.853	82.004	83%			
	2254 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	197.706	197.706	-				98.853	82.004	83%			
	002 Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat	197.706	197.706	-	21.900	21.900	-	98.853	82.004	83%	10.950	11.706	107%
	TOTAL	55.300.700	55.061.791	100%				27.624.321	27.607.471	100%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	027 05 07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
	2251 Jaminan Sosial Keluarga								
	001 Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	510		510	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
	5873 Penanganan Fakir Miskin Wilayah I								
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	30	103	133			Tidak	Ya	
	5874 Penanganan Fakir Miskin Wilayah II								
	002 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	31	65	96			Tidak	Ya	
	5875 Penanganan Fakir Miskin Wilayah III								
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	18	65	83			Tidak	Ya	
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	027 11 04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan								
	2254 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial								
	002 Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat		24	24	21.900		Ya		

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
INTERVENSI SPESIFIK				
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan penganggaran bantuan sosial PKH untuk komponen kesehatan kategori ibu hamil dan anak usia dini diberikan kepada keluarga dalam rangka menstimulasi orangtuanya untuk memeriksakan kehamilan dan kesehatan anak usia dini dan pembelian makanan bergizi	Jumlah KPM PKH yang tinggal di lokasi terpencil, tertinggal dan terluar tidak dapat mengakses sarana dan prasarana kesehatan di lokasi tersebut karena keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas dan transportasi	jadwal penyaluran bantuan sosial dilaksanakan 2 tahun sekali
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Anggaran untuk ibu hamil dan anak usia dini, masing-masing @ Rp 2,4 juta diberikan kepada kepala keluarga (ibu pengurus) KPM PKH. Bantuan diberikan dalam 4 tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober		
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	Penyampaian materi oleh pendamping PKH kepada ibu-ibu KPM pada modul kesehatan tentang Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan, Gizi Ibu Hamil dan pemeriksaan kehamilan, Menyusui dan layanan kesehatan setelah kehamilan, Kesakitan dan Kesehatan Lingkungan (cuci tangan, jamban etc), KIS dan PMT	Pengetahuan pendamping PKH tentang 1.000 kehidupan dan stunting	peningkatan kapasitas pendamping PKH dalam pencegahan stunting
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkala kepada para KPM yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini)		
E	Informasi Lainnya yang Relevan	Pelaksanaan FDS (P2K2) dari Pendamping PKH kepada KPM PKH	Belum semua Pendamping yang sudah mendapatkan Pelatihan FDS (P2K2)	Dilakukan Pelatihan secara berjenjang dan mandiri oleh Koordinator Regional,

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	32.212	32.212	0				9.100	7.252	80%			
	032 06 08 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	32.212	32.212	0				9.100	7.252	80%			
	2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	32.212	32.212	-				9.100	7.252	80%			
	003 Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan)	32.212	32.212	-	35	35	-	9100	7.252	80%	32	10	31%
TOTAL		32.212	32.212	100%				9.100	7.252	80%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	032 06 08 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan								
	2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan								
	003 Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan)	32	30	62	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

III Analisa

No.	Tema Kegiatan/ Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
		Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran KKP telah melakukan tagging dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran, baik dalam Aplikasi Rencana Kerja KL (Krisna) dan Aplikasi RKAKL. Pada Renja dan RKAKL KKP Tahun 2019 telah teridentifikasi satu output kegiatan yang termasuk dalam kegiatan Pencegahan Stunting TA 2019 yaitu output Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan ikan (Gemarikan) dengan target output 32 kabupaten/kota lokasi stunting dan keterlibatan 35 mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,1 miliar.		
B	Proses Pelaksanaan Anggaran Pada tahun 2019, Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan Gemarikan dengan target output 32 kabupaten/kota lokasi stunting dan alokasi anggaran sebesar Rp. 8,5 miliar telah dilaksanakan melalui berbagai komponen kegiatan diantaranya : a). Safari Gemarikan, b). Paket Gemarikan (Makanan Berbahan Baku Ikan), c) Penghitungan angka konsumsi ikan di wilayah stunting.		
	Realisasi anggaran untuk output tersebut sampai dengan Bulan Agustus 2019 mencapai Rp 2,8 miliar atau mencapai 32,94% dan telah dilakukan 10 Safari Gemarikan dan Pembagian 2500 paket Gemarikan kepada Ibu Hamil, anak SD, anak balita, dan/atau wanita usia subur. Dalam rangka pelaksanaan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri melalui Gemarikan, KKP telah melibatkan 32 mitra di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Dalam rangka mendukung program nasional penanganan stunting, KKP melalui Safari Gemarikan di wilayah stunting juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sumberdaya ikan, kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah dan usaha kuliner ikan untuk mendorong perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan asupan protein yang bersumber dari ikan.		
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)		
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas 1. Sampai dengan Agustus 2019, telah dilakukan Safari Gemarikan dan Pemberian Paket Gemarikan di 10 kabupaten/kota wilayah stunting yaitu Kabupaten Pandeglang (30 Januari 2019), Kabupaten Probolinggo (28 Februari 2019), Kabupaten Kerinci (8 Maret 2019), Kabupaten Purbalingga (15 Maret 2019), Kabupaten Demak (29 Maret 2019), Kabupaten Gorontalo (4 April 2019), Kabupaten Hulu Sungai Utara (8 Juli 2019), Kabupaten Brebes (11 Juli 2019), Kabupaten Banggai (8 Juli 2019), dan Kabupaten Kulon Progo (1 Agustus 2019). 2. Selain itu pada tahun 2019, KKP juga melakukan perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dengan target sebanyak 128 desa stunting. Sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah dilakukan perhitungan angka konsumsi ikan di 12 Provinsi, 17 kabupaten/kota dan 46 desa stunting.		
E	Informasi Lainnya yang Relevan 1. Terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) memberikan amanat kepada KKP untuk : 1) Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), dan 2) Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. 2. Untuk sinergi gerak dan langkah semua unsur terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan Gemarikan, KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2016 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Nasional. FORIKAN Nasional beranggotakan lintas instansi dan kementerian/lembaga, swasta, asosiasi profesi dan lembaga kemasyarakatan. Selain di tingkat nasional kelembagaan Forikan juga sudah terbentuk FORIKAN di 34 Provinsi yang diketuai oleh istri Gubernur yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, yang telah membantu program/kegiatan peningkatan konsumsi ikan dalam rangka penanganan stunting. 3. KKP juga melaksanakan Bulan Bakti Karantina dan Mutu sebagai salah satu bentuk public awareness KKP dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi Perkarantina, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Keamanan Hayati Ikan. Bulan Bakti Karantina dan Mutu terbukti mampu memberikan dampak positif bagi tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta bahaya penyalahgunaan bahan-bahan pengawet pada ikan yang sering disalahgunakan oleh pedagang seperti formalin, dan borax. 4. Telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Ditjen Penguatan Daya Saing dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tentang Program Gemarikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Gemarikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, kuat dan cerdas, serta mendukung program ketahanan pangan dan gizi nasional. Perjanjian kerja sama dimaksud berlaku sampai dengan 2021.		

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	4.592.094	5.287.006	694.912				95.536	112.071	117%			
	033 05 07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	4.592.094	5.287.006	694.912				95.536	112.071	117%			
	2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan	1.036.272	1.248.550	212.278				95.536	112.071	117%			
	004 Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.036.272	1.248.550	212.278	167.680	170.801	3.121	95.536	112.071	117%	166.251	0	0%
	2415 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	3.555.821	4.038.456	482.634							13	13	100%
	005 SPAM Terfasilitasi	451.442	520.961	69.519	105	128	23						
	007 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan	654.576	561.161	(93.415)	965	859	(106)						
	008 SPAM Berbasis Masyarakat	1.360.641	1.844.773	484.132	2.002	1.943	(59)						
	009 Pembangunan SPAM di Kawasan Khusus	351.230	377.558	26.328	144	275	131						
	010 Pembangunan SPAM Regional	737.933	734.003	(3.929)	4.756.249	215	(4.756.034)						
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	460.668	456.960	(3.708)	1.014	1.147	133	-	63.981	-	-	-	-
	033 05 07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	460.668	456.960	(3.708)	1.014	1.147	133	-	63.981	-	-	-	-
	2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	207.816	268.985	61.169	507	507	-	-	38.957	-	-	-	-
	003 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	207.816	268.985	61.169	507	507	-	-	38.957	-	-	-	-
	2415 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	252.852	187.976	(64.877)	507	640	133	-	25.024	-	-	-	-
	003 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	252.852	187.976	(64.877)	507	640	133	-	25.024	-	-	-	-
TOTAL		5.052.761	5.743.966	691.205	1.014	1.147	133	95.536	176.052	184,3%	0	0	0

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	033 05 07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman								
	2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan								
	004 Sistem Pengelolaan Air Limbah	60		60		Ya	Ya	Ya	
	2415 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan								
	005 SPAM Terfasilitasi								
	007 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan								
	008 SPAM Berbasis Masyarakat								
	009 Pembangunan SPAM di Kawasan Khusus								
	010 Pembangunan SPAM Regional								
B	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	033 05 07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman								
	2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan								
	003 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	60		60		Ya	Ya	Ya	
	2415 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan								
	003 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM								

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Penetapan Kabupaten prioritas pelaksanaan program Sanitasi Perdesaan Padat Karya	keakuratan data prevalensi stunting tiap Kabupaten/Kota	pendetilan data prevalensi stunting untuk sektor sanitasi sebagai dasar penentuan lokasi
		Survey dan penetapan desa-desa prioritas penerima manfaat	aksesibilitas dan keterbatasan waktu	ketersediaan data-data sekunder misalnya dari program STBM
		Perhitungan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten dan desa terpilih	harga satuan material dan upah tenaga kerja yang berbeda-beda setiap lokasi	analisa harga satuan pada setiap lokasi pelaksanaan program dan kegiatan
		Pengajuan program dan kegiatan PLP yang mendukung penanganan stunting kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui serangkaian kegiatan Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting serta penelaahan pada aplikasi KRISNA	tidak ada	tidak ada
		Persetujuan program dan kegiatan serta input detil kegiatan didalam aplikasi RKAKL	tidak ada	tidak ada
		Sosialisasi program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di tingkat Desa	pemahaman yang beragam terhadap permasalahan dan program stunting	bantuan dari sanitarian/Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan pemucuan terlebih dahulu
		Penentuan titik lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana sanitasi	keterbasan alokasi APBN untuk setiap lokasi sehingga harus benar-benar memilih penerima manfaat prioritas	ketersediaan data penduduk yang memiliki balita, ibu yang sedang mengandung dan yang terkena gejala stunting
		Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai bagian dalam pemberdayaan masyarakat	kemampuan KSM dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terbatas	peningkatan kapasitas KSM

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Pada Semester 1 TA. 2019 Kegiatan Stunting belum ada penyerapan karena masih dalam proses revisi DIPA dari DIPA Satker awal ke DIPA Balai PPW	Revisi DIPA baru terbit pada Juli 2019	Alokasi anggaran sudah tersedia di DIPA awal
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	Sanimas IsDB (Status Minggu ke-4 Juni) Fokus pada penanganan air limbah rumah tangga dengan pemilihan prasarana dan sarana air limbah permukaan sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan berbasis masyarakat, sumber dana Loan (Islamic Development Bank). Kegiatan Sanimas IsDB yang mendukung Pencegahan dan Penurunan Stunting di lokasi prioritas sebanyak 3 desa yaitu 1) Desa Suka Bangun Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, 2) Kel. Tanah Garam Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, 3) Kel. Laing Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat	Penandatanganan kontrak kerjasama antara PPK dengan BKM/LKM dilakukan setelah adanya SK Penetapan Satker PIP/Kota untuk Kab/Kota yang mengusulkan perubahan PISK T.A 2019 Sudah ada penyerapan keuangan sebanyak 11 titik lokasi sisanya masih menunggu perubahan SK Pejabat Inti Satker PIP Kab/Kota	Mengawal proses penerbitan SK Pejabat Inti Satker PIP Kab/Kota penerima Program Sanimas IsDB. Mengawal proses pencairan dana bantuan pemerintah tahap I (pertama) untuk Kab/Kota yang tidak berubah Pejabat Inti Satkernya.
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	Sanitasi Perdesaan Padat Karya (Status Minggu ke-4 Juni)		
		Rekrutmen TFL	Sebanyak 33 Provinsi telah selesai melakukan rekrutmen TFL. Proses rekrutmen sempat terhambat karena menunggu Revisi DIPA	Tidak ada
		Peningkatan Kapasitas TFL	Penguatan kapasitas TFL dan Fasilitator Kab telah selesai dilaksanakan pada bulan Mei 2019.	Tidak ada
		Mobilisasi fasilitator tingkat pusat (Advisory dan Fasilitator KAB)	Fasilitator tingkat pusat (konsultan advisory) sudah termobilisasi sejak minggu pertama bulan Mei 2019.	Tidak ada
		Kontrak Faskab/TFL	Fasilitator Kabupaten sudah terkontrak oleh konsultan advisory per bulan Juni 2019.	Tidak ada
		Sosialisasi	Dari 600 lokasi, 65 lokasi sudah melakukan sosialisasi. Proses sempat terhambat karena menunggu Revisi DIPA	Memantau percepatan pelaksanaan sosialisasi
		Penyusunan RKM	Belum ada RKM yang tersusun karena TFL sedang proses dimobilisasi pada minggu ke-2 bulan Juni 2019.	Mengawal proses penyusunan dokumen RKM.
		Penandatanganan PKS PPK-KSM;	Penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan setelah RKM tersusun dan diverifikasi, ditargetkan seluruh lokasi terpenuhi pada	Memantau percepatan pelaksanaan penandatanganan PKS
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	2.150	2.150	-									
	0360106 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.150	2.150	-									
	2552 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan	2.150	2.150	-									
	001 Usulan Rekomendasi kebijakan bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak	2.150	2.150	-	3	3	-		967				
	Sub Output. 001 Usulan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di		2.150					400	857	214%			
	TOTAL	2.150	2.150	100%									

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	0360106 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan								
	2552 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan								
	001 Usulan Rekomendasi kebijakan bidang								
	Sub Output. 001 Usulan Rekomendasi	60		60	Ya		Ya	Ya	Ya

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	APBN		Koordinasi dan Konvergensi di Tingkat Pusat dengan K/L
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	On process		
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	tidak ada		
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	On the track	Belum seluruh desa mempunyai SK Tim Penanganan Stunting	
E	Informasi Lainnya yang Relevan	melaksanakan Rapat PP (Penyusunan Program), Rakor Eselon II, Rakor Eselon I, RTM		

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	2.000	2.000	0	15	15	0	1.320	868	1	10	10	1
	047 01 07 Program Perlindungan Anak	2.000	2.000	0	15	15	0	1.320	868	1	10	10	1
	2808 Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan	2.000	2.000	0	15	15	0	1.320	868	1	10	10	1
	003 Sosialisasi tentang ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, Pembatasan Gula Garam Lemak (GGL), Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Keluarga dan Anak sebagai 2P dalam Penurunan Stunting	2.000	2.000	-	15	15	-	1.320	868	66%	10	10	100%
TOTAL		2.000	2.000	0				1.320	868	66%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	047 01 07 Program Perlindungan Anak								
	2808 Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan								
	003 Sosialisasi tentang ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, Pembatasan Gula Garam Lemak (GGL), Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Keluarga dan Anak sebagai 2P dalam Penurunan Stunting	15		15	Tidak	ya	ya	ya	

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
Program Bimbingan Masyarakat Islam				
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Sosialisasi tentang ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, Pembatasan Gula Garam Lemak (GGL), Bahaya Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Keluarga dan Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam Penurunan Stunting	1. Lokus pelaksanaan adalah provinsi, dan tidak spesifik kab/kota prioritas stunting; 2. Hambatan pada penjadwalan pelaksanaan yang sering bergeser atau berubah-ubah karena ketidaksesuaian waktu antara pelaksana pusat dan daerah	Untuk kedepannya akan dilakukan di kab/kota prioritas stunting dan Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Sosialisasi tentang ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, Pembatasan Gula Garam Lemak (GGL) bagi Keluarga sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam Penurunan Stunting di 10 Provinsi (Maluku, Kaltim, Kaltara, Kalteng, Jambi, Sumbar, Kepri, Sumsel, Jateng, Gorontalo)	Peserta sosialisasi bukan dari keluarga, melainkan PKK dan kader-kader posyandu yang merupakan unsur terdekat dengan masyarakat (keluarga) yang diharapkan bisa meneruskan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi.	Diharapkan ada komunitas atau forum keluarga yang terbentuk melalui PUSPAGA sehingga sasaran sosialisasi langsung pada keluarga sebagai 2P
		Sosialisasi tentang Bahaya Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) di 10 Provinsi (Maluku, Kaltim, Kaltara, Kalteng, Jambi, Sumbar, Kepri, Sumsel, Jateng, Gorontalo)	Tidak ada hambatan	
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	Pembentukan Kampung Anak Sejahtera di 4 desa di 4 kab/kota prioritas stunting; Kulonprogo, Wonosobo, Grobogan, dan Subang	Mewujudkan komitmen warga dan perangkat desa	Melibatkan pemerintah provinsi
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas			
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

BADAN PUSAT STATISTIK

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	213.759	222.513	8.754									
	054 01 06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	213.759	222.513	8.754									
	2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS	204.244	210.357	6.113									
	009 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	204.244	210.357	6.113	1.028	1.028	-	142.040	139.254	98%	0	0	
	2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	9.515	12.157	2.641							0	0	
	003 Publikasi Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Terbit Tepat Waktu	9.515	12.157	2.641	21	21	-		4.371		4	0	0%
	Komp. 051 SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI							3.574	3.541	99%	4	0	0%
	TOTAL	213.759	222.513	104%									

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	054 01 06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik								
	2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS								
	009 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat		514	514			Ya		
	2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat								
	003 Publikasi Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Terbit Tepat Waktu								
	Komp. 051 SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI				Ya	Ya	Ya		

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Rapat interkementerian pada 12 Maret 2019 untuk pembahasan framework dan kuesioner Susenas MKP 2019 dengan melibatkan K/L, akademisi, lembaga UN yang terkait dengan bidang kesehatan, Rapat bilateral untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan serta konsep dan definisi dalam kuesioner Susenas MKP 2019 dengan Uji coba kuesioner Susenas MKP 2019 dengan dukungan Kementerian PUPR di DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan	Belum seluruh K/L memberikan perhatian pada pengumpulan data kesehatan ibu dan anak	
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	Menghadirkan narasumber communication for development pada pelatihan instruktur nasional Susenas MKP 2019 dengan dukungan UNICEF. Materi yang disampaikan terkait interpersonal communication yang akan bermanfaat dalam proses pengumpulan data di lapangan untuk menghasilkan data yang		
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	Penyusunan plausibility analysis untuk pengukuran kualitas data anthropometry hingga tingkat kabupaten/kota dengan dukungan UNICEF		
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas			
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	1.000	14.530	13.530,00				4.790	1.011	21%			
	055 01 06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.000	14.530	13.530,00				4.790	1.011	21%			
	2937 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup	1.000	14.530	13.530,00				4.790	1.011	21%			
	608 Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	1.000	14.530	13.530,00	1	1	-	4.790	1.011	21%			
	Komp. 640 Koordinasi strategis gerakan dan	1.000	845	(155,00)				417	489	117%			
	D. Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)	0	13.685	13.685,00				4.373	522	12%			
	TOTAL	1.000	14.530	13.530,00				4.790	1.011	21%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	055 01 06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional								
	2937 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan								
	608 Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	Komp. 640 Koordinasi strategis gerakan dan								
	D. Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)								

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran			
	Koordinasi Strategis Percepatan Perbaikan Gizi Kegiatan sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya sesuai dengan penugasan Kementerian PPN/Bappenas dalam Perpres 42/2013 sebagai Ketua Tim Teknis. Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY) Sesuai Grant Agreement Hibah No. TFOA7565, Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu implementing agency (IA). Anggaran baru dialokasikan melalui revisi DIPA pada bulan Maret 2018. Hibah efektif dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.			Penyiapan Annual Work Plan (AWP) hibah TA 2020 harus dilakukan lebih awal dengan berkoordinasi dengan IA lainnya (Setwapres dan Kemendagri) untuk memastikan tidak ada tumpang tindih/duplikasi kegiatan.
B	Proses Pelaksanaan Anggaran			
	Koordinasi Strategis Percepatan Perbaikan Gizi (a) Koordinasi penyusunan ringkasan output K/L TA 2019 yang mendukung penurunan stunting melalui serial pertemuan teknis antara Bappenas dan Kemenkeu serta lintas K/L. Terdapat 18 K/L yang diidentifikasi memiliki output yang mendukung penurunan stunting dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29 Trilyun. Laporan tersebut telah disampaikan ke Setwapres pada tanggal 31 Januari 2019. (b) Koordinasi penyusunan Rancangan Perpres Stranas Percepatan Penurunan Stunting sebagai revisi dari Perpres 42/2013 (Januari - Juni 2019). Perubahan didasarkan pada perkembangan kelembagaan upaya penurunan stunting yang mencakup K/L yang lebih luas dari yang terdapat pada Perpres 42/2013 dan perubahan pendekatan yang digunakan dalam pilar Stranas. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Panitia Antar Kementerian dan penyusunan substansi Perpres secara intensif dengan melibatkan Setkab. (c) Koordinasi SUN networks. Gernas PPG dilaksanakan melibatkan multistakeholder meliputi pemerintah, akademika, CSO, donor dan mitra pembangunan, serta dunia usaha. Koordinasi dilakukan untuk update dan sinkronisasi kontribusi SUN networks dalam upaya penurunan stunting. (d) Penentuan 260 kab/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020 melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri dan LPNK serta Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). (e) Kegiatan bimbingan teknis ke daerah yang meminta pendampingan ke Bappenas. Sudah dilakukan untuk Makassar, Nunukan, Yogyakarta, dan Medan) dengan pendanaan melalui APBN Bappenas, Malinau, Banjarmasin dan Palangkaraya dengan pendanaan Pemda, Pangkajene dan Bima (pembayaan Kompak) dan Ruteng (pembayaan SNV), dan beberapa daerah dengan dukungan Nutrition International. Perwakilan dari Bappenas dan Sekretariat Gernas PPG memberikan materi mengenai kebijakan dan strategi penurunan stunting pada acara workshop dan rapat koordinasi terkait stunting maupun rembuk stunting yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (f) Multilateral meeting RKP 2020 kegiatan prioritas penurunan stunting (22 April 2019). Dalam rangka penyusunan RKP 2020, multilateral meeting antara Bappenas dan K/L terkait untuk memastikan dukungan K/L dalam pencapaian target penurunan stunting pada tahun 2020. (g) Koordinasi penyiapan pemanfaatan hibah INEY mulai dari penyusunan Annual Work Plan (AWP) 2019, detail rencana kegiatan dan timeline termasuk aspek administrasi hibah dan rencana pengadaan. (h) Koordinasi teknis penyusunan grand design penelitian nasional pencegahan stunting bersama dengan LIPI. LIPI telah melakukan pemetaan awal penelitian terkait stunting dan identifikasi kebutuhan ke depan berdasarkan hasil WNPG XI. Tindak lanjut yang diperlukan adalah menyusun framework penelitian untuk lima tahun ke depan yang akan mendukung peningkatan efektivitas intervensi penurunan stunting.	Pertemuan koordinasi dengan SUN networks non-pemerintah masih belum dilakukan secara rutin. Jadwal kegiatan sampling di Jawa Barat dan Jawa Timur bertepatan dengan bulan puasa dan libur lebaran sehingga pelaksanaannya diundur TA untuk menyusun grand design penelitian stunting belum direkrut.	Pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan SUN networks non-pemerintah secara rutin minimal setiap 3 bulan. Kegiatan sampling akan dilaksanakan pada triwulan III agar data yang diperoleh sesuai rencana. Percepatan kegiatan penyusunan grand design setelah TA direkrut (perkiraan bulan September).	

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Analisa		Analisa	
Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
	<p>(i) Konfirmasi output Kemenag TA 2019 yang mendukung penurunan stunting. Hasil konfirmasi digunakan untuk melakukan update terhadap ringkasan output stunting. Output keluarga sakinah yang terbina tidak lagi dimasukkan karena tidak relevan sementara output Bimbingan Keluarga Hittasukhaya yang sebelumnya tidak teridentifikasi dimasukkan sebagai output pendukung penurunan stunting.</p> <p>(j) Diseminasi temuan awal kajian formatif komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting Fase 1 (14 Juni 2019). Studi menunjukkan bahwa masih ada mis-interpretasi media promosi dan penerjemahannya ke dalam kearifan lokal, pesan yang terlalu kompleks dan struktur yang tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Perlu ada studi mendalam mengenai implemmentasi strategi komunikasi di masyarakat.</p> <p>Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)</p> <p>(a) Pertemuan rekonsiliasi-1 output K/L TA 2020 yang mendukung penurunan stunting (25 Maret 2019). Sesuai dengan pedoman penandaan (tagging), Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemenkeu mengidentifikasi output K/L TA 2020 yang mendukung percepatan penurunan stunting sesuai dengan Pagu Indikatif 2020. Pemetaan ini juga dilakukan untuk mendorong K/L melakukan penandaan tematik stunting pada aplikasi Renja K/L (KRISNA).</p> <p>(b) Pertemuan tematik pendalaman output PAUD, KRPL, air bersih dan sanitasi, pengasuhan, dan bantuan sosial PKH dan BPNT (10, 11, 12, 15, dan 16 April 2019). Pertemuan melibatkan lintas sektor dan pakar untuk menggali lebih dalam pelaksanaan intervensi sensitif dan konvergensinya di tataran pelaksanaan, tantangan dan rekomendasi perbaikan ke depan.</p> <p>(c) Dukungan pelaksanaan multilateral meeting RKP 2020 kegiatan prioritas penurunan stunting (22 April 2019).</p> <p>(d) Reviu dan pemutakhiran pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota (5 April 2019 dan 24-25 Juli 2019). Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Kemendagri telah menyusun pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota pada bulan September 2018. Reviu dan pemutakhiran dilakukan untuk mengakomodir feedback penerapan pedoman di lapangan. Pedoman dan petunjuk teknis yang telah dimutakhirkan telah dicetak dan dibagikan ke peserta daerah pada acara Rakornis Setwapres tanggal 1-4 Juli 2019.</p> <p>(e) Update ringkasan output K/L TA 2019 yang mendukung penurunan stunting (koordinasi dengan Kemenag dan Kemenkeu). Pada Januari 2019, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu menyusun ringkasan output K/L TA 2019 yang mendukung penurunan stunting. Untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi, dilakukan pemutakhiran terutama pada output Kemendikbud, Kementan, Kemenag, dan Setwapres.</p> <p>(f) Koordinasi dengan Kampung Zimba Desa Tamansari (14 Juni dan 29 Juli 2019). Kampung Zimba Desa Tamansari merupakan inovasi dari daerah untuk edukasi gizi seimbang kepada masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk mengidentifikasi praktik baik yang sudah dilakukan dan identifikasi rencana pengembangan desa Tamansari sebagai desa percontohan. Sebagai tindak lanjut dilakukan pemetaan data dasar dan kebutuhan program/kegiatan lintas sektor (spesifik dan sensitif) untuk meningkatkan status gizi masyarakat terutama pencegahan stunting.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan masih terbatas pada kegiatan swakelola, sementara kegiatan hibah INEY yang terkait pengembangan KRISNA untuk tagging dan tracking output stunting, penilaian kinerja program dan anggaran, monev DAK dan kajian menu DAK stunting, bimbingan teknis kebijakan gizi, identifikasi praktik baik, komunikasi publik, analisis kewilayahan dan determinan stunting, dan penyusunan grand design penelitian stunting masih belum dimulai karena proses pengadaan Administrative Service Firm (ASF) dan tenaga ahli/konsultan yang masih dalam proses.</p>	<p>Dalam pelaksanaan kegiatan, tenaga ahli/konsultan dibawah Bappenas harus berkoordinasi secara intensif dengan TA dibawah Setwapres dan Kemendagri untuk isu yang sama.</p>
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)		
	<p>Dukungan Nutrition International</p> <p>Nutrition International (NI) mendukung penguatan Sekretariat Gernas Percepatan Perbaikan Gizi (PPG) berupa tim technical assistant (TA) untuk menghasilkan rekomendasi penajaman intervensi sensitif. Manajer Sekretariat membantu Bappenas mengkoordinasikan kegiatan percepatan perbaikan gizi dengan lintas sektor terkait termasuk koodinasi di tingkat pusat (SUN networks), reviu dan penyusunan dokumen, serta pendampingan daerah (Bogor, Yogyakarta, Balikpapan, Kupang, Lombok Barat, Lantuka, Pontianak, Kulonprogo, dan Kab. Gorontalo).</p> <p>Tim TA telah menindaklanjuti hasil dari pertemuan tematik pendalaman output K/L bulan April 2019 dengan kunjungan tim TA ke K/L terkait untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari pengelola program. Hasil kegiatan ini akan menjadi rekomendasi bagi K/L untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dalam penurunan stunting. Rekomendasi ditargetkan selesai disusun pada Desember 2019.</p> <p>TA juga mendukung pengembangan modul pelatihan dari pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota. Modul ditujukan untuk pelatihan TA pool Ditjen Bangda Kemendagri yang akan dilanjutkan secara berjenjang dengan pelatihan bagi staf teknis OPD terkait penanggung jawab aksi integrasi di tingkat provinsi maupun kab/kota. Modul ditargetkan selesai pada September 2019.</p> <p>TA juga mendukung pengembangan dashboard sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi secara online di daerah. Saat ini sudah ada platform dashboard yang dikembangkan dan sudah diuji coba di beberapa kab/kota (Bogor dan Cianjur). Pengembangan dashboard dikoordinasikan dengan intensif dengan Setwapres dan direncanakan selesai pada Desember 2019.</p> <p>Dukungan UNICEF</p> <p>(a) Pelaksanaan Workshop Nasional Fortifikasi sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan/SNI pelaksanaan fortifikasi garam, minyak goreng sawit, tepung terigu, serta biofortifikasi</p> <p>(b) Penyusunan Kajian Sektor Kesehatan/Health Sector Review (HSR) Tahun 2019 dalam Bidang Gizi sebagai masukan bagi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024</p>		<p>Perlunya pendalaman pembahasan terkait dengan biofortifikasi sebagai salah satu alternatif pemenuhan zat gizi mikro</p>
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas		
	*Kegiatan dilakukan di tingkat pusat dengan beberapa kunjungan lapangan ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota).		
E	Informasi Lainnya yang Relevan		

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	39.200	39.200	0				26.038	29.321	113%	44.300	26.155	59%
	059 07 09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	39.200	39.200	0				26.038	29.321	113%	44.300	26.155	59%
	4143 Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Pembangunan Manusia	39.200	39.200	-				26.038	29.321	113%	44.300	26.155	59%
	001 Informasi Publik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	39.200	39.200	-	133.500	127.000	(6.500,00)	26.038	29.321	113%	44.300	26.155	59%
	Sub Komp. 052 D Diseminasi Informasi Publik Tema Stunting Melalui Forum, Media Online/Medsos, Media Elektronik, Media Cetak, dan Media Luar Ruang												
TOTAL		39.200	39.200	100%				26.038	29.321	113%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	059 07 09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi								
	4143 Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Pembangunan Manusia								
	001 Informasi Publik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan								
	Sub Komp. 052 D Diseminasi Informasi Publik Tema Stunting Melalui Forum, Media Online/Medsos, Media Elektronik, Media Cetak, dan Media Luar Ruang	30 titik lokasi Genbest	Nasional	30 titik lokasi Genbest	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
Program Bimbingan Masyarakat Islam				
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	Diseminasi Informasi Publik Tema Stunting Melalui Forum, Media Online/Medsos, Media Elektronik, Media Cetak, dan Media Luar Ruang		
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	a. Forum Genbest di 30 titik kab/kota prioritas stunting dari 60-kab/kota prioritas stunting tahun 2019 (Hingga saat ini sudah berjalan di 15 titik lokasi)	Kurangnya komitmen dari Dinas Kominfo kabupaten prioritas. Beberapa pemda masih belum paham dengan isu stunting, kompetensi pemenang lelang tidak sesuai dengan usulan	Pemilihan mitra penyelenggara yang lebih baik, penguatan komitmen dari Dinas Kominfo kabupaten prioritas
		b. Digital campaign (website Genbest.id, sosmed Genbest, Aplikasi Anak Sehat)	Kurangnya koordinasi dengan K/L terkait untuk penyediaan konten digital campaign, tidak ada SDM yang memiliki kapabilitas untuk konten dan help desk	Perlunya supply konten yang lebih banyak dari Kemenkes, user-generated content, integrated media strategy online and offline.
		c. Kampanye radio, tv, poster, baliho	Perizinan untuk baliho, kurangnya koordinasi dengan K/L terkait untuk penyediaan konten kampanye radio dan tv	Perlunya penguatan koordinasi dengan K/L terkait untuk penyediaan konten kampanye
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)			
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	Forum Sosialisasi genbest adalah kegiatan talkshow dengan mengundang 150 peserta yang terdiri atas ibu muda, remaja, siswi sekolah, bidan, serta media. Talkshow menghadirkan narasumber yaitu ahli gizi, pakar pemberdayaan perempuan, serta influencer. Kegiatan diselingi oleh mini games. Isi kegiatan disebarluaskan kembali kepada masyarakat melalui liputan media dan media sosial genbest.	Desa prioritas stunting tidak hadir karena jarak yang jauh dari lokasi acara. Beberapa pemda (diskominfo) masih belum paham dengan pentingnya isu stunting	Perlunya penguatan koordinasi dengan pemda terkait
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	126.020	123.653	-2.367				75.630	72.416	96%			
	0630106 Program Pengawasan Obat dan Makanan	126.020	123.653	-1.275				75.630	72.416	96%			
	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh	124.070	122.795	(1.275)				74.460	72.360	97%			
	008 KIE Obat dan Makanan Aman	95.852	95.494	(359)	1.270	1.277	7	57.567	66.010	115%	766	903	118%
	089 Desa Pangan Aman	28.218	27.301		2.300	2.300	-	16.893	6.350	38%	1.380	692	50%
	4124 Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	1.950	858	(1.092)				1.170	56	5%			
	005 Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi	1.950	858	(1.092)	2.460	2.460	-	1.170	56	5%	1.476	2.460	167%
	TOTAL	126.020	123.653	-2.367				75.630	72.416	96%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	0630106 Program Pengawasan Obat dan Makanan								
	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh								
	008 KIE Obat dan Makanan Aman	192		192	Ya	-	Ya	Ya	-
	089 Desa Pangan Aman	9 Kab/Kota (34 desa)	64 Kab/Kota (1078 desa)	73 Kab/Kota (1112 desa)	Tidak	YA	Y	Ya	Tidak
	4124 Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang								
	005 Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi	73		73	Ya	Ya	Ya	Ya	-

III Analisa

No.	Tema Kegiatan/ Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
		Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan : Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi		
	1. Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi (Target 5 provinsi : NTT, Bali, NTB, Aceh, Sulawesi Selatan)	1. Masih banyak ditemukan garam tanpa izin edar di peredaran, 2. adanya keterbatasan pelaku usaha dalam sertifikasi SPPT-SNI, 3. Kualitas bahan baku garam konsumsi yang rendah (kadar NaCl dan kadar Air yang tidak	1. Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi bersama K/L secara integratif perlu dilakukan 2. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau petani garam
	2. Advokasi ke Pemda Wilayah Sentra Garam terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi (Target 5 provinsi : NTT, Bali, NTB, Aceh, Sulawesi Selatan)	Perlu peningkatan komitmen Pemda dalam Pengawasan Pangan Fortifikasi	Fortifikasi pangan menjadi kegiatan prioritas di masing-masing Pemerintah Daerah
	3. Penyusunan Informasi Pangan Fortifikasi	Perlu kerjasama lintas sektor dalam penyebaran informasi	Penyebaran informasi yang terintegrasi antar K/L, seperti
	Kegiatan : KIE Obat dan Makanan Aman 1. KIE Obat dan Makanan Aman KIE Obat dan Makanan aman dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan risiko mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Sasaran kegiatan KIE tersebut adalah instansi pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat seluruh Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam KIE Obat dan Makanan Aman ini adalah: a. Layanan informasi b. Layanan pengaduan c. KIE bersama tokoh masyarakat d. KIE di area car free day (CFD) f. KIE melalui media sosial, elektronik, dan cetak Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain: a. Menyusun materi KIE sebagai bahan penyebaran informasi kepada instansi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat serta jurnalis media. b. Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan dengan metode: 1. Penyampaian informasi kepada kelompok antara, yaitu penyampaian informasi yang ditujukan kepada kelompok sasaran dengan tujuan kelompok sasaran akan meneruskan informasi kepada kelompok yang lain. Kelompok sasaran tersebut adalah instansi pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Metode penyampaian informasi yang dilakukan diantaranya advokasi, bimbingan teknis, penyuluhan, dll. 2. Penyampaian informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa. Metode penyampaian informasi yang dilakukan antara lain: Penyuluhan, pameran; Pemberitaan dalam bentuk artikel atau advertorial melalui media cetak, radio, media online; Penyebaran informasi melalui website BPOM (www.pom.go.id); Penyebaran informasi melalui media sosial antara lain twitter		
	Kegiatan : Desa Pangan Aman Perencanaan dan penganggaran kegiatan Desa Pangan Aman dilakukan di tahun 2018 melalui penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Penerbitan Keputusan Kepala BPOM Tentang Rencana Kegiatan Terpadu di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2019. Kegiatan desa pangan aman terdiri dari: (1) Intervensi keamanan pangan kepada 105 desa di 33 Provinsi termasuk Pengawasan kepada 105 desa di 33 Provinsi desa yang sudah diintervensi tahun 2018 (2) Intervensi keamanan pangan kepada 2090 desa bersinergi dengan Kemendesa di 10 Provinsi Kegiatan intervensi terdiri dari: -Advokasi Kelembagaan Desa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan perangkat desa untuk memperkuat kapasitas desa; memetakan program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan program keamanan pangan desa; menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan pangan desa -Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di desa. -Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan pangan di komunitas kelurahan/desa dan produsen pangan desa; meningkatkan kemampuan menerapkan praktek keamanan pangan yang baik di tingkat rumah tangga dan tingkat IRTP/PKL serta Ritel -Monitoring dan Evaluasi, kegiatan ini bertujuan untuk melihat proses maupun kemajuan pelaksanaan program GKPD; mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program GKPD	Perencanaan dan penganggaran kegiatan dilaksanakan tahun 2018. Namun penetapan desa yang akan diintervensi baru dapat dilakukan pada awal tahun 2019 setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dapat berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan jika koordinasi dengan Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan tepat waktu	Penentuan desa yang akan diintervensi ditetapkan sebagai prioritas utama yang harus dilakukan diawal tahun (maksimal Bulan Februari) oleh setiap daerah

III Analisa

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No.	Tema Kegiatan/ Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
		Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
B	Proses Pelaksanaan Anggaran		
	Kegiatan : Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi		
	1. Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi (telah terlaksana di NTT pada 29 Juli - 31 Juli 2019, di bulan Agustus direncanakan dilaksanakan di Bali dan NTB, dan di Bulan September direncanakan dilaksanakan di Aceh dan Sulawesi Selatan)		Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
	2. Advokasi ke Pemda Wilayah Sentra Garam terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi (telah terlaksana di NTT pada 29 Juli - 31 Juli 2019, di bulan Agustus direncanakan dilaksanakan di Bali dan NTB, dan di Bulan September direncanakan dilaksanakan di Aceh dan Sulawesi Selatan)		Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
	3. Penyusunan Informasi Pangan Fortifikasi (telah dilaksanakan pada kegiatan Car Free Day Hari Keamanan Pangan Nasional pada 30 Juni 2019)		
	Kegiatan : Desa Pangan Aman		
	Untuk pelaksanaan intervensi keamanan pangan di desa disusun rencana pelaksanaan untuk kegiatan sebagai berikut: (1) Intervensi keamanan pangan kepada 105 desa di 33 Provinsi -Advokasi Kelembagaan Desa: Triwulan I -Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD):Triwulan II-III -Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa: Triwulan II-III -Monitoring dan Evaluasi: Triwulan IV -Pengawasan kepada desa yang diintervensi tahun sebelumnya bertujuan untuk memastikan bahwa desa yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan: Triwulan IV (2) Intervensi keamanan pangan kepada 2090 desa bersinergi dengan Kemendesa di 10 Provinsi -Advokasi Kelembagaan Desa: Triwulan II-III -Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD): Triwulan III-IV -Monitoring dan Evaluasi: Triwulan IV	Pelaksanaan intervensi keamanan pangan di beberapa provinsi mundur dari jadwal yang telah ditetapkan, antara lain disebabkan oleh jadwal pelaksanaan kegiatan desa pangan aman yang bersamaan dengan kegiatan di desa	Setiap daerah menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman ke Desa-Desa yang diintervensi pada awal tahun agar Desa-Desa tersebut dapat menyesuaikan/mensinergikan kegiatan rutin desa dengan kegiatan desa pangan aman
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)		
	Kegiatan Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi : Dukungan dalam kegiatan monitoring oleh Kemenko Maritim dan K/L lain Kegiatan Desa Pangan Aman : Untuk keberlanjutan program, Badan POM melaksanakan kegiatan pengawasan ke desa yang sudah diintervensi tahun sebelumnya. Tujuan kegiatan pengawasan adalah untuk memastikan desa yang sudah diintervensi melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara mandiri.	Belum semua desa memasukan kegiatan keamanan pangan pada APBDes untuk melanjutkan kegiatan keamanan pangan secara mandiri meskipun Keamanan pangan telah ditetapkan sebagai kegiatan prioritas pada Permendesa tentang Priotas Penggunaan Dana Desa.	Bersinergi dengan K/L lainnya untuk melakukan advokasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk dapat melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan dengan cara memasukan kegiatan keamanan panganpada APBDes, mengintegrasikan kegiatan keamanan pangan dengan program rutin di desa dll.
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas		
	Kegiatan Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi		
	Kegiatan diprioritaskan dilaksanakan ke daerah-daerah yang masuk ke dalam 160 kabupaten/kota stunting sesuai list Bappenas. Untuk kegiatan pengawasan pangan fortifikasi dan advokasi ke Pemda diprioritaskan ke daerah yang merupakan sentra produksi garam atau sentra produksi pangan fortifikasi.		
	Kegiatan Desa Pangan Aman		
	Capaian sampai dengan Semester I: (1) Intervensi keamanan pangan kepada 105 desa di 33 Provinsi -Advokasi Kelembagaan Desa: telah dilaksanakan di 105 desa yang ada di 33 provinsi -Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD):telah dilatih 1120 orang di 25 provinsi untuk menjadi KKPD -Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa: telah dilakukan bimbingan teknis keamanan pangan ke 1583 orang di 11 provinsi (2) Intervensi keamanan pangan kepada 2090 desa bersinergi dengan Kemendesa di 10 Provinsi -Advokasi Kelembagaan Desa: telah dilaksanakan di 1007 desa di 5 provinsi	Komunitas desa mempunyai keterbatasan dana untuk memperbaiki sarana produksi pangan agar dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan	Bekerjasama dengan K/L lainnya, Swasta/BUMN melalui program CSR untuk perbaikan sarana produksi pangan di desa
E	Informasi Lainnya yang Relevan		
	Kegiatan Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi		
	33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM melakukan sampling pangan fortifikasi masing-masing setidaknya 1 kabupaten/kota yang terdapat dalam daftar 160 Kabupaten/Kota Stunting, sehingga total kabupaten/kota yang diintervensi sebanyak 73 lokus.		Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Desa Pangan Aman		
	Kegiatan Desa Pangan Aman akan dilaksanakan diseluruh Kab/Kota yang termasuk lokus kegiatan Stunting maupun Non Stunting.		Revitalisasi program desa pangan aman: kerjasama dengan Swasta/BUMN melalui Program CSR dll

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	7.750	7.750	-				2.090	1.526	73%			
	067 03 06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.750	7.750	-				2.090	1.526	73%			
	5483 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	7.750	7.750	-				2.090	1.526	73%			
	008 Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam peningkatan akses pelayanan sosial dasar	2.000	2.000	-	100	100	-	1.225	1.083	88%	100		0%
	011 Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting	5.750	5.750	-	20	20	-	865	442	51%	20		0%
	TOTAL	7.750	7.750	-				2.090	1.526	73%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	067 03 06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat								
	5483 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar								
	008 Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam peningkatan akses pelayanan sosial dasar								
	011 Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa								
	Komp. 051 Koordinasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa								

III Analisa

No.	Tema Kegiatan/ Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
		Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran		
	Advokasi Perbup/Perwali tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa melalui Fasilitasi Dinas PMD Kabupaten dan di Pusat melalui Ditjen Bina Pemdes	adanya regulasi yang masih perlu harmonisasi terkait dasar pengalokasian pengelolaan PAUD di Desa (PAUD milik Desa dan/atau PAUD Negeri/Swasta) yang menimbulkan keraguan bagi Pemerintah Desa	perlu fasilitasi untuk harmonisasi terkait pengaturan atas pengalokasian pengelolaan PAUD
B	Proses Pelaksanaan Anggaran		
	Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa; dan Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (Materi Konvergensi Pencegahan Stunting menjadi materi utama pada kegiatan tersebut) 5 (Lima) Kegiatan Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (1. Kab Trenggalek terdiri dari 83 Kader (KPMD, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Penggerak PKK) di 83 Desa, Jatim, Kab. Sukabumi Prov Jabar terdiri dari 163 Kader (KPMD, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Penggerak PKK) di 163 Desa, Kab Deli Serdang Prov Sumut terdiri dari 101 Kader (KPMD, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Penggerak PKK) di 101 Desa, Kab Maluku Tengah Prov Maluku terdiri dari 47 Kader (KPMD, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Penggerak PKK) di 47 Desa, Kab Pinrang dan Kab Toraja Utara Prov Sulsel terdiri dari 35 Kader (KPMD, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Penggerak PKK) di 35 Desa	1. Keterbatasan anggaran pencetakan Pedoman umum KPM, Panduan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dan Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat, sehingga didistribusikan softcopy ke peserta 2. Tikar Pertumbuhan Aku Tumbuh Tinggi dan Cerdas (Alat Deteksi Dini Stunting) hanya diperagakan tidak dapat didistribusikan ke semua desa 3. Belum dapat dilakukan sosialisasi aplikasi Omspan sebagai persiapan pemenuhan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa untuk pemenuhan atas pengaturan PMK 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa, di mana tahun 2021 Pemerintah Desa dan Kabupaten wajib melaporkan scorecards konvergensi desa dengan sanksi bila tidak melaporkan maka pencairan dana desa tahap ketiga tidak dapat dicairkan	1. Mendorong Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pembiayaan untuk penyediaan penggantian Tiga Buku dan Tikar Pertumbuhan 2. Telah dimuat pengaturan dukungan pembiayaan atas angka 1 (satu) dalam rancangan Permendesa PDTT tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 3. Pendamping Desa secara simultan mendiseminasikan Scorecards konvergensi desa 4. memperluas cakupan pendampingan serta penguatan fasilitasi KPMD
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)		
	Pembentukan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan Pemanfaatan Dana Desa bagi pencegahan Stunting 1. Sejak tahun 2015 hingga 2018, Dana Desa telah berkontribusi pada peningkatan intervensi sensitif pencegahan stunting seperti: terbangunnya Polindes sebanyak 9.692 unit, pembangunan Posyandu sebanyak 24.820 unit, pembangunan PAUD sebanyak 50.854 unit, MCK dan jamban keluarga sebanyak 240.587 unit, sarana dan prasarana air bersih sebanyak 959.569 unit, pembangunan sumur sebanyak 45.169 unit, dan sebagainya. Dana Desa juga sangat efektif dalam mendorong tingkat kemandirian Desa. 2. Sosialisasi secara berkelanjutan atas Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk pencegahan anak kerdil (stunting) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, khususnya pada Pasal 24 ayat (2) huruf c, angka 2 yang mengatur tentang laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 3. Kemendagri memastikan agar semua Kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa sebagai dasar bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa merencanakan program/kegiatan dan anggaran untuk pelayanan publik (pelayanan sosial dasar), khususnya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan berkualitas di Desa dalam upaya pencegahan stunting; 4. Kemendagri bersama Bappenas dan Kemenkeu memastikan dukungan APBN dan APBD Prov/Kab. mengalokasikan anggaran ketahanan pangan untuk konvergensi pencegahan stunting di Desa.	Tidak ada pembiayaan khusus untuk memfasilitasi pembentukan rumah desa sehat	Pendamping Desa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa untuk menstrategikan fasilitasi pembentukan Rumah Desa Sehat secara simultan dalam forum-forum resmi pertemuan di desa
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas		
	100 Desa untuk Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam peningkatan akses pelayanan sosial dasar	Penyesuaian waktu dengan kegiatan prioritas lainnya di bulan September	Pelaksanaan di Bulan September
	20 Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Penyesuaian waktu dengan kegiatan prioritas lainnya di bulan Agustus	Pelaksanaan di Bulan Agustus
E	Informasi Lainnya yang Relevan		

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Intervensi Sensitif	93.399	59.892	-33.507				89.672	28.860	32%			
	0680106 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	93.399	59.892	-33.507				89.672	28.860	32%			
	3317 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	3.727	3.727	-				0	1.890				
	021 Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	3.727	3.727	-	10.070.635	10.070.635	-		1.890				
	3331 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	89.672	56.165	(33.507)				89.672	26.971	30%			
	081 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	30.577	18.338	(12.239)	2.831.614	2.831.614	-	30.577	7.651	25%	2.831.614	743.183	26%
	Komp. 247 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta (Hanya dihitung kegiatan pengadaan materi dan media KIE, sosialisasi dan peningkatan kapasitas di 34 provinsi dan 160 kab/kota)												
	085 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	59.095	37.828		29.327	29.327		59.095	19.320	33%	29.327	10.587	36%
	Komp. 242 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dikeluarkan sub-komponen terkait Gen-Re, Jambore, Hari Remaja, Rakornas)												
	Komp. 243 Pembinaan Kelompok BKR (Dikeluarkan sub-komponen terkait Gen-Re, Jambore, Hari Remaja, Rakornas)												
	TOTAL			-33.507				89.672	28.860	32%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Intervensi Sensitif								
	0630106 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga								
	3317 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak								
	021 Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0	514 kab/kota	514 kab/kota	tidak	ya	tidak	ya	ya
	3331 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi								
	081 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	160 kab/kota	0	160 kab/kota	ya	tidak	ya	ya	ya
	Komp. 247 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta	160 kab/kota	0	160 kab/kota	tidak				
	085 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri	514 Kab/Kota	0	514 Kab/Kota	tidak	ya	ya	ya	ya
	Komp. 242 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dikeluarkan sub-komponen terkait Gen-Re Jambore Hari Remaja, Rakornas)	514 Kab/Kota	0	514 Kab/Kota	tidak	ya	ya	ya	ya
	Komp. 243 Pembinaan Kelompok BKR (Dikeluarkan sub-komponen terkait Gen-Re, Jambore, Hari Remaja, Rakornas)	514 Kab/Kota	0	514 Kab/Kota	tidak	ya	ya	ya	ya

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran	1. Melakukan rapat diskusi 3 pihak BKKBN bersama Bappenas dan Kemenkeu tentang perencanaan output prioritas nasional pada bulan Maret-April 2. Penyusunan perencanaan jadwal kegiatan di masing-masing perwakilan BKKBN provinsi 3. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja target dan anggaran	Ketersediaan alokasi anggaran yang ada belum mencukupi untuk memanggil semua peserta yang akan menjadi fasilitator di lapangan, sehingga kita mengoptimalkan dari alokasi anggaran yang tersedia	Optimalisasi alokasi anggaran dari dana APBN dan DAK baik Fisik maupun non Fisik
B	Proses Pelaksanaan Anggaran	1. Memperbanyak materi promosi dan KIE 1000 HPK bagi Keluarga yang memiliki Baduta sebanyak 2.831.614 2. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola (OPD-KB, PK/PLKB dan Kader Kelompok BKB) 3. Sosialisasi Materi dan media KIE tentang 1000 HOK bagi keluarga yang memiliki Baduta 4. Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan	1. Masih banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, karena pemahaman pengelola yang masih beragam 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga lini lapangan 3. Masih banyak provinsi yang masih dalam tahap proses penggandaan modul dan media	1. Sosialisasi Petunjuk Teknis promosi dan KIE 1000 HPK 2. Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan tentang promosi dan KIE 1000 HPK 3. Percepatan pengiriman prototype dan penggandaan
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	Kegiatan Workshop Konselor sebaya dan pengembangan konten sosial media genre indonesia dan dokter gen z serta state of world population (swop) 2019, yogyakarta - solo 23-29 April 2019 (anggaran JHCCP)	masih belum optimalnya kapasitas dalam pengembangan konten isi pesan serta dalam kurangnya persiapan dalam menghadapi perubahan remaja di Era Digital	1. Perlunya penguatan Kapasitas dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan dan perubahan bagi Remaja di era digital. 2. Perlunya Peningkatan kapasitas dalam mengembangkan konten dalam berbagai format; tulisan, multimedia, dan visual; sebagai medium untuk penyampaian pesan-pesan edukatif terutama

Hasil Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan, stakeholder, dll.)	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas	<p>1. Melaksanakan Workshop/Orientasi/sosialisasi penguatan Digital Leadership, Penggandaan kepada pengelola program KKBPK</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi pencapaian target/locus yang di targetkan, melalui WA group, Vicon, Surat Sekretaris Utama, serta monitoring ke lapangan yang dilaksanakan pada bulan maret - desember 2019;</p> <p>3. Stakeholder lintas sektor K/L terkait antara lain (Kantor Staf Presiden (KSP), Bappenas, Kemendikbud, Kemenkes, KemenPPPA, Kementerian Agama, BP4 dan beberapa mitra kerja seperti Forum GenRe Indonesia (FGI); Tim Penggerak PKK Pusat/Propinsi/Kab/Kota; Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana 9IPEKBI); Badan kontak majelis taklim (BKMT); Perhimpunan Guru Bimbingan dan Konseling.</p>	<p>Laporan SMART pertanggal 2 Juli 2019.</p> <p>Berdasarkan hasil monitong melalui Group WA, 27 provinsi telah melaporkan realisasi anggaran beserta volumenya. Sementara itu, terdapat 2 provinsi yang sudah realisasi volume dan anggaran melebihi target dikarenakan ada kelompok yang bukan menjadi target Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) yang terkait pencegahan dan penurunan stunting tetapi menerima operasional Pro PN tersebut dan dilaporkan di Smart (provinsi sumbar realisasi sampai saat 455 volume dan 75,21% anggaran) sedangkan (provinsi sulbar realisasi sampai saat ini 113 volume dan 75,21% anggaran), Masih terdapat 6 provinsi lainnya yang belum realisasi volume dan realisasi anggaran karena masih proses pengadaan cetak buku dan modul terlebih dulu, baru dilakukan sosialisasi.</p>	<p>Akan dilaksanakan pertemuan kembali antara Kasubbid Remaja serta Kasubbid Balita dan anak dan Kasubbag Perencanaan Provinsi tentang penguatan kualitas pelaksana Pro PN tentang cara pengisian pencatatan dan pelaporan Pro PN melalui SMART Pro PN.</p>
E	Informasi Lainnya yang Relevan			

Hasil Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Semester I TA 2019 Program Percepatan Penurunan Stunting

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

I KINERJA ANGGARAN DAN OUTPUT

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Alokasi di tingkat output (Juta rupiah)			Target di tingkat output			Realisasi Anggaran Semester I (Juta Rupiah)			Realisasi Output Semester I		
		Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	Ringkasan Penandaan	Pagu Harian	Selisih	RPD	Realisasi	%	RPD	Realisasi	%
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis	13.827	13.827	-				3.697	576	16%			
	080 01 06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi	13.827	13.827	-				3.697	576	16%			
	3446 Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju	614	614	-	1	1	-	304	47	15%	0,45	0,45	100%
	002 Data Riset Hasil Analisis dengan Menggunakan Teknik Nuklir	614	614	-	1	1	-	304	47	15%	0,45	0,45	100%
	3449 Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan	13.213	13.213	-				3.393	529	16%	0,5	0,45	90%
	006 Dokumen Teknis Mikronutrisi Pada Pangan Anak Balita Di Daerah Malnutrisi	13.213	13.213	-	2	2	-	3.393	529	16%	0,5	0,45	
	TOTAL	13.827	13.827	-				3.697	576	16%			

II INDIKASI KONVERGENSI IMPLEMENTASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)			Kesesuaian Target (Ya/Tidak)		Koordinasi dengan Stakeholder (Ya/Tidak)		
		Lokasi Prioritas	Lokasi Lainnya	Jumlah	1000 HPK	Lainnya	K/L Lainnya	Pemda	Non Pemerintah
A	Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis								
	080 01 06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi								
	3446 Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju								
	002 Data Riset Hasil Analisis dengan Menggunakan Teknik Nuklir	2	2	4	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	3449 Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan								
	006 Dokumen Teknis Mikronutrisi Pada Pangan Anak Balita Di Daerah Malnutrisi	3	-	3	tidak	tidak	ya	tidak	ya

III Analisa

No.	Tema Kegiatan	Aktivitas/Uraian Kegiatan (bentuk aktivitas, jenis intervensi, kapan dilaksanakan, periode pelaksanaan,	Analisa	
			Hambatan	Rekomendasi Perbaikan
A	Proses Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan, Output dan Sub Output BATAN yang mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting adalah: '3446. Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju dengan Iptek Nuklir, Ouput 003. Data Riset Hasil Analisis dengan Menggunakan Teknik Nuklir khususnya sub output 002 Data Riset Makro-mikromineral pada Bahan Pangan di Wilayah Prevalansi Malnutrisi. Sesuai perencanaan yang disusun dalam Renja dan RKA KL, kegiatan yang mendukung penurunan stunting adalah 3446.002.002 dengan anggaran Rp614.360.000,- Perencanaan kegiatan dilakukan pada tahun 2014. Kegiatan akan dilakukan selama 5 tahun terhitung tahun anggaran 2015-2019. Kegiatan sampling bahan pangan direncanakan dilakukan di Kota/Kabupaten wilayah prevalensi malnutrisi yang merupakan 7 Provinsi prioritas Kemenkes yaitu Propinsi NTT, NTB, Sulawesi Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 2019 topiknya adalah data kandungan makro-mikro mineral pada bahan pangan olahan di wilayah prevalensi malnutrisi Kabupaten Pandeglang, Cianjur, Bangkalan dan Magelang. 3449. Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor Riset, output 006. Dokumen Teknis Mikronutrisi pada Pangan Anak Balita di Daerah Malnutrisi dengan anggaran Rp13.212.900.000,-, dengan rincian belanja barang Rp835.546.000,- belanja modal Rp12.377.354.000,-.			
B	Proses Pelaksanaan Anggaran Realisasi anggaran pada semester I adalah: 3446.002.002 Data Riset Makro-mikromineral pada Bahan Pangan di Wilayah Prevalansi Malnutrisi adalah Rp47.230.024,- (7,96%) dari rencana penarikan semester I sebesar Rp304.021.559,-. Realisasi tidak sesuai rencana karena kegiatan sampling di Jawa Barat dan Jawa Timur diundur pelaksanaannya karena bertepatan dengan bulan puasa dan libur lebaran. Sebagai kompensasi belum dilaksanakan sampling di 2 Provinsi, maka pengerjaan pengeringan dan iradiasi sampel bahan pangan untuk 2 wilayah yang telah disampling (Banten dan Jawa Tengah) telah melampaui target, sehingga target 45% tetap tercapai. 3449.006.001 Dokumen Teknis Mikronutrisi pada Pangan Anak Balita di Daerah Malnutrisi adalah Rp528.963.500,- (4%) dari rencana penarikan semester I sebesar Rp3.392.694.635,-. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain analisis sampel dan pengolahan data sampling 2 lokasi yang dilakukan pada tahun 2018 dan proses perijinan etik untuk sampling di Cianjur.	Jadwal kegiatan sampling di Jawa Barat dan Jawa Timur bertepatan dengan bulan puasa dan libur lebaran sehingga pelaksanaannya diundur Penambahan lokasi di Cianjur untuk tahun 2019 belum dilakukan karena masih menunggu proses perijinan etik pada semester 1, dan akan dilakukan pada semester 2	Kegiatan sampling akan dilaksanakan pada triwulan III agar data yang diperoleh sesuai rencana. Pelaksanaan sampling lokasi di Cianjur akan dilakukan pada semester 2	
C	Aktivitas Lainnya (termasuk yang pendanaannya non K/L dan non APBN)	Kegiatan di BATAN murni didanai dengan DIPA tahun 2019 dan tidak ada dana yang berasal dari non K/L dan non APBN		
D	Kinerja Pada Lokasi Prioritas a. 3446.002.002 Data Riset Makro-mikromineral pada Bahan Pangan di Wilayah Prevalansi Malnutrisi Telah diperoleh sekitar 80 jenis bahan pangan olahan dari masing-masing Kabupaten yang disampling yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Magelang. Sampel bahan pangan tersebut telah dipreparasi dan dikeringkan sehingga siap diiradiasi. Sebagian bahan pangan telah diiradiasi dan ditentukan kandungan konsentrasi makro-mikro mineralnya. Pada kegiatan tahun ini sampling bahan pangan akan dilakukan di Kabupaten Bangkalan Madura dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. b. 3449.006.001 Dokumen Teknis Mikronutrisi pada Pangan Anak Balita di Daerah Malnutrisi: 1) Pengolahan data total recall dari responden baduta stunting di daerah kota Kupang dan kabupaten Timor Tengah Selatan. 2) Preparasi sampel ASI dari ibu baduta stunting di daerah Kupang dan Timor Tengah Selatan 3) Pengajuan proses perijinan ke komisi etik untuk pelaksanaan sampling di daerah Cianjur, Jawa Barat 4) Karakterisasi kandungan zat gizi mikro pada sampel asupan baduta stunting di Kupang dan Timor Tengah Selatan menggunakan teknik analisis aktivasi neutron	Kegiatan sampling di Kabupaten Bangkalan dan Cianjur yang rencana pelaksanaannya bulan Juni 2019 ditunda pelaksanaannya karena bertepatan dengan puasa dan libur Idul Fitri. Diharapkan awal bulan Juli sudah terealisasi Data Food Composition Table Indonesia yang tidak lengkap Pengoperasian Reaktor TRIGA 2000 yang terkadang mengalami kendala, sehingga analisis memerlukan waktu lebih lama	Kegiatan sampling di Kabupaten Cianjur dan Bangkalan dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Data total recall akan dibandingkan dengan real sampel yang diambil dan dianalisis di laboratorium. Data primer ini yang akan dijadikan acuan sedangkan data total recall sebagai pelengkap	
E	Informasi Lainnya yang Relevan			



**Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan**

Jl. DR. Wahidin No.1, Jakarta 10710
Telp: (021) 3849315, Fax: (021) 3847157
www.anggaran.kemenkeu.go.id

**Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas**

Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310
Telp: (021) 3156156, Fax: (021) 3148552
E-mail: sekretariat.pm2k@bappenas.go.id